

PENDAHULUAN

Partisipasi politik mencuat kembali akhir-akhir ini seiring dengan perkembangan aliran pemikiran demokrasi deliberatif, yang menekankan bahwa sebuah keputusan bersama harus merupakan hasil dari sebuah proses demokratis yang melibatkan semua orang yang akan menikmati keputusan lewat sarana argumentasi yang ditawarkan oleh dan kepada peserta yang komit terhadap nilai rasionalitas dan ketidakberpihakan. Atau dengan kata lain, sebuah keputusan disebut kolektif dan karena itu otoritatif kalau keputusan itu muncul dari pengaturan pilihan kolektif yang membangun kondisi pemikiran publik yang bebas antara orang-orang sederajat yang akan diatur oleh keputusan tersebut. Partisipasi politik mengandaikan bahwa warga negara terlibat dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari proses pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Dalam konteks ini, keterlibatan aktif warga dalam seluruh proses politik merupakan sebuah keharusan.

Tetapi, kenyataan menunjukkan bahwa berpartisipasi dalam politik sangat bergantung pada pemahaman orang akan makna atau nilai yang diperoleh dari keterlibatan dalam aktivitas politik. Atau dengan kata lain, pemaknaan orang atas term politik menjadi kunci utama partisipasi dalam politik. Secara umum, ada dua interpretasi atas term politik yang bertentangan satu sama lain.¹ Tafsiran pertama melihat politik secara mendasar sebagai sebuah konflik karena politik berhubungan dengan kekuasaan, di mana sekelompok orang atau individu memegang kekuasaan yang berkecenderungan mendominasi sehingga menimbulkan perlawanan dari kelompok atau individu lainnya. Di sini, politik berperan mempertahankan hak-hak istimewa kelompok minoritas pemegang kekuasaan (elite politik). Sedangkan tafsiran kedua menganggap politik sebagai upaya menciptakan ketertiban dan keadilan, di mana kekuasaan ada untuk melindungi kesejahteraan bersama. Dalam konteks ini, politik hanyalah sarana untuk mengintegrasikan orang ke dalam negara dan untuk menciptakan sebuah negara ideal, seperti dibicarakan Plato dan Aristoteles.

Tafsiran pertama di atas mendominasi pemikiran modern, di mana term politik dipahami sebatas kekuasaan, regulasi, dan hukum. Karena itu dapatlah dimengerti kalau ketika mendengar kata politik, orang cenderung berpikir tentang siapa yang memutuskan apa yang seharusnya dilakukan negara, untuk berapa lama dan berapa biaya yang dibutuhkan. Dalam arti yang sempit ini, politik hanya menjadi milik kaum elit politik atau orang yang melaksanakan kekuasaan politik karena merekalah yang mendistribusikan dan melaksanakan kekuasaan politik atas nama negara. Sementara itu, sebagian besar masyarakat dianggap sebagai massa mengambang dan hanya diberi kesempatan untuk menggunakan hak politiknya sekali dalam empat atau lima tahun, dalam sebuah pemilihan umum. Konsekuensi logis dari pemahaman tentang politik seperti ini adalah bahwa warga negara pada umumnya cenderung menarik diri dari politik dan menjadi

¹ Maurice Duverger, *Sosiologi Politik*, penerj. Daniel Dhakidae, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 27

apatis dalam seluruh aktivitas politis. Fenomena meningkatnya golongan putih (golput) di mana orang dengan sadar tidak mau menggunakan hak pilihnya dalam pemilu di berbagai negara di dunia akhir-akhir ini merupakan salah satu bukti nyata keengganan warga untuk terlibat dalam segala sesuatu yang berurusan dengan politik. Warga negara berpendapat bahwa menggunakan hak pilih atau tidak, ternyata tidak ada nilainya atau tidak merubah nasib hidup mereka.

Fenomena modern ini tidak ditemukan pada zaman klasik karena pada umumnya politik dipahami dalam terang tafsiran kedua sebagai upaya menciptakan ketertiban dan keadilan. Pada zaman Yunani klasik, politik diasosiasikan dengan *polis* atau negara kota.² Politik berarti apa yang menjadi milik *polis*. Dalam pengertian ini, semua aktivitas yang berlangsung dalam *polis* dianggap politis. Politik berkaitan erat dengan semua aspek kehidupan manusia di sebuah negara-kota, *city-state*, atau *polis*. Di sini, seorang warga negara *polis* menghubungkan dirinya dengan warga negara lain, dengan komunitas di mana dia hidup, dan dengan pelaksanaan kekuasaan atas komunitas tersebut. Dalam konteks ini, partisipasi politik dipahami sebagai bagaimana warga negara mengambil bagian dalam aktivitas-aktivitas publik, seperti mengatur urusan komunitas, dan bagaimana pemerintahan seharusnya dibentuk dan kekuasaan politik dilaksanakan. Jadi jelas bahwa pemahaman klasik tentang term politik jauh lebih luas dibandingkan dengan pemahaman modern. Dalam terang pemikiran ini, tidak mungkin ada penarikan diri dari politik pada zaman Yunani klasik karena politik menunjuk pada semua aspek aktivitas manusia dalam *polis*. Seseorang tidak mungkin melarikan diri dari keterlibatan dalam politik dalam cara apapun juga. Atau, orang secara otomatis terlibat aktif dalam kegiatan politik.

Aristoteles merupakan salah seorang filsuf klasik yang begitu antusias mengembangkan dan mempromosikan ide politik dalam tulisan-tulisan etika dan politik karena keyakinannya bahwa politik memainkan peranan yang amat sentral dalam kehidupan bersama. Politik sebagai instrumen bagi warga masyarakat untuk berintegrasi dalam negara dan selanjutnya berpartisipasi di dalamnya. Aristoteles mengembangkan lebih lanjut ide Yunani klasik ini dengan menunjuk politik pada kehidupan *polis* sebagai suatu keseluruhan. Hal ini mengisyaratkan bahwa politik mencakupi bukan hanya apa yang secara khusus disebut aktivitas politis, tetapi juga semua area kehidupan sosial lainnya.

Atas dasar ini, partisipasi politik berarti mengambil bagian dalam kehidupan publik atau dalam kehidupan *polis* secara keseluruhan. Partisipasi politik dalam bentuk pemerintahan populer atau pemerintahan oleh rakyat telah menjadi sangat fundamental dalam sistem demokrasi Athena sebelum Aristoteles menulis bukunya *Politics*. Dalam kenyataan, secara umum diterima bahwa kebebasan merupakan ciri esensial demokrasi. Ciri khas demokrasi

² Richard Mulgan, "Aristotle and the Value of Political Participation," dalam *Political Theory*, Vol. 18, Mei 1990, hlm. 195

sebagai pemerintahan oleh rakyat dan hak yang sama bagi semua warga negara, diaplikasikan secara publik di Athena. Aristoteles tertarik dengan pandangan umum ini, tetapi dia juga sangat kritis dalam pengaplikasiannya. Aristoteles mengidentifikasi pemerintahan mayoritas dan kebebasan sebagai dua hal yang penting dari demokrasi atas dasar prinsip kesamaan.³ Prinsip kesamaan cocok dengan ide pemerintahan oleh rakyat. Satu aspek dari kebebasan adalah memimpin dan dipimpin secara bergiliran. Sekalipun demikian, prinsip keadilan menuntut bahwa mayoritas harus memerintah dan keputusan mayoritas harus dihormati karena memuat keadilan. “Karena jika kebebasan dan kesamaan, seperti dipikirkan orang ditemukan dalam demokrasi, maka keduanya akan lebih gampang diperoleh ketika semua orang mengambil bagian dalam pemerintahan.”⁴

Sekalipun Aristoteles mengkritik sistem demokrasi Athena, dia juga mengapresiasi hubungan antara warga negara individual dan demokrasi. Aristoteles mengadopsi ide yang diterima umum dan luas bahwa berpartisipasi dalam politik adalah sesuatu yang sentral dalam pengertian tentang warga negara dan kehidupan *polis*. Ide ini tampak dalam diskusi Aristoteles tentang pengertian warga negara dalam *Politics*, buku III, di mana dia mengobservasi bahwa seorang warga negara didefinisikan oleh haknya untuk berpartisipasi dalam fungsi yudisial dan jabatan-jabatan di kantor-kantor publik. Partisipasi sangat sentral dalam definisi Aristoteles tentang kewarganegaraan dan pemerintahan politis.

Berkaitan dengan partisipasi politik, muncul pertanyaan seputar peran atau makna partisipasi politik untuk mencapai kehidupan yang baik bagi warga *polis*. Entahkah partisipasi dalam politik dengan sendirinya membuat manusia bahagia, dan jika tidak, apakah warga negara hendaknya menarik diri dari politik? Karena partisipasi atau penarikan diri dari politik bergantung dari nilai yang diperoleh seseorang, apakah penting bagi seorang pribadi untuk berpartisipasi dalam politik untuk memperoleh kebahagiaan dan menghidupi kehidupan yang baik menurut Aristoteles? Apakah secara instrinsik bernilai dan esensial bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan *polis* demi mencapai perkembangan sempurna sebagai manusia?

Pandangan Aristoteles terhadap partisipasi politik sangat ambivalen. Di satu pihak, Aristoteles tampaknya mempromosikan partisipasi aktif warga negara karena keterlibatan orang dalam politik akan membantu orang tersebut untuk mencapai tujuan utama hidupnya yaitu kebahagiaan. Hal itu berarti bahwa partisipasi politik memainkan peran sentral untuk mencapai

³ R. K. Sinclair, *Democracy and Participation in Athens*, (Cambridge: Cambridge University Press), hlm. 20-23

⁴ Aristoteles, *Politics*, penerj. Benjamin Jowett, dalam *The Basic Works of Aristotle*, Richard KcKeon, (ed.), (New York: Random House, Inc., 1941). Dalam catatan kaki selanjutnya buku ini akan disingkat dengan P, dan pengutipan digunakan sistem penomoran baris, seperti P 1291 b 34-36

kebahagiaan. Argumen ini didasarkan pada dua klaim utama.⁵ *Pertama*, Aristoteles menggambarkan manusia sebagai *zoon politikon* atau makhluk politis. Manusia secara alamiah cocok bagi kehidupan *polis* dan dapat mengembangkan potensi secara penuh hanya dengan hidup dalam sebuah komunitas politis dan moral dengan yang lain. *Kedua*, Aristoteles mendefinisikan kewarganegaraan sebagai syering dalam kantor deliberatif dan yudisial. Hanya dengan menjadi anggota aktif dari sebuah *polis* yang terorganisir secara baik, manusia dapat menghidupi kehidupan yang penuh dan merealisasikan secara penuh segala potensinya. Dengan kata lain, karena manusia secara alamiah politis, mereka dapat memenuhi potensia alamiahnya dan menjadi bahagia hanya dengan menjadi anggota sebuah komunitas politis dan terlibat secara aktif di dalamnya. Lewat berpartisipasi dalam politik, manusia memanfaatkan kemampuan distingtifnya, yaitu akal budi dan berbicara.

Ide ini dipertegas oleh Hannah Arendt yang berargumen bahwa sebuah komunitas politis bukan hanya berbeda tetapi juga bertentangan dengan asosiasi natural, yang berpusat pada keluarga. Munculnya *polis* berarti bahwa manusia menerima bentuk kehidupan kedua, yang disebut kehidupan politis, yang berbeda dari kehidupan privat. Sebagai akibat, setiap warga negara memiliki dua bentuk eksistensi dan ada perbedaan antara apa yang menjadi menjadi milik pribadi dan milik bersama.⁶ Karena perbedaan ini, Arendt menegaskan kenyataan bahwa orang-orang Yunani klasik mengidentifikasi dan mengagung-agungkan wilayah politik, sfer publik, di mana orang bebas bertindak dan berinteraksi secara sama. Hal ini berbeda dengan wilayah privat, keluarga, sebuah wilayah di mana orang bertindak karena keharusan alamiah untuk memenuhi kebutuhannya. Dari sudut pandang ini, partisipasi dalam sfer publik dianggap sesuatu yang esensial bagi manusia untuk menjadi sempurna dan bahagia. Sebagai akibat, dari sudut pandang demokratis, Aristoteles dianggap mempromosikan partisipasi dalam politik atau dalam kehidupan *polis* secara keseluruhan.

Di lain pihak, dalam tulisan-tulisan etikanya Aristoteles kelihatan mendukung ide penarikan diri dari politik atau bersikap hati-hati dalam berpartisipasi. Ketika membandingkan kegiatan filosofis dengan ciri khasnya kontemplasi dan kegiatan politik, Aristoteles berkesimpulan bahwa kontemplasi bernilai lebih luhur ketimbang politik karena kontemplasi bersifat ilahi, mandiri, dan mengandaikan adanya banyak waktu luang. Aristoteles tampaknya yakin bahwa pencaharian filosofis membentuk kehidupan sempurna bagi manusia, kehidupan yang khas sesuai dengan kodratnya sebagai makhluk rasional. Hal itu berarti bahwa kehidupan seorang filsuf lebih bernilai daripada kehidupan seorang politikus atau negarawan.

⁵ Hannah Arendt, *The Human Condition*, (Chicago: The University of Chicago Press, 1958), hlm. 22

⁶ *Ibid.*, hlm, 24

Bertolak dari indikasi-indikasi ini, Vander Waerdt menginterpretasikan bahwa menurut Aristoteles, warga negara yang baik akan menghindari segala kegiatan termasuk politik yang tidak memberikan kesempatan untuk rileks. Aktivitas seperti itu mengurangi kebahagiaan.⁷ Inilah pendasaran dari interpretasi politik aristokratis, di mana Aristoteles dianggap mengamalkan pandangan politiknya untuk beberapa orang aristokrat Athena karena mereka telah mendapat pengajaran politis. Leo Strauss, misalnya, mempertahankan ide ini dengan beragumen bahwa manusia secara alamiah digerakkan ke arah kehidupan politis karena memiliki kecenderungan ke arah kebahagiaan. Tetapi, kodrat manusia diperbudak dalam berbagai macam cara sehingga hanya segelintir orang yang dapat mencapai kebahagiaan atau kebebasan tertinggi yang dapat diperoleh manusia.⁸ Interpretasi aristokratis ini didukung oleh kenyataan bahwa Aristoteles menegaskan pentingnya kebajikan dan keutamaan dalam diskusinya tentang penguasa terbaik. Karena itu, konsep Aristoteles tentang partisipasi politik hanya dibatasi pada negarawan.⁹

Ambivalensi yang dijelaskan di atas mengindikasikan bahwa Aristoteles mengadvokasi partisipasi dalam politik sekaligus penarikan diri dari politik. Dalam tulisan ini, penulis mau menunjukkan bahwa ambivalensi tidak boleh diinterpretasikan sebagai upaya Aristoteles untuk mempromosikan secara ekstrim salah satunya, entah partisipasi atau penarikan diri dari politik. Kedua interpretasi ini mengandung kebenaran dalam konteksnya masing-masing, tetapi tidak berarti bahwa Aristoteles menolak sama sekali kehidupan politik ataupun secara ikhlas mempromosikan partisipasi politik sebagai sesuatu yang fundamental untuk mencapai kebahagiaan.¹⁰ Sekalipun *polis* ideal menuntut adanya orang-orang terbaik menjadi warga negaranya, orang-orang terbaik tidak dengan sendirinya diwajibkan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, tetapi secara teoretis, orang-orang terbaik diajak untuk ada dalam pemerintahan, jika negara membutuhkan mereka dan mereka harus dengan senang hati dan bebas menerima itu sebagai tugas sosialnya. Lebih lanjut, ketika orang-orang terbaik tersebut kehilangan jabatan atau kekuasaannya karena adanya ketidakadilan, tidak akan ada kekecewaan karena mereka tetap menjadi orang-orang terbaik.

Bertolak dari pemahaman ini, tesis bahwa Aristoteles tidak mempromosikan partisipasi dalam politik atau penarikan diri dari politik, menjadi fokus utama dalam tulisan ini. Untuk maksud ini, penulis akan membagi tulisan ini atas empat bab, antara lain: *Pertama*, beberapa catatan awal. Di sini akan diuraikan konteks hidup, seperti riwayat hidup, periode-periode dalam

⁷ P. A. Vander Waerdt, "Kingship and Philosophy in Aristotle's Best Regime," *Phronesis*, Vol. XXX/3, (1985), hlm. 252

⁸ Leo Strauss, *The City and Man*, (Chicago: Rand McNally Company, 1964), hlm. 42

⁹ *Ibid.*, hlm. 37-38

¹⁰ Richard Mulgan, *Op. Cit.*, hlm. 195

hidup dan perkenalannya dengan beberapa figur penting yang turut mempengaruhi teori politik Aristoteles entah secara langsung ataupun tidak langsung. Hal ini dikemukakan dengan keyakinan bahwa figur-figur penting dan kejadian-kejadian historis sangat mempengaruhi teori politik seseorang dan pengetahuan kita akan diperkaya dengan menganalisis konteks historis tersebut. Sesudah itu akan dijelaskan beberapa doktrin dasar seperti teleologi dan jalan tengah yang digunakan oleh Aristoteles dalam seluruh tulisan etika dan politiknya, teori dan praktis untuk memahami relasi antara etika dan politik.

Kedua, konsep hidup yang baik. Penulis berusaha sedapat mungkin untuk mempresentasikan ide-ide etika Aristoteles secara mendetail seperti termuat dalam *Nicomachean Ethics*. Dua tema utama yang akan diuraikan di sini adalah kebaikan bagi manusia dan kebajikan untuk menjawab pertanyaan tentang model hidup baik yang diinginkan manusia yaitu kebahagiaan. Uraian ini dimaksudkan untuk memahami secara komprehensif penilaian Aristoteles bahwa aktivitas politik lebih rendah kalau dibandingkan dengan aktivitas berpikir atau berkontemplasi. Ketika membandingkan aktivitas berpikir dan berpolitik, Aristoteles berkesimpulan bahwa aktivitas berpikir jauh lebih mendukung usaha pencapaian kebahagiaan, yang merupakan tujuan hidup manusia itu sendiri ketimbang aktivitas berpolitik.

Ketiga, partisipasi politik. Dalam bab ini penulis akan memfokuskan diri pada konsep Aristoteles tentang komunitas politik, pengertian kewarganegaraan, dan konstitusi seperti dideskripsikan Aristoteles dalam bukunya *Politics*. Penekanan utama di sini adalah konsep Aristoteles tentang keharusan warga negara untuk berpartisipasi dalam seluruh aktivitas hidup *polis*. Aristoteles berpendapat bahwa setiap warga negara secara otomatis berpartisipasi dalam kehidupan publik (*polis*) karena manusia adalah makhluk politik.

Keempat, nilai partisipasi politik. Setelah uraian secara detail tentang konsep hidup baik dan partisipasi politik, tampak dengan jelas ambivalensi sikap Aristoteles antara mempromosikan partisipasi politik atau penarikan diri dari politik. Persoalan ini akan dijawab dengan melihat perbandingan antara aktivitas berpikir dan berpolitik. Kemudian akan diketengahkan beberapa makna atau nilai dari partisipasi politik, dan pada bagian akhir akan diketengahkan catatan kritis yang sekaligus merupakan relevansi ide Aristoteles dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia saat ini.

BAB I

BEBERAPA CATATAN AWAL

Aristoteles adalah salah seorang pemikir dan filsuf klasik yang sangat brilian. Karena itu tidaklah mengherankan kalau sekalipun hidup pada zaman klasik, nama Aristoteles tetap familiar untuk orang-orang modern dan ide-idenya selalu menjadi acuan para pemikir dan filsuf sampai saat ini. Banyak kontribusi intelektualnya yang tidak bisa diabaikan oleh para pemikir dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda-beda, seperti filsafat, teologi, ilmu-ilmu alam dan fisika, retorika, seni, etika, dan politik.

Aristoteles meninggalkan kesan yang sangat kuat pada teologi sehingga banyak formulasi iman gereja tidak mungkin dipahami kalau orang tidak mengenal konsepnya tentang kosmos atau alam semesta. Orang yang tertarik dengan ilmu-ilmu pengetahuan modern, akan dengan sendirinya menemukan bahwa beberapa teori pengetahuan Aristoteles sangat penting untuk memahami penulis-penulis modern seperti Bacon dan Galileo, yang merumuskan pandangan ilmiah modern tentang alam. Berkaitan dengan literatur-literatur puitis, buku Dante dan banyak bagian dari Shakespeare tidak bermakna kalau orang tidak terbiasa dengan garis besar filsafat Aristoteles. Dalam bahasa sehari-hari, istilah-istilah seperti jangin tengah (*golden mean*), pendidikan liberal (*liberal education*), pertentangan antara materi (*matter*) dan bentuk (*form*), antara esensi dan aksiden, teori dan praktek, etika teleologis, kebajikan, dan *polis* merupakan perbendaharaan kata yang berasal dari Aristoteles.¹¹

Tetapi, kecermelangan teori seorang pemikir atau filsuf tidak terlepas dari konteks historis yang dihidupinya. Pemikirannya merupakan hasil refleksi dan kritik atas situasi konkret tertentu. Diakui bahwa sebuah teori, betapa pun bagus dan validnya, sebagiannya berbicara tentang apa yang terjadi pada momen dan tempat tertentu. Karena itu, riwayat hidup, kepribadian, dan figur-figur tertentu sangat penting untuk ditelaah agar membantu kita memahami siapa sesungguhnya Aristoteles dan bagaimana caranya dia memahami etika dan politik dalam keseluruhan karya filosofisnya. Sementara itu, doktrin-doktrin tertentu—entah yang diciptakan sendiri ataupun diadopsi dari orang atau kelompok masyarakat tertentu selalu dijadikan dasar dalam membaca, merefleksikan, dan mengkritik suatu fakta ataupun dalam mengemukakan teori tertentu. Dalam terang pemikiran ini, untuk mengapresiasi secara tepat konsep dan penilaian Aristoteles atas partisipasi politik, berikut ini akan dijelaskan dua hal, sebagai catatan awal, yaitu konteks historis dan beberapa doktrin filosofis Aristoteles.

¹¹ A. E. Taylor, *Aristotle*, (New York: Dover Publications, Inc., 1955), hlm. 5-6

1.1. KONTEKS HISTORIS

1.1.1. Riwayat Hidup

Data-data kronologis tentang periode hidup Aristoteles yang dikemukakan di sini tidaklah memiliki ketepatan matematis karena tidak adanya otobiografi yang ditulisnya sendiri, data yang sangat minim dari pengikut-pengikutnya, dan juga karena belum berkembangnya ilmu pengetahuan pada umumnya dan sejarah, khususnya. Walaupun demikian, keabsahan Aristoteles sebagai manusia yang pernah hidup dalam sejarah umat manusia tidak bisa diragukan.

Aristoteles dilahirkan tahun 385 b.c. di Stagira, dekat Makedonia. Dia dibesarkan dalam lingkungan kerajaan karena ayahnya Nichomachus adalah seorang dokter pribadi raja Amyntas III dari kerajaan Makedonia.¹² Masa kecilnya dilewati bersama kedua orangtuanya sehingga pendidikan dasarnya ditangani langsung oleh orangtuanya. Sesuai dengan profesi bapanya, Aristoteles diajarkan banyak hal tentang kedokteran. Ada dua versi berbeda tentang masa remajanya. Versi pertama mengatakan bahwa Aristoteles mengisi masa remajanya dengan belajar di bawah bimbingan Plato, sedangkan versi kedua mengatakan bahwa Aristoteles menghamburkan harta warisan orangtua dengan hidup berfoya-foya dan kemudian masuk tentara.¹³ Pada umumnya diterima versi pertama.

Pada umur 17 tahun, Aristoteles pindah ke Athena, Yunani, untuk bergabung dengan sekolah *Academy* yang didirikan dan dipimpin oleh Plato. Dia menjadi murid Plato selama kurang lebih 20 tahun, sampai pada wafatnya Plato tahun 348 b.c.. Di sini dia belajar banyak hal seperti matematika, politik, etika, hukum, dan retorika. Salah satu kegemarannya, yang membantunya kemudian sebagai pemikir dan penulis hebat, adalah mengoleksi dan membaca buku-buku. Di samping itu, dia juga berkembang menjadi pribadi yang sangat kritis. Aristoteles tidak segan-segan melontarkan kritik terhadap Plato, gurunya yang pada waktu itu sangat disegani oleh murid-muridnya. Karena kekritisannya, Aristoteles sering berbeda pendapat dengan Plato. Plato sendiri berusaha menarik simpati muridnya dengan melontarkan gagasan-gagasan brilian, sedangkan Aristoteles berusaha keluar dari bayang-bayang kebesaran Plato dengan membentuk gagasan-gagasannya sendiri. Sekalipun demikian, pengaruh Plato atas perkembangan diri dan pemikiran Aristoteles tidak bisa dinafikan. Aristoteles sendiri memuji dan mengagumi Plato sebagai peletak dasar kemandiriannya.¹⁴

¹² Richard Kraut, *Aristotle: Political Philosophy*, (Oxford: Univeristy Press, 2002), p.7

¹³ J. H. Rapar, *Filsafat Politik Arisoteles*, (Jakarta: Rajawali Press, 1988), hlm. 1-2

¹⁴ Frederick Copleston, *A History of Philosophy*, (New York: A Division of Doubleday, Inc., 1962), hlm. 9-10

Setelah Plato meninggal, Aristoteles meninggalkan Athena dan pergi ke Assus, salah satu kota kecil di Asia kecil bersama teman kelasnya, Xenocrates. Di Assus, keduanya mengajar pada Akademi baru, yang didirikan Erastos dan Koriskos. Kedatangan keduanya disambut hangat karena mereka dapat membawa angin segar bagi keberlangsungan Akademi tersebut. Karena jasanya yang besar untuk Akademi, maka Aristoteles direstui untuk menikahi kewanitaan raja Hermias, yang bernama Pythias. Tiga tahun kemudian, dia pergi ke Mytilene dan berkenalan dengan Theophrastus seorang warga pribumi yang kemudian menjadi muridnya yang termashur. Selama di Assus dan Mytilene, Aristoteles mulai gencar mengembangkan gagasan-gagasan filosofisnya yang sungguh-sungguh otentik dan independen dari filsafat Plato.

Pada tahun 343 b.c. Aristoteles diundang raja Philip ke istana Pella, kerajaan Makedonia untuk menjadi tutor pribadi putra raja, Alexander yang pada waktu itu berumur 13 tahun. Latarbelakang pendidikan dan kebudayaan Yunani diajarkan kepada Alexander yang terkenal liar dan morat-marit hidupnya. Selama kurang lebih dua tahun Aristoteles berhasil membentuk seorang pribadi matang dalam diri Alexander, yang kemudian menjadi raja terkenal Makedonia. Dia berhasil memperluas kerajaan dengan menaklukkan wilayah-wilayah sekitar, termasuk Yunani. Karena keberhasilannya itu dia dikenal dengan sebutan Alexander Agung. Setelah selesai melaksanakan tugas luhurnya itu, Aristoteles kembali ke Stageira dan menetap di sana selama satu tahun.

Tahun 335 b.c., Aristoteles kembali lagi ke Athena. Situasi Athena sangat kondusif pada waktu itu sehingga dia merealisasikan cita-citanya untuk mendirikan sebuah sekolah baru yang dikenal dengan nama *Lyceum*. Sekolah tersebut didirikan di halaman kuil dewa Apollo. Popularitas Aristoteles dan sekolahnya merebut hati publik dalam waktu singkat dan mengalahkan Isocrates dan *Academy* Plato yang dipimpin Xenocrates. Tetapi, pada tahun 323 b.c., terjadi pergolakan politik di Athena karena kematian Alexander Agung. Muncul reaksi keras dari rakyat Athena melawan orang Makedonia yang telah menjajah mereka di bawah kepemimpinan Alexander Agung. Orang Athena mau membebaskan diri dari penindasan Makedonia. Aristoteles yang sangat akrab dengan Alexander Agung menjadi sasaran pengejaran, tetapi dia berhasil melarikan diri ke Khalkis dan menyerahkan kepemimpinan *Lyceum* kepada muridnya Theophrastus. Di tempat pembuangan ini Aristoteles jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia pada tahun 322 sebelum masehi.

1.1.2. Periode Penting Hidup dan Karya Aristoteles

Dilahirkan dalam keluarga terdidik dan kaya, Aristoteles terkondisi dan terinspirasi sejak kecil untuk mengembangkan minat-minat ilmiahnya demi meneruskan tradisi keluarganya. Pada awalnya dia memfokuskan diri pada penelitian yang berkaitan dengan alam semesta, secara

khusus tentang makhluk hidup. Dia belajar biologi dan kedokteran. Minatnya kemudian meluas ke bidang-bidang lain seperti metafisika, epistemologi, logika, etika, dan politik. Ketika berdiskusi tentang etika dan politik, Aristoteles mengaplikasikan begitu banyak konsep dasar biologi dan kedokteran. Misalnya, dalam bukunya *Politics*, Bab IV-VI, Aristoteles mengklasifikasikan konstitusi seperti seorang biologis mengklasifikasikan jenis makhluk hidup sesuai dengan struktur dan susunan bagian-bagian. Lebih lanjut, seperti seorang dokter memberikan resep untuk menyembuhkan penyakit, dia menganjurkan metode perbaikan atau pembaharuan untuk konstitusi yang tidak sempurna atau menyeleweng.¹⁵

Ada tiga tahap penting yang patut diketahui untuk memahami secara komprehensif teori politik Aristoteles. Tahap *Pertama*, ketika Aristoteles menjadi murid Plato di *Academy*. Pada masa ini Aristoteles mulai menulis beberapa buku, seperti *De Anima III*, *Physics I, II, VII*, *Politics II, III*, dan *De Caelo I*.¹⁶ Semua karya ini merupakan ungkapan kecintaannya pada karya-karya filosofis Plato dan ditulis dalam bentuk dialog, surat, dan karya ilmiah. Karena itu, tidaklah mengherankan kalau ide-ide yang dituliskannya masih sangat kuat dipengaruhi oleh ide Plato. Satu hal yang perlu diingat juga bahwa ketertarikan Aristoteles terhadap politik muncul pada masa-masa ini karena pada waktu itu, *Academy* sebagai sebuah lembaga penelitian ilmiah sangat berorientasi praksis, dan bukan saja teoretis. Filsafat tidak saja dilihat sebagai ilmu teoretis tetapi sebagai suatu cara hidup sehingga setiap penelitian filosofis harus bertujuan untuk mendidik dan menuntun orang untuk menghidupi hidup mereka di bawah bimbingan hukum dan peraturan negara.

Salah satu hal yang menonjol adalah peran seorang negarawan. Sekalipun Plato sendiri tidak berdiskusi tentang ide sebuah negara, tetapi dia sering berbicara tentang negarawan ideal. Menurut Plato, negarawan ideal superior dari hukum. Plato menggunakan analogi seorang dokter untuk menjelaskan relasi antara negarawan ideal dan hukum.¹⁷ Seorang dokter hanya memberikan resep atau kiat-kiat yang harus dipatuhi demi kesembuhan pasiennya. Orang-orang dekat pasien seperti anggota keluarga atau teman-teman akrabnya harus mempelajari, mematuhi, dan menerapkan resep yang diberikan oleh dokter, sementara dokter sendiri tidak terikat atau diwajibkan untuk menaati resep tersebut. Dokter bisa menggantikan resep kalau resep pertama tidak efektif atau tidak membawa perubahan signifikan pada kesehatan pasien.

Demikian juga halnya dengan seorang negarawan ideal. Karena seorang negarawan tidak bisa menghadiri dan menyelesaikan semua urusan negara, dia hanya menetapkan peraturan atau hukum yang harus ditaati oleh orang-orang yang mampu menginterpretasi dan mengaplikasikan

¹⁵ Ernest Barker, *The Politics of Aristotle*, (Oxford: Oxford University Press, 1958), p. xi

¹⁶ K. Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani*, (Yogyakarta: Kanisius, 1975), hlm. 133

¹⁷ Plato, *Republic*, penerj. G.M.A. Grube, (Indianapolis: Hackett Publishing Company, Inc., 1992), 295 C

peraturan tersebut. Dia berhak menggantinya sesuai dengan kondisi negaranya. Seorang negarawan ideal tidak bisa dipersalahkan kalau ada ketidakadilan hukum dalam kasus-kasus tertentu karena mereka hanya menetapkan peraturan tersebut. Para pelaksanalah yang harus bertanggungjawab kalau ada penyelewengan. Sekalipun negarawan ideal superior dari hukum buaatannya sendiri, Plato menegaskan bahwa harus ada kriteria standar dalam penetapan hukum. Kriteria satu-satunya adalah ide tentang keadilan dan kebaikan. Hukum yang disusun haruslah memenuhi kriteria keadilan dan kebaikan. Karena itu seorang negarawan haruslah seorang yang memahami apa itu kebaikan dan keadilan agar bisa menetapkan hukum yang baik dan adil.

Pengertian negarawan ideal ini sangat mempengaruhi konsep Aristoteles tentang pembuat hukum (*lawgiver*) dan negarawan yang sungguh-sungguh (*serious statesman*), sekalipun Aristoteles menolak teori Plato tentang idea. Dibandingkan dengan Plato yang idealis, karena seorang negarawan ideal harus selalu mengorientasikan dirinya pada konsep tentang keadilan dan kebaikan, Aristoteles lebih realis dalam arti bahwa kriteria standar pembuat hukum dan negarawan ideal hendaknya berasal dari *nature*.¹⁸ *Nature*-lah yang memungkinkan adanya pergerakan di alam semesta dan pertumbuhan makhluk hidup.

Berkaitan dengan manusia, secara alamiah, fisik manusia bertumbuh dan berfungsi. Kalau ada penyakit, ada proses alamiah untuk menjadi normal kembali. Karena itu, tugas seorang dokter ialah mempelajari sifat-sifat alamiah dan segala manifestasinya, entah dalam diri tubuh manusia sendiri atau dalam alam sekitarnya untuk mendukung usahanya untuk menyembuhkan badan. Aristoteles berasumsi bahwa “*nature aims at something, namely, perfect health, a perfect harmony and functioning of the body which is but scarcely, if ever, realized.*”¹⁹ Seorang negarawan ideal harus melewati proses alamiah tetapi sering kali juga merupakan produk alamiah yang begitu langka.

Karena itu Plato dan Aristoteles mengklaim bahwa negarawan ideal sangat jarang ditemukan dalam sebuah negara. Aristoteles bahkan mengidentikkan negarawan ideal dengan orang yang menyerupai yang ilahi (*godlike*). Ketika berdiskusi tentang agen moral, dia mengklasifikasikan manusia atas empat kategori, yaitu orang bajik (*virtuous agen*), orang yang mampu mengontrol diri (*continent agent*), orang lemah (*weak agent*), dan orang jahat (*vicious agent*). Dalam kasus-kasus yang istimewa dan luar biasa ada juga orang yang dikenal dengan orang yang sangat

¹⁸ K. von Fritz and E. Kapp, “Development of Aristotle’s Political Philosophy,” dalam Jonathan Barnes, cs., (eds.), *Articles on Aristotles Ethics and Politics*, (London: Gerard Duck Worth & Company Lmt., 1977), 116

¹⁹ *Ibid.*, 116

sempurna, menyerupai yang ilahi (*godlike*) dan juga orang-orang kasar dan tidak bermanusiawi (*brutish*).²⁰ Negrawan ideal identik dengan *godlike* yang sangat jarang ditemukan.

Tahap *kedua* yaitu ketika Aristoteles pindah ke Assus, Asia kecil setelah wafatnya Plato. Dalam periode ini, Aristoteles menulis beberapa karya—semuanya dalam bentuk diskusi ilmiah—seperti *On Philosophy, Ethica Eudaimonia, Methaphysics, Politics VII, VIII, De Caelo II, III, IV, Physics III, IV, V, VI, dan De Generatione et Corruptione*.²¹ Dalam karya-karya ini tampak dengan jelas kenyataan bahwa Aristoteles berbalik dari ide Plato dan membentuk idenya sendiri. Misalnya, dia mengeritik Plato yang memisahkan forma dan materi. Menurutnya, forma dan materi harus ada bersama. Kita tidak dapat memahami forma tanpa materi dan sebaliknya. Karya-karya ditulisnya dalam bentuk diskusi ilmiah.

Di Assus inilah Aristoteles bertemu dengan Hermias, seorang bekas budak dan kemudian menjadi seorang yang kaya raya. Melalui Hermias, Aristoteles berkenalan dengan Philip, raja Makedonia, dan kemudian menjadi tutor pribadi Alexander, anak raja Philip yang bakal berkuasa atas seluruh Makedonia. Sangat sulit menemukan pengaruh dari asosiasi dengan Alexander terhadap pemikiran politik dan etika Aristoteles, tetapi dalam *Politics VI*, kita bisa melihat bagaimana Aristoteles menentang segala macam bentuk kosmopolisme yang dimulai oleh Alexander dengan menyatukan seluruh kota di Makedonia di bawah satu sistem politik dan menjadikan dirinya sebagai penguasa tunggal.

Menurut Aristoteles, kosmopolisme menghancurkan diversitas. Suatu sistem politik hanya cocok untuk kota-kota tertentu saja dan karena itu tidak boleh diberlakukan secara merata dan sama di semua kota. Kalaupun Yunani harus disatukan dibawah sebuah sistem politik, hendaknya semua kota diberi hak dan kebebasan untuk mengurus dirinya sendiri sesuai dengan situasi dan kondisi kota tersebut. Sebuah kota yang sempurna haruslah diatur oleh semua warga negara yang berstatus sama dan sederajat dan juga kecil dalam ukuran sehingga bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Ketika berdiskusi tentang negara-kota ideal, Aristoteles menegaskan: “*Polis* hendaklah kecil dan merupakan suatu komunitas intim. *Polis* sama seperti gereja; tidak ada perbedaan antara negara dan komunitas. Atau dengan kata lain, *polis* merupakan sebuah sistem etika sosial yang terintegrasi untuk merealisasikan secara penuh kemampuan anggota-anggotanya dan karena itu *polis* bisa menuntut kesetiaan penuh anggota-anggotanya.”²²

²⁰ Aristotle, *Nicomachean Ethics*, trans. W.D. Ross, in Richard McKeon, *The Basic Works of Aristotle*, (New York: Random House, 1941). Dalam catatan kaki selanjutnya buku *Nicomachean Ethics* akan disingkat dengan NE dan pengutipan akan digunakan sistem penomoran baris. NE 1145 a 20-34

²¹ K. Bertens, *Loc. Cit.*

²² Ernest Barker, *Op. Cit.* xlvii

Tahap terakhir yaitu ketika Aristoteles menjadi pemimpin *Lyceum* di Athena. Pada masa ini Aristoteles menulis karya tentang hampir semua disiplin ilmu pengetahuan yang berkembang pada waktu itu. Penelitiannya berkaitan dengan semua aspek makhluk hidup dan tak hidup. Ada lima disiplin ilmu yang digeluti Aristoteles. Dia menyelesaikan hampir semua karya yang telah mulai ditulis sebelumnya.²³ *Pertama*, karya logika, seperti *The Categories*, *De Interpretatione*, *The Prior Analytics*, *The Posterior Analytics*, *The Topics*, *The Sophistical Refutations*. *Kedua*, karya metafisika, seperti *The Metaphysics*. *Ketiga*, karya filsafat alam, seperti *The Physics*, *De Caelo*, *De Generatione et Corruptione*, *Meteorologica*, *The Histories of Animals*, *Parva Naturalia*, *The Anima*. *Keempat*, karya etika dan politik, seperti *Ethica Eudaimonia*, *Nicomachean Ethics*, *Politics*, serta beberapa koleksi tentang konstitusi polis. *Kelima*, karya estetika, sejarah, dan sastra, seperti *The Rhetoric*, *The Poetics*.

Pada waktu di Athena untuk kedua kalinya, Aristoteles berkenalan dengan Antipater, orang yang diberi kepercayaan oleh raja Alexander untuk menjadi penguasa di Athena. Antipater menjadi teman akrab Aristoteles. Karena keakraban tersebut *Lyceum* di lindungi penguasa kolonias, Antipater. Tetapi justru karena relasi seperti itu, Aristoteles dan sekolahnya *Lyceum* dituduh mendukung dan mempromosikan kebijaksanaan Antipater serta mengkhianati semangat hidup orang-orang Athena. Aristoteles dikucilkan negarawan lokal seperti Lycurgus yang berusaha memperbaharui kota Athena. Sekalipun merasa dikucilkan, secara diam-diam Aristoteles tertarik dengan ide Lycurgus tentang kenegarawanan, di mana seorang negarawan hendaknya berasal dari kelompok kelas menengah. Inilah konsep yang kemudian dikembangkan oleh Aristoteles dalam konstitusi *polity* atau *politeia*, di mana sebuah negara kota ideal harus diperintah oleh kelas menengah karena mereka memiliki kekayaan yang secukupnya dan kemampuan untuk membangun militer yang kuat untuk mempertahankan negara.

1.1.3. Kepribadian dan Metode Penelitian

Salah satu elemen kunci yang mempengaruhi pemikiran brilian Aristoteles adalah kepribadiannya sendiri yang selalu terbuka terhadap realitas sekitarnya. Justin D. Kaplan, seperti dikutip J. H. Rapar, memaparkan keunikan kepribadian Aristoteles dalam perbandingannya dengan gurunya, Plato sebagai berikut:

Bagi banyak orang, Plato menunjukkan diri sebagai seorang yang antusias, dengan imajinasi yang begitu membumbung tinggi, sedangkan Aristoteles melambangkan penelitian yang menjemukan dan terikat pada bumi. Plato nampak bersemangat dan sanggup membangkitkan gairah, sedangkan Aristoteles nampak terikat pada suatu sistem yang tidak luwes dan logika yang ruwet serta kaku. Yang satu adalah seorang pembaharu, nabi, dan artis, yang lainnya seorang penyusun, pengamat, dan organisator. Plato nampak melukiskan kemuliaan tertinggi

²³ K. Bertens, *Op, Cit.*, hlm. 134

dari pikiran dan aspirasi; Aristoteles kelihatannya puas menerima dan bekerja dalam batasan-batasan hari ke hari dari perilaku manusia....²⁴

Perbedaan psikologis ini mempengaruhi gaya penulisan masing-masing. Plato adalah seorang idealis. Dia mengagung-agungkan peranan pikiran dan akal budi manusia. Hal ini dapat dilihat dari doktrinya tentang idea. Menurutnya, idea adalah esensi-esensi yang tak berubah, abadi, dan immaterial. Plato menekankan dominasi idea atas pancaindera, khususnya dalam proses untuk mengetahui sesuatu (pengetahuan). Manusia dapat mengetahui suatu obyek eksternal karena peranan akal budi semata-mata.²⁵ Sedangkan Aristoteles adalah seorang realis, yang mendasari teori pengetahuannya pada situasi kongkret. Alam dunia yang kelihatan sangat menentukan pengetahuan seseorang. Untuk itu peranan pancaindera sangat dihargai. Menurutnya, pengetahuan manusia berasal dari indera tetapi tidak ditentukan olehnya. Manusia dalam keterbatasannya harus puas menerima keadaannya sebagai yang terbaik. Idealisme ditolakny.

Di samping itu, Plato mengutamakan kerapihan, keindahan gaya bahasa dan alur cerita yang menarik serta teratur, dan kurang memperhatikan keadaan pembacanya, entah apa yang disampaikannya berguna untuk pembaca atau tidak. Dia berusaha menampilkan gagasannya dengan alur pikiran yang jelas, terarah, tetapi abstrak dan mendalam. Sebaliknya dengan Aristoteles. Dia memperhatikan aspek praktisnya. Situasi pembaca menjadi titik tolak penulisan idenya. Yang lebih diutamakannya adalah agar orang dapat menangkap dan memahami secara langsung maksud atau arti yang tertera dalam tulisannya itu.

Aristoteles adalah tipe orang yang terbuka pikirannya yang mengantar dia untuk menggunakan metode penelitian yang fleksibel. Walaupun demikian, dia tetap mempertahankan metodenya sendiri di mana dia mulai dengan menengahkan topik-topik kontroversial dan pendapat-pendapat orang, lalu menganalisis persoalan yang ditemukan dengan mengemukakan bukti-bukti baru sementara mempertahankan ide-ide baik yang dianalisis. Inilah yang disebut “pendekatan aporetik”.²⁶ Dia menghargai sangat tinggi fakta-fakta yang ada dan pendapat-

²⁴ J. H. Rapar, *Op. Cit.*, hlm. 7-8

²⁵ Dalam alegori gua, kondisi manusia seperti berada dalam gua bawah tanah yang luas dengan satu pintu kecil masuknya sinar. Manusia dibelenggu sejak kecil sehingga mereka tidak bisa membalikkan kepala dan mengubah posisi sehingga mereka hanya dapat melihat apa yang ada di depan mereka. Untuk bisa melihat cahaya mereka harus dibebaskan dulu dari belenggu. Demikian halnya dengan upaya untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Plato menegaskan bahwa pengetahuan yang benar menuntut seseorang untuk membalikkan dirinya seratus persen dan menghancurkan ikatan insting dan pancaindera yang membelenggunya. sehingga tidak bisa membalikkan kepala atau mengubah posisi sehingga mereka hanya dapat melihat apa yang ada di depan mereka. Bdk. John H. Hallowel dan Jene M. Porter, *Political Philosophy: The Search for Humanity and Order*, (Ontario: Prentice Hall Canada Inc., 1997), hlm. 33

²⁶ Aporetik adalah bentuk tunggal dari kata jamak *aporiai*, yang dalam bahasa Yunani berarti, bingung, pertanyaan untuk diskusi, situasi kebingungan. Metode atau pendekatan aporetik—mengangkat persoalan-persoalan yang membingungkan tanpa menawarkan solusi merupakan tipe khas dalam dialog-dialog Plato, di mana tokoh utama

pendapat orang. Aristoteles mengatakan bahwa kita tidak pernah boleh melupakan pengalaman yang sudah ada bertahun-tahun lamanya.²⁷ Apa yang baik, yang bertahan hidup dalam sejarah dan ditemukan oleh pendahulu-pendahulu perlu diapresiasi dan dijadikan patokan untuk mencari suatu kebenaran yang lebih sempurna. Karena itu, Aristoteles sering mengeritik gurunya Plato karena Plato menganggap rendah tradisi dan mengubah tradisi yang ada. Aristoteles menegaskan bahwa kita hendaknya memberikan penghargaan terhadap masa lampau dan semua yang ada di dalamnya.

Bertolak dari kenyataan ini, bisa dikatakan bahwa Aristoteles menggunakan metode dialektika,²⁸ dalam arti penelitian dimulai dengan pendapat umum (*common opinion/endoxa*) yang bisa merupakan pendapat orang banyak atau pendapat orang-orang bijaksana. *Common opinion* diterima dan diakui karena memiliki kebenaran parsial. Dengan menggunakan kebenaran parsial ini seseorang bisa memulai untuk menginvestigasi kebenaran yang komplis lewat proses bertanya atau mengangkat persoalan-persoalan yang ditemukan dalam pendapat-pendapat itu, membanding-bandingkan pendapat-pendapat tersebut dengan pandangan orang lain dan akhirnya menemukan jawaban yang benar dan tepat. Misalnya, pada bagian akhir *Nicomachean Ethics*, ketika berdiskusi tentang konstitusi, Aristoteles mengakui bahwa Plato meninggalkan persoalan legislasi yang tidak diteliti dan karena itu perlu ditinjau kembali. Hanya dengan menguji berbagai macam konstitusi yang ada, seseorang dapat memutuskan konstitusi mana yang cocok dan terbaik untuk sebuah *polis*.²⁹

1.2. DOKTRIN-DOKTRIN FILOSOFIS

1.2.1. Teleologi

Salah satu pengertian yang paling banyak ditemukan dalam tulisan-tulisan Aristoteles adalah teleologi yang berarti “*determined to an an end*”³⁰ (ditentukan ke arah sebuah tujuan). Istilah teleologi berasal dari kata Yunani *telos*, yang berarti tujuan atau maksud dan *logos* yang

Socrates melibatkan lawan bicaranya untuk mengetes sebuah definisi atau konsep yang sering diakhiri dengan persoalan baru. Dalam dialektika Aristoteles, *aporiai* ditemukan dalam pandangan-pandangan yang diterima dan diyakini secara umum. Bdk. Robert Audi (ed.), *The Cambridge Dictionary of Philosophy*, edisi kedua, (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), hlm. 34

²⁷ P 1264 a 1-5

²⁸Term dialektika berasal dari kata Yunani, *dialegein*, yang berarti berargumen, berkomunikasi. Menurut Aristoteles, yang pertama kali menemukan metode dialektika adalah Zeno. Hal ini disebabkan oleh argument paradoksal dari Zeno melawan pergerakan multiplisitas. Dialektika diartikan sebagai argumen yang dibangun lewat proses tanya jawab, yang berorientasi pada penolakan pendapat lawan lewat menarik konsekuensi yang bertentangan. Aristoteles mengadopsi konsep dialektika Zeno dan Plato ini, tetapi yang ditolak dari keduanya adalah kecenderungan untuk mengabaikan pendapat umum setelah kebenaran diperoleh. Bdk. Robert Audi, *Op. Cit.* hlm. 232-235

²⁹ NE 1181 b 13-22

³⁰ Ernst Barker, *The Political Thought of Plato and Aristotle*, (New York: Dover Publications, Inc., 1959), hlm. 219

berarti ajaran, sabda, atau pengetahuan. Jadi, secara etimologis, teleologi berarti ajaran tentang tujuan.³¹ Tujuan harus dimengerti dari dua sudut pandang berbeda. *Pertama*, tujuan sebagai obyek kecenderungan yang menarik subyek untuk bertindak. Di sini, tujuan merupakan sebab yang menggerakkan subyek untuk bertindak. *Kedua*, tujuan sebagai obyek yang sudah diperoleh subyek tertentu.

Doktrin filosofis teleologi ini mengisyaratkan bahwa alam, paling kurang agen intensional diarahkan pada tujuan tertentu atau terorganisasi secara fungsional, sesuai dengan fungsi khususnya. Pada umumnya Aristoteles diterima dan diakui sebagai peletak dasar ajaran tentang teleologi, walaupun sebenarnya sudah dibicarakan Plato dengan penekanan pada teleologi eksternal karena pengaturan dunia alamiah dapat dipahami lewat membandingkan itu dengan perilaku agen intensional. Sebagai agen intensional, manusia dapat mengantisipasi masa depan dan dengan demikian bertindak dalam cara yang dikalkulasikan untuk merealisasikan maksud tersebut. Dalam konteks ini Plato berbicara tentang Idea Kebaikan, yang merupakan unsur tertinggi, di mana segala tindakan manusia tertuju atau bermuara. Dalam hidup, manusia senantiasa bertindak untuk memenuhi tujuan tertingginya yang terwujud dalam kebaikan itu sendiri. Bagi Plato, tujuan merupakan hasil kerja agen independen yang disebut jiwa atau *demiourgos*.³²

Aristoteles justru sebaliknya mendasarkan penjelasan teleologisnya pada kodrat atau *natura* masing-masing barang. Aristoteles mengembangkan teleologi internal, di mana masing-masing spesies alamiah memiliki sebab akhirnya sendiri dan dibentuk sedemikian rupa sehingga berkencenderungan untuk merealisasinya tujuan. Menurutnya, tujuan adalah bagian dari proses alamiah dan bukannya hasil kerja agen independen, seperti yang diklaim Plato di atas. Pernyataan ini bertolak dari pandangan metafisisnya tentang alam dunia. Aristoteles berpendapat bahwa segala yang terjadi di dunia, baik secara keseluruhan maupun sebagiannya selalu dimotivasi oleh satu tujuan. "Tujuan-tujuan ada secara aktual dalam barang-barang alamiah; ada dalam realitas bentuk tumbuh-tumbuhan dan binatang..."³³ Inilah yang disebut dengan tujuan alamiah. Setiap spesies bergerak atau bergiat oleh karena tujuan tertentu. Untuk itu setiap barang bergerak dan digerakkan dari potensialitas ke aktualitas. "Masing-masing tumbuhan dan hewan dibentuk sedemikian rupa sehingga bagian-bagiannya bekerja sama untuk membentuk hidup khas yang memungkinkan keberlangsungan spesies tersebut."³⁴

³¹ Dick Hartoko, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Rajawali Press, 1980, hlm. iii

³² D. M. Balme, "Teleology and Necessity," dalam *Philosophical Issues in Aristotle's Biology*. Cambridge: University Paperbacks Press, 1987, hlm. 275

³³ John M. Cooper, "Hypothetical Necessity and Natural Teleology," dalam *Philosophical Issues in Aristotle's Biology*, (Cambridge: University Paperbacks Press, 1987, hlm. 273

³⁴ *Ibid.*, hlm. 248

Teori teleologis tentang alam sering kali digambarkan dalam frase: “*nature makes nothing in vain*”.³⁵ Dunia bersifat teleologis karena “jika produk-produk artifisial ada untuk suatu tujuan, demikian halnya dengan produk-produk alamiah.”³⁶ Teleologi dalam alam berarti sebuah perkembangan yang mempunyai tujuan dalam dirinya sendiri ke arah tujuan yang ditentukan. Teleologi Aristoteles diartikulasikan lewat pengertian materi dan bentuk. Menurut Aristoteles, bentuk atau forma diartikan sebagai determinasi terakhir dengannya barang-barang mencapai karakter yang penuh dan materi adalah apa yang belum mencapai determinasi terakhir ini.³⁷ Bentuk dan tujuan tidak seharusnya sama, sekalipun bentuk adalah tujuan yang menentukan materi. Materi adalah material pertama yang berkembang sehingga tujuan diaktualisasikan. Dalam proses aktualisasi, ada pergerakan dari materi ke forma, yang bersifat alamiah karena alam adalah penyebab pergerakan dalam barang-barang. Material pertama memiliki sebuah stimulus ke arah pergerakan. Barang-barang alamiah berkembang dari dalam sebagai akibat dari impuls yang ada dalam diri barang itu sendiri. Pada materi ada sebuah identifikasi terakhir dengan alam dan sebuah atraksi ke arah bentuknya yang terakhir. Jika alam adalah penyebab tujuan, maka tujuan adalah penyebab pergerakan.

Sekalipun tujuan sebagai tujuan bukan milik khas manusia, tetapi sebagai makhluk rasional, manusia berbeda dari makhluk hidup yang lain. Manusia lebih jelas menampakkan kecenderungan alamiah secara sadar ke arah tujuan akhirnya. Dia dengan bebas dan sadar mengenal, memilih, dan menentukan tujuan hidupnya sendiri. Segala kegiatan manusia dilakukan dalam suatu pertimbangan yang matang demi kebaikan manusia itu sendiri. Kekhasan kegiatan manusia ditentukan oleh forma substansialis, yaitu kekhasan yang ada padanya, yang sekaligus adalah forma intensional yang mampu dikenalnya sendiri.

Dalam terang pemikiran ini, Aristoteles membedakan dua macam tujuan pada manusia, yaitu tujuan ekstrinsik atau instrumental dan tujuan intrinsik.³⁸ Tujuan ekstrinsik adalah tujuan-tujuan sementara yang dicapai dan berguna sebagai sarana untuk satu tujuan yang lebih tinggi. Bagi manusia, tujuan ekstrinsik ini merupakan sarana yang berguna untuk membentuk kepribadiannya sesuai dengan esensinya sebagai makhluk rasional. Kondisi-kondisi ekstrinsik penting untuk menciptakan kondisi intrinsik yang lebih baik untuk mendukung realisasi diri secara utuh. Untuk itu, Aristoteles menekankan pentingnya lingkungan sosial yang baik untuk membentuk kepribadian manusia, di samping unsur-unsur bawaan yang dimiliki sejak lahir. Dalam konteks

³⁵ P 1253 a 9

³⁶ Aristotle, *Physics*, penerj. R. P. Hardie, dalam *The Basic Works of Aristotle*, Richard McKeon, ed. New York: Random House, Inc., 1941), 199a 17-18

³⁷ A. E. Taylor, *Op. Cit.*, hlm. 46

³⁸ NE 1094 a 1-5

ini, Aristoteles mengatakan bahwa tujuan membentuk *polis* yang ideal adalah sarana untuk merealisasikan tujuan yang lebih tinggi, yaitu memanusiawikan manusia.

Sedangkan tujuan intrinsik, yang sering disebut dengan tujuan alamiah muncul dalam kodrat spesies itu sendiri. Tujuan intrinsik merupakan sebab yang menggerakkan atau menarik subyek untuk bertindak (*causa finalis*). *Causa finalis* adalah sebab dari segala sebab atau sebab pertama karena dia identik dengan nilai dari spesies itu sendiri. Spesies menggerakkan dirinya pada tujuan tertentu. Bagi itik, berenang adalah bagian dari esensinya, sehingga selalu digerakkan dari dalam untuk berenang. *Causa finalis* tidak dijatuhkan ke atas kodrat berdasarkan pertimbangan teoretis, tetapi merupakan kodrat itu sendiri dan menentukan gerak dari dalam.

Bagi manusia, tujuan intrinsik ini diungkapkan secara sadar sesuai dengan daya kognitifnya. Merealisasikan tujuan intrinsik berarti hidup dan berada sebagai makhluk rasional. Tujuan intrinsik manusia adalah hidup bahagia, sehingga seluruh kegiatan manusia bermuara pada kebahagiaan karena kebahagiaan merupakan indikator kesempurnaan sebagai manusia. Bagi orang yang bahagia, tidak ada sesuatu lain yang dirindukannya. Jadi, tujuan intrinsik adalah apa yang dikejar demi diri sendiri.

1.2.2. Doktrin Jalan Tengah

Salah satu kenyataan historis yang membentuk pemikiran politis Aristoteles adalah asal usulnya sebagai seorang putra dokter. Pada waktu itu, kedokteran merupakan ilmu yang paling maju dan memainkan peran penting dalam filsafat. Misalnya, pengertian tentang proporsionalitas penting dalam kedokteran, karena menjadi sehat mengandaikan bahwa semua kekuatan dan elemen tubuh manusia secara proporsional teratur sehingga tidak ada kekuatan atau elemen yang lebih dominan.³⁹

Aristoteles mengimpor ide ini dan mengklaim dalam bukunya *Physics* bahwa kesehatan tubuh adalah persoalan menjaga keseimbangan dan ketiadaan keseimbangan tersebut akan mengakibatkan penyakit.⁴⁰ Kalau elemen-elemen panas, dingin, basah, dan kering dalam tubuh manusia ada dalam keadaan seimbang, tubuh akan secara sempurna sehat. Sekalipun demikian, kesehatan tubuh dapat hancur ketika salah satu menjadi dominan atau terlalu banyak dan yang lain menjadi terlalu sedikit. Aristoteles mengaplikasikan prinsip proporsionalitas ini bukan hanya kepada tubuh, tetapi juga jiwa. Kesehatan jiwa bergantung juga pada proporsionalitas antara perasaan dan dorongan alamiah kita. Untuk menjadi seorang pribadi yang baik, seseorang harus

³⁹ Peter Losin, "Aristotle Doctrine of the Mean," dalam *History of Philosophy Quarterly*, Vol. 4, July 1987, hlm. 330

⁴⁰ Aristoteles, *Physics* 246 b 3-20

menghindarkan keinginan yang berlebihan atau yang terlalu kurang. Dari sinilah muncul ide tentang jalan tengah.

Jalan tengah adalah kalkulasi terbaik demi beberapa tujuan dan karena itu jalan tengah dianggap sebagai yang terbaik dalam dirinya sendiri.⁴¹ Karena alasan ini, seorang pribadi perlu dilatih untuk bisa menghindari ekstrimitas. Akibat latihan adalah untuk menghasilkan kebiasaan yang memungkinkan orang untuk memilih jalan tengah secara spontan. Karena itu, kebaikan karakter tidak muncul hanya dari tindakan-tindakan yang mengungkapkan keseimbangan yang tepat, tetapi juga dari kebiasaan yang dipelajari untuk bertindak.

Dalam *Nicomachean Ethics*, kebajikan berkaitan dengan tindakan yang diungkapkan dalam penentuan pilihan-pilihan yang terletak di antara, seperti ditentukan oleh prosedur rasional dengannya seorang yang bijaksana menentukan itu. Sekalipun demikian, dalam *Eudemian Ethics*, Aristoteles mengklaim bahwa kebajikan berkaitan dengan perasaan.⁴² Kebajikan berkaitan dengan keduanya, tindakan dan perasaan dalam arti bahwa beberapa emosi dapat diungkapkan dan diejawantahkan dalam tindakan-tindakan. Aristoteles juga menegaskan bahwa emosi dan tindakan tertentu selalu salah karena mereka dalam dirinya sendiri berlebihan atau terlalu kurang.

Dalam hubungan dengan keutamaan atau kebajikan moral, Aristoteles menilai masing-masing kebajikan dalam terang doktrin jalan tengah antara dua ekstrim. Aristoteles mengatakan: “Kebajikan moral berkaitan dengan emosi dan tindakan, di mana ada ekkses, defisien, dan jalan tengah. Misalnya, ketakutan, kepercayaan diri, keinginan, kemarahan, belas kasihan, kesenangan dan penderitaan pada umumnya bisa menjadi terlalu banyak atau terlalu sedikit, demikian juga hal-hal yang baik; tetapi untuk merasakan semuanya pada waktu yang tepat, atas dasar yang benar, ke arah orang yang tepat, dengan motif yang tepat dan dengan cara yang baik—itulah apa yang dimaksudkan dengan jalan tengah dan terbaik, tanda kebajikan.”⁴³

Setiap kebajikan terletak antara ekkses dan defisiensi keinginan, karena itu kebajikan menuntut paling kurang jumlah yang seimbang. Misalnya, keluhuran budi (*magnanimity*) digambarkan sebagai menginginkan kehormatan yang sepatutnya didapatkan, bukan terlalu banyak atau terlalu sedikit. Orang berbudi luhur menerima kehormatan untuk memegang jabatan tertentu, jika memang dia layak menerima dan kalau itu ditawarkan kepadanya; sekalipun demikian, jika tidak ditawarkan kepadanya, dia tidak akan merasa kehilangan. Contoh lain berkaitan dengan kebajikan keberanian. Keberanian melibatkan dua perasaan berbeda, ketakutan

⁴¹ Ernest Barker, *The Politics of Plato and Aristotle, Op. Cit.*, hlm. 230

⁴² Aristoteles, *Eudemian Ethics*, penerj. Michael Woods, (Oxford: Clarendon Press, 1982), EE 1106 b 16

⁴³ NE 1106 b 18024

dan kepercayaan diri. Menurut Aristoteles, orang yang melarikan diri dari setiap bahaya adalah pengecut, tetapi orang yang tidak melarikan diri sama sekali sekalipun ada bahaya riil yang mengancam hidupnya dianggap bersikap nekat bodoh. Karena itu keberanian berada antara sikap penakut dan kekekatan. Seorang yang berani tidak menghindari bahaya atau hal-hal yang menyakitkan dan destruktif, dan orang tersebut berkemauan untuk menghadapi bahaya dengan keinginan untuk melakukan sebuah tindakan bijaksana dan mulia.

Karena kebajikan melibatkan tindakan dan emosi manusiawi, Aristoteles lebih lanjut mengingatkan kita bahwa keutamaan karakter meliputi pengobservasian jalan tengah yang bersifat relatif kepada kita. Tidak ada formula matematis untuk menentukan jalan tengah: “Teori Pythagoras menentukan kebenaran terbatas dan kesalahan tak terbatas karena ada sekian banyak cara untuk menjadi salah tetapi hanya satu cara untuk menjadi benar.”⁴⁴ Jalan tengah relatif dalam kaitan dengan emosi dan tindakan seseorang. Ada poin penting berkaitan dengan relativitas jalan tengah ini. Aristoteles mengobservasi bahwa tidak gampang untuk menentukan jalan tengah dan karena itu kebajikan etis adalah sesuatu yang jarang dan merupakan hal yang sangat luhur.

Bagi Aristoteles, keadaan jiwa yang digambarkan oleh jalan tengah adalah kondisi karakter yang kuat. “Apa yang disebut keutamaan bergantung pada lingkungan, sama seperti jumlah yang tepat untuk makanan atau latihan-latihan fisik. Hal itu tidak ditentukan oleh ketepatan aritmetis.”⁴⁵ Karena itu, adalah tidak cukup bagi manusia hanya sekedar menghindari ekstrem—sekalipun menghindarkan ekstrem adalah kondisi yang penting—tetapi seseorang harus menghindari ekstrem karena alasan yang benar, demi sesuatu yang luhur. Dalam kehidupan baik yang mungkin bagi manusia, tujuan tindakan manusia terdiri dalam observasi jalan tengah. “Observasi jalan tengah adalah pertama-tama persoalan kesadaran yang hati-hati dan menghindarkan kesalahan. Kebajikan meliputi keseimbangan dari tendensi yang bertentangan untuk bertindak dan bereaksi, kemampuan untuk menjawab dalam berbagai cara ketika situasi menuntut.”⁴⁶

Karena jalan tengah tidak jelas dengan sendirinya, Aristoteles mengklaim bahwa keadaan bajik atau jalan tengah ditentukan akal budi seperti orang yang bijaksana menentukan itu. Bagi orang bijaksana, harus ada kombinasi antara kebajikan moral dan intelektual karena seseorang tidak dapat menjadi bijaksana tanpa menjadi baik; dan sebaliknya, seseorang tidak dapat menjadi baik tanpa menjadi bijaksana. Aristoteles mengakui bahwa beberapa orang mampu mencapai kebajikan sempurna ini, tetapi banyak orang harus dibimbing untuk melihat keuntungan tingkah

⁴⁴ W. K. Guthrie, *Op. Cit.*, hlm. 354

⁴⁵ Peter Losin, *Op. Cit.*, hlm. 332

⁴⁶ *Ibid.*, 240

laku yang baik lewat latihan yang terus menerus. Sekalipun demikian, selalu ada satu standar tindakan, yaitu akal budi, kemampuan untuk membedakan yang benar dari yang salah dalam kasus-kasus khusus.⁴⁷

Aristoteles mengaplikasikan doktrin jalan tengah dalam teori politiknya, yang membantunya untuk menentukan ukuran dan konstitusi yang tepat dari negara ideal. Bagi Aristoteles, negara ideal tidak boleh terlalu kecil atau terlalu besar, tetapi dengan ukuran sedang. Kalau terlalu kecil, maka *polis* tidak akan mampu menyediakan berbagai barang material yang penting untuk mempertahankan hidup. Atau dengan kata lain, dengan ukuran yang tidak terlalu kecil, *polis* mampu memanfaatkan potensinya sendiri untuk memenuhi kebutuhan anggota-anggotanya, seperti menghasilkan sesuatu dari lahannya sendiri sehingga. Dengan itu, *polis* memiliki kemampuan untuk mengamankan dan mempertahankan kebutuhan material tanpa harus masuk ke dalam relasi dengan entitas luar yang dapat mengganggu independensinya.”⁴⁸

Di samping itu, *polis* juga tidak boleh terlalu besar karena itu akan menghalangi anggota untuk mengenal satu sama lain secara intim. Di sini jelas bahwa bukan saja ukurannya yang sedang, tetapi juga jumlah warga negara yang pas-pasan sehingga memungkinkan relasi yang akrab mesra antara anggota. Aristoteles yakin bahwa familiaritas personal adalah komponen penting sebuah komunitas politik. Karena itu, *polis* yang teratur baik hendaknya tidak boleh memiliki terlalu banyak warga negara sehingga segala persoalan yang berkaitan dengan warga negara perorangan dapat diteliti dan dibicarakan pada waktu yang sama.⁴⁹

1.2.3. Teori dan Praksis

Ilmu pengetahuan secara umum dibagi atas ilmu-ilmu spekulatif—proses pemikiran yang berkaitan dengan kebenaran suatu pemikiran itu sendiri, atau berurusan dengan proses mengetahui dalam dirinya sendiri; dan ilmu-ilmu praktis—berkaitan dengan pengetahuan untuk melakukan sesuatu.⁵⁰ Term Yunani *theoria*, yang secara harafiah berarti memandang atau mengkotemplasikan, dimengerti sebagai ilmu yang memandang, memahami dan merefleksikan kebenaran. Sedangkan filsafat praktis meneliti tindakan konkret manusia. Praksis merupakan sebuah aktivitas pemikiran, tetapi aktivitas ini tidak pernah dipuaskan oleh proses pemikiran itu sendiri. Ilmu-ilmu praktis diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang riil bagi orang yang mempelajari ilmu-ilmu tersebut. Produktivitas sebuah ilmu ditentukan oleh sejauh mana ilmu yang dipelajari mempengaruhi dan sekaligus merubah hidup seseorang. Pemikiran teoretis harus

⁴⁷ W. K. C. Guthrie, *Op. Cit.*, hlm. 356

⁴⁸ Josiah Ober, *Political Dissent in Democratic Athens*, Princenton: Princenton University Press, 1998, hlm. 295

⁴⁹ P 1326 b 15-25

⁵⁰ William A. Wallace, *The Elements of Philosophy*, (New York: Alba House, 1977), hlm. 13

mengarahkan orang untuk bertindak karena orang yang berpikir tetapi tidak dapat bertindak akan tidak bermutu dan tidak dapat menggunakan tanggung jawabnya secara tepat dan benar.

Dalam filsafat, pembagian filsafat teoretis dan praktis sesungguhnya bertolak dari konsep Aristoteles tentang cara atau metode berpikir. Aristoteles membagi ilmu pengetahuan atas tiga jenis.⁵¹ *Pertama*, ilmu-ilmu produktif, yang berhubungan dengan menghasilkan sesuatu yang berada di luar agen atau pembuatnya, seperti pembangunan rumah. *Kedua*, ilmu-ilmu praktis, yang berhubungan dengan melakukan sesuatu yang tidak terpisah dari agen, yaitu tindakan dan pilihan, seperti etika dan politik. *Ketiga*, ilmu teoretis, yang berhubungan dengan kebenaran dalam dirinya sendiri.

Dalam praktek, pemikiran kita selalu diarahkan kepada upaya untuk menghasilkan sesuatu yang konkret—berbeda dengan kebenaran pemikiran itu sendiri. Inilah yang dikenal dengan tujuan-tujuan praktis. Misalnya, dalam mengarahkan pemikiran, ide-ide, atau teori-teori terhadap problem-problem yang berkaitan dengan tingkah laku manusia, kita berusaha mencapai tujuan tertentu dan bukan sekedar pemahaman teoretis atas situasi manusia. Tujuan itu adalah kebahagiaan, entah untuk pribadi ataupun untuk sesama. Atau, dalam kaitan dengan pengorganisasian sebuah komunitas, tujuan yang mau dicapai adalah perealisasi komunitas sosial yang tepat dan benar. Jadi, tujuan-tujuan konkret atau praktis ini harus ada dalam proses untuk merealisasikan ide-ide murni dan luhur yang berkaitan dengan problem-problem manusia. Adalah tidak cukup kalau orang hanya memiliki konsep-konsep teoretis dan cemerlang tentang hidup manusia. Konsep itu harus disertai dengan tujuan-tujuan praktis yang mau diperoleh dalam proses tersebut.

Tampaknya, Aristoteles sangat berhati-hati dalam menegaskan tujuan konkret dalam seluruh tulisannya tentang problem sosial dan moral. Obyek utama kuliahnya tentang tingkah laku manusia bukanlah untuk mengatakan kepada pendengar atau murid-muridnya “apa itu kebaikan” tetapi untuk membuat mereka menjadi baik.⁵² Atau dengan kata lain, Aristoteles membantu orang untuk menjadi pribadi-pribadi yang baik dan bukannya orang yang tahu tentang apa itu kebaikan. Aristoteles menasihatkan bahwa *Nicomachean Ethics* ditulis bukan untuk mengetahui apa itu kebajikan tetapi untuk membantu pembaca menjadi baik. Seseorang dinilai baik kalau dia menjadi pelaku dan pemilih yang baik. Hal ini bukan semata-mata persoalan memilih dan melaksanakan tindakan secara baik, tetapi tentang memilih dan melakukan sebuah tindakan secara benar. Agen harus tahu apa yang seharusnya dilakukan dan melakukan tindakan tersebut berdasarkan putusan yang tepat.

⁵¹ Uraian Aristoteles tentang model berpikir ini bisa ditemukan dalam bukunya *Posterior Analytics*. Bdk. Robert Audi, *Op. Cit.*, hlm. 47.

⁵² *Ibid.*, hlm., 50

Sekalipun menekankan tujuan-tujuan praktis, Aristoteles juga masih mengakui pentingnya teori-teori kebenaran yang harus dijadikan patokan dalam berpolitik. Karena itu Aristoteles mengingatkan kita agar kebenaran etika dan politik tidak boleh dijadikan sebagai sesuatu yang mutlak dan diterapkan secara universal seperti yang terjadi pada ilmu-ilmu spekulatif, tetapi harus diterapkan sesuai dengan konteks dan situasi kongkret dan sekaligus akan memberikan kejelasan dan arah dalam tindakan. Seseorang tidaklah cukup hanya memiliki kehendak yang kuat dan berapi-api, tetapi kehendak itu haruslah jelas dan terarah. Kehendak yang kuat tanpa kejelasan dapat berbahaya. Tidak ada hal yang lebih berbahaya daripada ketidaktahuan dan ketidakjelasan dalam tindakan.

Tujuan ilmu praktis adalah untuk memformulasikan aturan-aturan konkret atau riil yang akan membimbing manusia dalam memperoleh berbagai macam tujuan hidup. Aristoteles menyadari betul pentingnya teori dan praktek dalam pendidikan yang dibuatnya untuk pendengar kuliahnya dan juga pembaca buku-bukunya. Hal itu berarti bahwa pendidikan tidak pernah boleh dilakukan kalau tidak ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan secara rasional, sosial, dan moral. Itulah landasan teoretis pendidikan. Dan sebaliknya, sebuah teori yang baik harus dijabarkan dalam seluruh program pendidikan dan dilaksanakan secara konsekuen dalam proses pendidikan itu sendiri. Hal ini berbeda dengan Plato, seorang idealis, yang merancang sistem pendidikan yang mengarahkan orang untuk memahami realitas yang ada di balik sesuatu yang nampak, yaitu mengetahui ide tentang kebaikan.⁵³

Filsafat praktis Aristoteles tampak dalam dua buku terkenalnya *Nicomachean Ethics* dan *Politics*. Kedua buku tersebut memuat petunjuk-petunjuk praktis bagaimana menghidupi hidup ini serta bagaimana menjadi seorang pribadi yang baik dan sekaligus warga negara yang baik. Keduanya dirancang untuk menengahkan tindakan yang efektif untuk perilaku hidup manusia. Karena itu, keduanya berbicara tentang apa yang bisa dibuat oleh manusia sebagai agen moral karena hal itu masuk dalam domain pilihan dan tindakan manusiawi.⁵⁴ Manusia, dalam hidupnya memilih untuk bertindak, yang mengindikasikan bahwa segala sesuatu yang bakal dibuat bergantung pada subyek itu sendiri. Manusia adalah agen moral, karena dia mempunyai kemampuan untuk membuat pilihan dan sekaligus bertindak atas dasar pilihan tersebut. Sebagai agen moral, manusia tahu apa yang seharusnya dilakukan, entah secara pribadi ataupun sebagai warga negara *polis*.

Di sini, kita melihat bagaimana Aristoteles memperlakukan etika dan politik, yang pada zaman modern merupakan dua bidang yang sangat terpisah, di mana etika lebih dilihat sebagai bidang studi yang berurusan dengan kehidupan individual sementara politik berurusan dengan

⁵³ John Hallowell dan Jene M. Porter, *Op. Cit.*, hlm. 28

⁵⁴ *Ibid.*

kehidupan warga negara dalam kehidupan bersama. Bagi Aristoteles, politik tidak boleh dipisahkan dari etika karena keduanya mempelajari aspek praktis kehidupan manusia, yang disebut filsafat hidup manusia.⁵⁵ Etika dan politik berhubungan erat karena subyek dari keduanya adalah kebaikan bagi manusia. Kehidupan yang baik bagi manusia adalah juga tujuan di mana semua aktivitas manusia diarahkan. Etika menyusun model kehidupan terbaik yang direalisasikan oleh orang-orang terbaik dalam sebuah negara yang baik; sementara politik mengedepankan prinsip-prinsip pembentuk negara yang baik dalam dirinya sendiri.

Aristoteles sendiri tidak menggunakan ilmu etika dan dia tidak mengakui bahwa ada investigasi etis yang berbeda dari politik. Hidup etis atau hidup yang baik merupakan suatu keharusan dalam kehidupan berkomunitas. Etika terealisasikan dalam praksis atau tindakan-tindakan sebagai ungkapan partisipasi orang dalam kehidupan berkomunitas. Seseorang akan hidup baik kalau dia berpartisipasi dalam kehidupan *polis* dan aturan-aturannya. Karena itu adalah suatu kekeliruan kalau menganggap bahwa investigasi etis yang dilaksanakan Aristoteles merupakan upaya untuk mendeskripsikan perkembangan moral individual terpisah dari politik. Hanya ada satu tujuan tindakan manusia yaitu kebahagiaan dan hanya satu ilmu yang mengarahkan orang untuk mengejar tujuan tersebut yaitu politik.

Diskusi tentang kehidupan politik dan tujuannya menuntut kita untuk berdiskusi tentang kebajikan individual karena tujuan ilmu politik adalah kebaikan untuk semua anggota sebuah komunitas politik. Karena itu, Aristoteles menganggap ilmu politik sebagai ilmu praktis yang memiliki tujuan etis, yang bekerja ke arah realisasi tujuan hidup manusia. Pada bagian akhir NE, Aristoteles mengangkat persoalan tentang kehidupan yang baik yang diimplementasikan dalam sebuah negara dan dia menjawabnya dengan mengatakan: “masyarakat tidak akan menjadi baik kalau tidak ada pemerintahan dan hukum yang diciptakan untuk mengupayakan pencapaian kebaikan itu sendiri.

Menurut Aristoteles, negara-kota, *polis*, merupakan sarana untuk mengembangkan dan menyempurnakan kemampuan manusia. *Polis* ada untuk membantu manusia mencapai kesempurnaan hidupnya sebagai manusia. Dalam arti bahwa negara menyediakan aktivitas-aktivitas yang memungkinkan warga negara untuk mengembangkan kebajikan dan karena itu menjadi warga negara yang sempurna dan sejahtera. Aristoteles mengatakan: “Untuk manusia, ketika disempurnakan akan menjadi binatang yang paling baik, tetapi ketika dipisahkan dari hukum dan keadilan, dia menjadi yang terburuk dari semua binatang.”⁵⁶ Inilah yang terungkap dalam istilah praksis itu sendiri karena yang terpenting dalam praksis adalah partisipasi dalam

⁵⁵ W.K.C. Guthrie, *A History of Greek Philosophy, Vol. 6, Aristotle: An Encounter*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1981), hlm. 331

⁵⁶ P 1253 a 31-32

kehidupan berkomunitas demi perealisasi diri manusia sebagai makhluk sosial. Manusia mencapai kepenuhan dirinya sebagai manusia dengan terlibat aktif dalam urusan bersama dalam *polis*.

Individu membutuhkan negara dan hukum-hukumnya untuk mengembangkan dirinya ke arah kesempurnaan, tetapi orang yang tidak membutuhkan *polis* dan hukum bukanlah manusia tetapi entah lebah atau dewa. Alasan utamanya, negara yang ideal menawarkan latihan atau pendidikan moral yang dianggap sangat essential untuk perkembangan karakter manusia ke arah yang baik. Hukum dituntut untuk menjamin bahwa sistem pendidikan diterapkan secara tepat. Seorang individu harus dididik dengan menggunakan satu sistem pendidikan yang cocok untuk memungkinkan manusia memperoleh kebajikan-kebajikan etis dan memiliki kebijaksanaan praktis. Proses ini membantu manusia untuk menjadi agen moral yang bebas dan otonom. Untuk mencapai tujuan ini, negara membutuhkan negarawan dan politikus yang mampu menolong diri mereka sendiri dan orang lain untuk menemukan kebajikan dan kualitas-kualitas yang dibutuhkan untuk menjadi orang baik. Mereka mengejar kebahagiaan umum lewat menciptakan legislasi/peraturan yang baik. Seorang politikus yang baik hendaknya selalu tertarik untuk menjadi orang yang bajik karena hanya dengan berbuat demikian dia mampu membantu sesama warga negaranya menjadi pribadi yang baik juga.

Penekanan pada tujuan negara tidak berarti bahwa perkembangan dan kebutuhan warga negara dikorbankan demi kesejahteraan negara tetapi lebih berarti bahwa negara ada untuk membantu perkembangan dan penyempurnaan moral anggotanya. Kesejahteraan negara adalah juga kesejahteraan anggota-anggotanya. Karena itu, negara dianggap sebagai suatu asosiasi spiritual sebab tujuannya adalah kesempurnaan moral untuk anggota-anggotanya. Negara ada untuk mendidik warganya sedemikian rupa sehingga menjadi orang-orang baik dan untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang mulia dan terpuji.

BAB II

KONSEP ARISTOTELES TENTANG HIDUP YANG BAIK

Seperti dikatakan di bagian pendahuluan, dalam relasinya dengan politik, etika menyediakan model hidup baik yang dapat direalisasikan oleh orang-orang terbaik di sebuah negara ideal. Hal ini mengisyaratkan bahwa sebelum seseorang terlibat atau dilibatkan dalam politik, dia harus terlebih dahulu dilatih dan dididik secara benar dalam hal-hal moral. Pembentukan watak sebagai pribadi mendahului pembentukan watak sebagai warga negara. Dalam terang pemikiran ini, Aristoteles bergelut pertama-tama dengan tema seputar bagaimana menjadikan seseorang itu baik sebagai pribadi dalam lingkungan keluarga dan kemudian menjadi warga negara di lingkungan publik. Karena itu, analisis secara detail konsep Aristoteles tentang politik dan partisipasi politik, hendaknya dimulai dengan analisis tentang konsepnya tentang hidup baik, *the good life*. Inilah tema utama dalam tulisan-tulisan etika Aristoteles.

Ada dua tema penting yang diuraikan Aristoteles dalam hubungannya dengan konsep hidup baik tersebut, yaitu teori tentang kebaikan bagi manusia dan kebajikan. Dan dalam uraiannya tentang hidup yang baik, tampak dengan jelas konsep Aristoteles tentang partisipasi politik. Dalam konteks etika, Aristoteles tampaknya mempromosikan penarikan diri dari semua aktivitas politik karena tidak mendukung tercapainya kehidupan yang baik atau kebahagiaan sempurna dalam hidup. Atau dengan kata lain, Aristoteles menganggap bahwa keterlibatan dalam politik tidak bernilai karena tidak mengantar orang pada kebahagiaan sejati. Tetapi, untuk memahami mengapa Aristoteles berpendapat demikian, dan dalam konteks apa pernyataan seperti itu harus dimengerti, maka adalah baik kalau kita coba mendalami secara detail konsep Aristoteles tentang kebaikan dan kebajikan.

2.1. KEBAIKAN BAGI MANUSIA

Aristoteles menyadari bahwa metode yang dipakai untuk mempelajari atau mengukur ketepatan tindakan manusia sehingga disebut sebagai kebaikan moral tidaklah bersifat matematis. Kita tidak bisa mencari kepastian atau ketepatan matematis dalam politik ataupun tindakan moral. Kita hanya menggunakan ketepatan yang bersifat rata-rata atau kurang lebih. Alasannya, *pertama*, apa yang baik dan adil, misalnya sangat berbeda dari satu pribadi ke pribadi yang lain, dari satu komunitas ke komunitas yang lain. *Kedua*, kebaikan berubah-ubah karena sesuatu bisa dinilai baik pada waktu dan dari aspek tertentu, tetapi bisa buruk pada waktu dan dari aspek lainnya. Misalnya, seorang tukang kayu dan ahli geometri berbeda dalam melihat ketepatan atau kepastian sudut. Seorang ahli geometri berusaha untuk mencari ketepatan sudut dalam dirinya sendiri. Di sini, ketepatan ditentukan oleh obyek itu sendiri. Tetapi seorang tukang kayu mempelajari sudut yang benar hanya sejauh hal itu berguna dalam membuat sebuah meja.

Karena itu, dalam mempelajari manusia dan segala tingkah lakunya, ketepatan studi ditentukan oleh tindakan dan klarifikasi yang dituntut oleh tindakan tersebut.

Bertolak dari alasan ketidakpastian metode penelitian seperti ini, kebaikan tidak bisa bersifat absolut, dalam arti berlaku secara sama dan mutlak untuk semua organisme. Kebaikan yang dikejar harus sesuai dengan kodrat organisme itu sendiri.⁵⁷ Masing-masing menentukan sendiri apa yang baik untuk menyempurnakan keberadaannya serta untuk mempertahankan kelangsungan eksistensinya. Karena itu, menurut Aristoteles, tidak ada ide kebaikan absolut yang berlaku untuk semua orang karena kalau kita mengatakan bahwa sesuatu itu baik, sifat “baik” yang diklaim di sini semata-mata dilihat dari sudut pandang atau aspek tertentu saja.

Selain itu, kebaikan selalu dikaitkan dengan kategori-kategori tertentu, seperti substansi, kualitas, kuantitas, hubungan, waktu dan tempat. Akibatnya, dalam kategori-kategori ini, kebaikan bisa berbeda dari satu orang ke orang lainnya. Apa yang dianggap baik oleh dokter pada saat tertentu ketika dia melakukan operasi, belum tentu sama dengan waktu seorang pilot untuk menerbangkan pesawatnya. Pada waktu yang sama, menurut perhitungan dokter “baik” untuk melakukan amputasi kaki seorang pasien, tetapi untuk pilot waktu yang sama bisa sebaliknya karena dia tidak bisa menerbangkan pesawatnya karena gangguan angin.

Di samping ketidakpastian mengukur kebaikan, dalam etika dibutuhkan pengalaman dan kedewasaan. Orang menjadi baik dalam hal memutuskan sesuatu kalau dia dilatih secara tepat dan berulang-ulang untuk melakukan hal tersebut. Seorang mekanik yang baik adalah orang yang terlatih secara terus menerus dan berulang-ulang dalam memperbaiki dan memberikan penilaian atas kendaraan. Metode repetisi membantu orang untuk berkembang menjadi seorang pribadi yang baik atau sempurna.

2.1.1. Pengertian Kebaikan

Aristoteles memulai buku *Nicomachean Ethics* dengan sebuah observasi bahwa semua perbuatan manusia bertujuan pada kebaikan. “Setiap ilmu dan penelitian, setiap tindakan dan pilihan, bertujuan pada beberapa kebaikan.”⁵⁸ Aristoteles menegaskan bahwa semua kegiatan manusia “baik” karena senantiasa terarah pada satu tujuan yang dalam dirinya sendiri “baik”. Seseorang tidak mungkin mengejar sesuatu yang dalam dirinya sendiri jahat atau tidak baik. Karena itu, sebelum Aristoteles menganalisis lebih lanjut apa itu kebaikan, dia menguraikan lebih dahulu tentang perbuatan manusia.

⁵⁷ NE 1182 b 6 – 1183 a 20

⁵⁸ NE 1094 a 1-2

Secara umum, perbuatan manusia dikategorikan ke dalam beberapa jenis, antara lain: keterampilan (*techne*), yaitu disposisi untuk mampu berbuat sesuatu; penelitian (*methodos*), yaitu disposisi untuk menemukan sesuatu lewat cara investigasi; tindakan (*praxis*), yaitu tindakan aktual manusia; dan pencaharian (*proairesis*), yaitu pilihan cara tertentu untuk bertindak. Semua perbuatan ini dilakukan dalam rangka suatu kebaikan tertentu. Misalnya, keterampilan mekanis bertujuan untuk memperbaiki kendaraan; penelitian arkeologis untuk menemukan peninggalan-peninggalan purba, tindakan memberi sedekah untuk membantu orang miskin, dan pencaharian intelektual untuk memperoleh kebenaran-kebenaran. Bertolak perbuatan yang manusia yang berorientasi kebaikan ini, Aristoteles lalu mendefinisikan kebaikan sebagai “sesuatu yang kepadanya segala sesuatu tertuju”.⁵⁹

Sesudah memberikan definisi tentang kebaikan, Aristoteles langsung memperkenalkan term penting lainnya yaitu *telos*, *end*, tujuan, yang diartikan sebagai sesuatu yang dalamnya suatu tindakan atau aktivitas mencapai kepenuhannya. Atau, sesuatu yang kepadanya tindakan berakhir atau berhenti.⁶⁰ Berkaitan dengan tujuan, Aristoteles membuat dua observasi menarik berikut ini.⁶¹ *Pertama*, dalam kasus-kasus tertentu, tujuan seringkali merupakan aktivitas itu sendiri, dan dalam kasus lainnya, tujuan merupakan produk atau hasil dari suatu aktivitas sehingga tujuan terpisah dari aktivitas. Misalnya, berterimakasih terhadap seseorang. Dalam contoh ini, tindakan berterimakasih sekaligus merupakan tujuan. Sedangkan dalam membuat sebuah meja, produk dalam bentuk meja merupakan tujuan, dan bukannya tindakan membuat meja. Di sini, tujuan merupakan sesuatu yang terpisah dari tindakan itu sendiri. Kalau kita memahami tujuan dalam pengertian kedua sebagai suatu produk, maka produk dinilai lebih baik sehingga dianggap sebagai kebaikan, yang memiliki nilai lebih ketimbang aktivitas sendiri.

Kedua, karena manusia memiliki banyak aktivitas, seni, dan juga ilmu, maka konsekuensi logisnya adalah bahwa ada banyak tujuan atau kebaikan. Dan sering kali terjadi, tujuan yang satu lebih rendah dari tujuan-tujuan lainnya. Subordinasi tujuan ini bertolak dari kodrat tindakan, seni, atau ilmu itu sendiri, dan bukannya bergantung dari keputusan atau penilaian manusia. Misalnya, keterampilan membuat sebuah mobil dianggap lebih rendah dari keterampilan mengemudi karena secara kodrati tindakan membuat mobil lebih rendah dari mengemudi. Atau, keterampilan berperang dianggap lebih rendah dari keterampilan berpolitik (tentara lebih rendah dari politikus). Hal ini berarti bahwa ada ilmu atau keterampilan yang dinilai sebagai kebaikan yang lebih tinggi karena menghasilkan kebaikan yang dianggap lebih baik, dan ada ilmu atau keterampilan yang lebih rendah karena menghasilkan kebaikan yang lebih rendah.

⁵⁹ NE 1094 a 3

⁶⁰ NE 1094 a 4

⁶¹ Robert Sokolowski, “Guide for Reading Aristotle’s *Nicomachean Ethics*,” (ms.), The Catholic University of America, Fall 2004, hlm. 28

Sesudah menguraikan hubungan antara berbagai macam kebaikan dan tujuan, Aristoteles menegaskan bahwa kalau ada sebuah tujuan terakhir, tertinggi (*final end*), dalam arti tujuan yang paling akhir dan komprehensif, maka harus ada ilmu atau keterampilan yang berbicara tentang tujuan tersebut. Sampai di sini, Aristoteles belum menunjukkan atau mengidentifikasi tujuan tersebut, tetapi dia mengandaikan bahwa kalau ada tujuan final tersebut, maka politik merupakan ilmu yang cocok untuk berbicara tentang itu. Atau dengan kata lain, kebaikan final cocok menjadi tujuan dari ilmu politik karena menurut Aristoteles, semua ilmu dan keterampilan lain diatur oleh politik. Dalam konteks ini Aristoteles mengatakan bahwa politik adalah *master science*,⁶² karena politik menentukan ilmu-ilmu apa yang harus dipelajari dalam sebuah negara, politik menentukan kelompok warga negara mana yang harus mempelajari ilmu-ilmu tersebut, politik menggunakan ilmu-ilmu lain seperti ilmu strategi, ekonomi, retorika, dan lain-lain, dan politik mengatur apa yang harus dibuat dan apa yang tidak boleh dibuat dalam sebuah negara.

Di samping alasan-alasan tersebut di atas, Aristoteles juga menilai kebaikan politik dari aspek sasarannya. Menurutnya, adalah lebih baik untuk memperoleh kebaikan bagi sebuah kota sebagai keseluruhan, daripada memperoleh kebaikan untuk orang perorangan. Sekalipun secara esensial, tujuan itu satu dan sama, tetapi tujuan untuk negara dianggap jauh lebih baik ketimbang tujuan untuk individu tertentu saja. Kebaikan untuk sebuah kota atau negara jauh lebih komprehensif—dan karena itu dianggap lebih baik—kalau dibandingkan dengan kebaikan untuk individu. Bertolak dari alasan-alasan tersebut di atas, Aristoteles lalu menyimpulkan bahwa ilmu atau keterampilan yang diarahkan untuk memperoleh kebaikan tertinggi adalah politik. Tetapi, catatan yang perlu diperhatikan di sini supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman adalah bahwa Aristoteles tidak mengatakan bahwa politik merupakan kebaikan yang tertinggi, tetapi hanya merupakan ilmu yang mengarahkan manusia kepada kebaikan tertinggi. Jadi, politik hanya sebagai instrumen bagi manusia untuk memperoleh kebaikan tertinggi.

2.1.2. Kebahagiaan sebagai Kebaikan Tertinggi

Sesudah menguraikan arti kebaikan, Aristoteles kembali mempertanyakan, apa itu kebaikan tertinggi yang dicari oleh setiap ilmu, yang menjadi target dari ilmu politik dan yang dapat diperoleh melalui tindakan manusia? Menurut Aristoteles, tampaknya semua orang setuju bahwa kebaikan tertinggi adalah *eudaimonia* (kebahagiaan). Masalahnya, Aristoteles berhadapan dengan konsepsi berbeda tentang kebahagiaan yang diterima umum. Perbedaan pandangan tersebut tampak dalam diri orang-orang biasa (tidak terpelajar) dan orang-orang terpelajar (bijaksana).⁶³ Orang-orang biasa mengaitkan kebahagiaan dengan sesuatu yang jelas dan dialami secara konkret oleh manusia, seperti kesenangan, kekayaan, dan kehormatan. Ketika orang

⁶² NE 1094 b 1-10

⁶³ NE 1095 a 22-28

merasa senang, memiliki harta yang banyak, dan merasa dihormati, mereka mengalami kebahagiaan karena itulah yang konkret dialami dan jelas terlihat. Di sini, kebahagiaan diartikan sebagai ungkapan perasaan senang atau puas. Tetapi, dalam kalangan ini sendiri, masih terdapat perbedaan berhubungan dengan apa yang konkret dan jelas tersebut. Kaum hedonis, misalnya, mengklaim bahwa kesenangan merupakan yang riil, sedangkan kaum sofis menganggap kehormatan sebagai yang riil.

Karena adanya perbedaan seperti ini, orang-orang sederhana menjadi terbuka untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang-orang bijaksana (filsuf), yang mengajarkan bahwa kebahagiaan adalah sesuatu yang melampaui segala sesuatu yang jelas dan konkret; sesuatu yang lebih tinggi dan melampaui apa yang bisa dipahami dan dialami manusia. Dan salah satu ajaran yang diajarkan oleh orang-orang bijak—seperti diajarkan oleh pengikut-pengikut Plato yaitu bahwa kebahagiaan adalah sesuatu yang terpisah. Kebahagiaan merupakan suatu kebaikan yang distingtif karena melampaui semua kebaikan lain, seperti kesehatan, kekayaan, kehormatan, kesenangan, dan lain-lain. Sebagai sesuatu yang terpisah, kebahagiaan “merembesi” dan menjadikan kebaikan-kebaikan lain layak dikejar.

Aristoteles tidak sepaham dengan anggapan orang-orang sederhana dan kaum terpelajar di atas. Menurutnya, *eudaimonia* adalah nama dari kebaikan tertinggi yang dapat dicapai oleh seseorang dan seseorang dikatakan bahagia kalau dia memiliki konsep yang tepat tentang kebaikan tersebut. Akibatnya, jika konsep seseorang tentang kebaikan tertinggi keliru atau salah, orang tersebut dapat berpikir bahwa dirinya bahagia, sekalipun tidak demikian kenyataannya. Namun, kalau kita mengajukan pertanyaan “apa itu kebahagiaan”, kita tidak bertanya tentang sebuah deskripsi atau analisis tentang sebuah perasaan, tetapi mengajukan pertanyaan tentang kehidupan model apakah yang baik untuk dihidupi. Aristoteles menunjukkan bahwa kebahagiaan sering kali disamakan dengan hidup yang baik (*living well, eu zen*) dan melakukan yang baik (*doing well, eu prattein*).⁶⁴ Sekalipun demikian perlu dicatat bahwa Aristoteles juga berpikir tentang kemungkinan bahwa di samping manusia, seekor binatang juga bisa hidup baik, hanya saja manusia yang bisa disebut bahagia. Manusia yang hidup baik dan berbuat baik disebut bahagia.

Untuk mendukung konsepnya tentang kebahagiaan ini, Aristoteles menguraikan dan menganalisis prosedur bagaimana kita sampai pada prinsip pertama dan original tentang tindakan manusia secara umum dan kebahagiaan secara khusus. Dalam kaitannya dengan ini, yang perlu dipertanyakan adalah entahkah kita bergerak ke arah prinsip utama atau sebaliknya bertolak dari prinsip pertama. Di sini, perlu dibedakan antara diskusi yang mengantar kita kepada prinsip utama (induktif) dan diskusi yang bertolak dari prinsip utama dan mengaplikasikan itu dalam kehidupan konkret (deduktif). Di samping itu, kita juga harus membedakan antara prinsip pertama atau originalitas “untuk kita” dan prinsip pertama “dalam dirinya sendiri”.

⁶⁴ NE 1097 b 20

Prinsip utama “untuk kita” merupakan hal-hal yang kita ketahui. Kita harus tahu fakta-fakta tertentu.⁶⁵ Misalnya, kita harus tahu bahwa adalah sesuatu yang baik untuk menghormati orangtua, atau bersikap sopan lebih baik dari sikap tidak sopan, atau bersikap murah hati lebih baik dari sikap kikir. Pengetahuan tentang fakta seperti ini hanya lewat pendidikan dan pembentukan yang baik. Sekali kita mempunyai pengetahuan tentang fakta, kita akan dengan mudah mendapatkan alasan-alasan di balik fakta-fakta tersebut. Jika kita tidak memiliki fakta, kita tidak akan pernah mendapatkan alasan yang cukup dan jika diajarkan hanya tentang alasan-alasan tanpa adanya fakta, hal itu tidak akan menyakinkan. Di sini, kita melihat bahwa menurut Aristoteles, pola pendekatan induktif⁶⁶ lebih tepat dan menyakinkan. Dalam konteks ini, Aristoteles disebut sebagai seorang realis karena dia selalu bertolak dari pengalaman dan fakta-fakta konkret dalam teori ilmu pengetahuan.

Dalam etika, prinsip pertama dan utama adalah fakta tertentu. Tetapi, bagaimana kita sampai pada prinsip-prinsip utama etis, entahkah lewat induksi, persepsi, atautkah pembiasaan? Dalam induksi, kita secara perlahan-lahan mengetahui apa itu baik dan apa itu buruk. Dari banyak fakta yang dialami secara terus menerus, kita sampai pada kesimpulan bahwa hal itu baik atau buruk. Dalam persepsi, kita mengetahui secara spontan sesuatu itu baik atau buruk. Dan pengetahuan itu diperoleh hanya dari satu pengalaman tunggal saja. Misalnya, hanya dengan satu pengalaman—dipenjarakan—orang bisa dengan cepat menyimpulkan bahwa lebih baik menjadi orang bebas daripada orang yang terpenjara. Atau, hanya dengan sekali sakit, orang dengan segera menyimpulkan bahwa lebih baik menjadi orang sehat daripada orang sakit. Sedangkan dalam pembiasaan (habitiasi), kita harus membiasakan diri dalam cara tertentu untuk mengetahui yang baik dan buruk. Inilah yang terjadi dalam pendidikan dan pembentukan. Orang harus diajarkan dan dilatih secara terus menerus untuk bisa memahami dengan tepat apa yang baik dan apa yang buruk.⁶⁷

Sesudah menganalisis ketiga cara ini, Aristoteles lalu menyimpulkan bahwa dalam etika habitiasi merupakan cara yang tepat untuk sampai pada prinsip-prinsip etis. Untuk mendukung kesimpulannya, Aristoteles mengutip pendapat penyair Hesoid yang mengatakan bahwa ada tiga tipe manusia dalam usaha untuk memperoleh pengetahuan.⁶⁸ *Pertama*, orang yang memperoleh pengetahuan lewat usaha sendiri. *Kedua*, orang yang memperoleh pengetahuan lewat bantuan

⁶⁵ Robert Sokolowski, *Op. Cit.*, hlm. 30

⁶⁶ Induksi adalah metode berpikir yang bertolak dari hal-hal partikular ke hal-hal yang umum. Bertolak dari fakta, kita bergerak untuk mengetahui alasan-alasan, prinsip-prinsip, atau teori-teori yang ada di balik fakta tersebut. Atau, kita menyimpulkan sesuatu dari contoh-contoh konkret. Bdk. Robert Audi, *Op. Cit.*, hlm. 425

⁶⁷ NE 1095 b 5-9

⁶⁸ NE 1095 b 10-12

orang lain. *Ketiga*, orang yang tidak mempunyai pengetahuan sama sekali. Orang-orang seperti ini disebut Hesoid sebagai orang yang tak berguna.

Dengan bantuan pendapat Hesoid ini, Aristoteles menegaskan bahwa pengetahuan hanya bisa diperoleh entah lewat usaha pribadi ataupun lewat bantuan orang lain (pendidikan). Kalau orang tidak memperoleh pengetahuan lewat keduanya, orang tersebut sama sekali tidak berguna dan lebih lanjut diklaim bahwa orang-orang tersebut adalah orang-orang yang tidak bahagia. Orang yang tidak pernah berusaha sendiri atau tidak mau dibantu untuk mengetahui apa yang baik dan buruk, adalah orang-orang yang tidak akan pernah bahagia hidupnya. Dengan ini Aristoteles mau menegaskan bahwa kebahagiaan, sebagai kebaikan tertinggi dan sekaligus sebagai prinsip pertama dan utama dalam etika, dapat diketahui.

Bertolak dari uraian ini, Aristoteles kemudian berusaha menemukan titik lemah dari konsep kebahagiaan dari kedua kelompok seperti dikemukakan di atas. Berkaitan dengan konsep kebahagiaan dari orang-orang biasa yang mengidentikkan kebahagiaan dengan sesuatu yang jelas dan kongkret, Aristoteles menegaskan bahwa kita perlu membedakan tiga model kehidupan atau apa yang dicari dalam hidup.⁶⁹ *Pertama*, kehidupan untuk mencari kesenangan semata-mata—terutama kesenangan fisik. Model hidup ini sangat animalistik, sekalipun dalam kenyataan ada juga banyak orang yang menjadikan kesenangan sebagai tujuan utama hidup mereka. Model hidup ini sangat rendah nilainya dan langsung diabaikannya karena dianggap vulgar dan tidak manusiawi.

Kedua, hidup untuk mencari prestasi politik, di mana kehormatan merupakan sesuatu yang dicari dalam hidup dan sekaligus menjadi kebaikan tertinggi. Menurut Aristoteles, kebaikan politis atau kehormatan bukan merupakan kebaikan tertinggi karena kebaikan tersebut sangat bergantung pada pemberi hormat. Kebaikan kehormatan itu tidak independen dan tidak sungguh-sungguh dimiliki oleh orang-orang yang memperolehnya. Dia akan hilang dari orang tertentu kalau pemberi gelar kehormatan tersebut memutuskan untuk menarik gelar tersebut dan memberikannya kepada orang lain. Bisa dibandingkan dengan pemberian gelar “kepala suku” kepada tokoh-tokoh tertentu. Gelar itu bisa diberikan kepada orang-orang berbeda dari waktu ke waktu. Dalam setahun gelar yang sama bisa diberikan kepada beberapa orang berbeda.

Di samping itu, kehormatan tidak diinginkan demi dirinya sendiri, tetapi untuk mengkonfirmasi kebaikan tertentu yang dimiliki orang tersebut. Orang diberi gelar karena adanya kebajikan-kebajikan tertentu yang ditunjukkan atau dipraktikannya. Karena orang berbuat bajik maka dia diberi gelar kehormatan. Misalnya, seseorang diberi gelar pahlawan karena kebajikan keberanian yang ditunjukkannya dalam membela negara. Hal ini menunjukkan

⁶⁹ NE 1095 b 15—1096 a 10

bahwa kebajikan sesungguhnya lebih tinggi dari kehormatan itu sendiri. Dan bahkan kebajikan itu sendiri belum merupakan kebaikan final atau tertinggi karena kebajikan masih ada di bawah keharusan lain dalam hidup manusia.

Ketiga, kehidupan intelektual, berpikir, atau kontemplatif. Di sini, yang dicari adalah pengetahuan. Orang mengabdikan hidupnya untuk mencari kebenaran-kebenaran dan teori-teori. Model ini dianggap jauh lebih tinggi dari kedua model hidup di atas. Ketika membandingkan kehidupan intelektual dengan ciri khasnya kontemplasi dan kegiatan politik untuk mencari kehormatan, Aristoteles berkesimpulan bahwa kontemplasi bernilai lebih luhur karena kontemplasi bersifat ilahi, mandiri, dan mengandaikan adanya banyak waktu luang. Karena itu, pada bagian akhir *Nicomachean Ethics*, Aristoteles mengeritik seorang negarawan karena tidak mempunyai waktu luang. Klaim ini mengindikasikan ide Aristoteles bahwa warga negara yang baik hendaknya menghindari segala kegiatan, termasuk politik, yang tidak memberikan kesempatan untuk rileks karena aktivitas seperti itu akan mengurangi kebahagiaan.⁷⁰ Karena itu, menurut Aristoteles model hidup yang tertinggi dan sekaligus memberikan kebahagiaan kepada manusia adalah kehidupan intelektual.

Penekanan Aristoteles bahwa kehidupan intelektual jauh lebih tinggi dari kehidupan politik, merupakan cara khasnya untuk mengeritik pandangan orang-orang biasa yang mengidentikkan kebahagiaan dengan kesenangan dan kehormatan. Pengetahuan, kebenaran, dan teori bukanlah sesuatu yang dengan gampang dilihat secara jelas dan konkret. Sekalipun demikian, dengan mengetahui kebenaran orang akan hidup bahagia.

Aristoteles juga menolak pandangan Platonistis yang beranggapan bahwa ada sebuah kebaikan yang terpisah. Inilah ide tentang kebaikan, paling tinggi dalam hirarki, dan dari kebaikan ini, segala sesuatu yang ada di bawahnya “dirembesi” atau dijadikan baik. Kebaikan ini melampaui kebaikan-kebaikan lainnya dan sekaligus menjadikan kebaikan lain tersebut dapat diinginkan. Kita menginginkan kekayaan karena kekayaan tersebut sudah dijadikan layak atau sempurna oleh kebaikan yang terpisah tersebut. Menurut Aristoteles, kebaikan-kebaikan yang dicari memiliki kesempurnaan atau kelayakan dalam diri mereka sendiri. Mereka tidak dibuat sempurna atau layak oleh sesuatu yang lain.⁷¹ Misalnya, kesehatan, kekayaan, kesenangan, kehormatan yang dicari, dalam diri mereka sendiri “baik” dan bukannya dibuat “baik” oleh sebuah kebaikan yang terpisah. Sekalipun menolak adanya “kebaikan yang terpisah”, Aristoteles tidak serta-merta mengatakan bahwa yang kita miliki adalah kumpulan kebaikan-kebaikan, dalam arti kebaikan tertinggi (kebahagiaan) merupakan satu dari sekian banyak kebaikan.

⁷⁰ P. A. Vander Waerdt, *Op. Cit.*, hlm. 252

⁷¹ Robert Sokolowski, *Op. Cit.*, hlm. 31. Bdk. juga dengan NE 1097 a 10-13

Aristoteles mau menunjukkan bahwa ada sesuatu yang identik dalam semua kebaikan tersebut atau sesuatu yang ada dalam semua kebaikan itu.

Karena itu, Aristoteles mulai berbicara tentang kodrat kebahagiaan. Aristoteles mengawalinya dengan pengandaian tentang tujuan bahwa kalau ada beberapa tujuan dalam hidup manusia, maka yang harus dicari pertama-tama adalah tujuan paling tinggi dari semua kebaikan itu. Dan Aristoteles dengan tegas mengatakan bahwa tujuan palng tersebut adalah kebahagiaan.⁷² Sebagai tujuan terakhir, manusia akan berbuat apa saja untuk mencapai atau memperolehnya dan kebahagiaan tidak dicari untuk suatu tujuan lain yang lebih tinggi darinya. Kebahagiaan adalah kebaikan paling tinggi dan tidak ada suatu kebaikan lain yang melampauinya.

Ada dua ciri utama kebaikan tertinggi atau kebahagiaan seperti yang dijelaskan di atas.⁷³ *Pertama*, finalitas, dalam arti bahwa kebahagiaan merupakan obyek kecenderungan, di mana semua tindakan manusia tertuju atau terarah. Kebahagiaan dikejar demi kebahagiaan itu sendiri dan bukan demi sesuatu yang lain. Kebahagiaan merupakan tujuan tertinggi dan yang paling sempurna dalam dirinya sendiri sehingga dapat menyempurnakan manusia sebagai pribadi yang utuh. *Kedua*, *self-sufficient*, dalam arti bahwa kebahagiaan itu cukup dalam dirinya sendiri. Kebahagiaan merupakan sesuatu yang diinginkan dalam dirinya sendirinya. Kebaikan itu dalam dirinya mampu mengantar manusia pada tujuan yang sedang dicari. Dengan demikian, kebaikan sesuai dengan eksistensi manusia. Karena itu benar apa yang dikatakan Aristoteles bahwa proses pencaharian kebaikan berawal dari eksistensi manusia. *Self-sufficiency* tidak berarti bahwa kebahagiaan merupakan suatu kebaikan yang terpisah dari kebaikan-kebaikan lainnya, tetapi dia ada dalam semua kebaikan lain dan sekaligus berbeda dari kebaikan-kebaikan tersebut.

Kebahagiaan bukan sekedar dilihat sebagai tujuan dominan hidup seseorang, tetapi juga suatu aktivitas.⁷⁴ Karena itu Aristoteles mengaitkan pencaharian kebahagiaan dengan fungsi khas manusia. Untuk menjelaskan fungsi manusia, Aristoteles bertanya, entahkah ada suatu aktivitas khas manusiawi yang menunjukkan kekhasan fungsinya? Kekhasan ini bisa dibandingkan dengan aktivitas-aktivitas khas lain seperti seorang dokter untuk menyembuhkan, seorang guru untuk mengajar, seorang tukang kayu untuk membangun. Atau, bisa dibandingkan dengan fungsi organ-organ tubuh manusia, seperti mata untuk melihat dan telinga untuk mendengar. Lalu, apakah ada suatu aktivitas yang khas manusia sebagai manusia?

Untuk menjawab pertanyaan ini, Aristoteles mengemukakan beberapa kemungkinan.⁷⁵ *Pertama*, aktivitas yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, seperti pertumbuhan dan

⁷² NE 1098 20-23

⁷³ Sir David Ross, *Aristotle*, (London: University Paperbacks, Methuen & Co. Ltd., 1964). Hlm. 191.

⁷⁴ J. L. Ackrill, *Essays on Plato and Aristotle*, (Oxford: Oxford University Press, 1997), hlm. 182

⁷⁵ NE 1097a 1-5

perkembangan. Aktivitas ini umum untuk semua makhluk hidup karena manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan juga bertumbuh dan berkembang. Karena itu, aktivitas ini bukanlah sesuatu yang khas manusiawi. *Kedua*, aktivitas perseptif atau sensitif, dalam arti bisa merasa (marah, lapar, haus). Aktivitas ini juga bisa ditemukan dalam binatang-binatang karena itu bukan merupakan sesuatu yang khas manusiawi. *Ketiga*, aktivitas berpikir. Berpikir adalah sesuatu yang khas pada manusia karena tidak ditemukan pada makhluk hidup lainnya.

Aktivitas berpikir merupakan kekhasan manusia untuk memenuhi kebutuhan rohani manusia sebagai makhluk berakal budi. Karena itu, fungsi manusia yang sebenarnya sebagai manusia ialah melatih kesanggupan jiwa agar sesuai dengan prinsip akal budi.⁷⁶ Dalam terang ini, Aristoteles mengklaim bahwa tingkat kebahagiaan yang paling tinggi adalah kontemplasi dan berpikir karena dalam proses tersebut manusia secara eksklusif merenungkan tentang kebenaran seperti yang dituntut oleh kodratnya sendiri. Inilah kekhasan manusia kalau dibandingkan dengan hewan dan tumbuh-tumbuhan. Jadi kebahagiaan bagi manusia harus dipandang dari aspek-aspek kegiatan yang sesuai dengan kodrat manusia sebagai makhluk berakal budi.

Dalam kaitannya dengan tujuan hidup manusia, Aristoteles menegaskan bahwa kebahagiaan merupakan tujuan intrinsik karena tujuan ini muncul dari dalam diri manusia sendiri dan ditujukan demi kepuasan manusia itu sendiri. Kebahagiaan hanya mungkin ada kalau kita merealisasikan eksistensi kita sebagai manusia berakal budi secara baik. Kebahagiaan itu tidak muncul dari luar tetapi harus diusahakan manusia sendiri secara terus menerus dengan melaksanakan fungsi utamanya berpikir dan berkontemplasi. Fungsi khas manusia adalah berpikir dan berkontemplasi dan keutamaan atau keunggulan dalam melaksanakan aktivitas berpikir seperti inilah yang membawa kebahagiaan bagi manusia.

Bertolak dari pemahaman ini, Aristoteles lalu memberikan definisi kebahagiaan sebagai puncak kehidupan seseorang bila orang memenuhi fungsi-fungsi alamiahnya melalui suatu hidup yang harmonis. Dalam konteks ini kebahagiaan merupakan kebaikan yang sempurna dan final karena kebahagiaan adalah juga aktivitas jiwa sesuai dengan keutamaan.⁷⁷

Persoalan terakhir yang dibicarakan oleh Aristoteles dalam kaitannya dengan kebahagiaan adalah bagaimana kebahagiaan tersebut diperoleh? Apakah kebahagiaan merupakan hasil habituasi, atau hadiah Allah, atau suatu kebetulan? Aristoteles mengakui bahwa kalau ada hadiah-hadiah dari Allah, maka kebahagiaan merupakan salah satunya, tetapi dia menghindar untuk berbicara tentang kemungkinan ini. Kebahagiaan juga tidak bisa merupakan akibat dari

⁷⁶ NE 1098 a 8

⁷⁷ J. L. Ackrill, *Op. Cit.*, hlm. 195

suatu kebetulan karena dengan mengatakan demikian, kita menempatkan sesuatu yang paling tinggi untuk manusia di bawah tingkah laku yang aneh suatu kebetulan.

Karena itu, tampaknya Aristoteles mendukung ide bahwa kebahagiaan diperoleh lewat habituasi dan latihan yang terus menerus.⁷⁸ Kebahagiaan merupakan suatu unsur ilahi dalam diri manusia dan secara prinsipil semua manusia bisa memperolehnya lewat proses panjang. Hanya lewat proses mengaktualisasikan kemampuan rasionalnya, manusia bisa mencapai kebahagiaan. Dalam konteks ini, binatang tidak bisa memiliki kebahagiaan karena tidak mempunyai akal dan anak-anak yang masih terlalu mudah belum bisa dikatakan memiliki kebahagiaan yang sempurna karena belum mengembangkan dan mengaktualisasikan akal budinya secara penuh dan efektif. Seluruh hidup manusia dibutuhkan untuk bisa benar-benar bahagia.

Tetapi hal ini menimbulkan persoalan berkaitan dengan waktu dan kebahagiaan manusia. Kehidupan manusia berubah dan tragedi terjadi di dalamnya. Persoalannya, apakah ini berarti bahwa kita hanya bisa menikmati kebahagiaan sesudah kematian, sesudah tidak ada lagi penderitaan? Apakah tragedi bisa mempengaruhi kebahagiaan seseorang?

Aristoteles menjawab persoalan ini dengan menegaskan bahwa adalah sesuatu yang sangat paradoksial untuk mengatakan bahwa kebahagiaan hanya diatributkan kepada masa lampau. Lalu, entahkah tragedi bisa menghancurkan kebahagiaan sehingga kebahagiaan bisa berubah? Berkaitan dengan ini Aristoteles berbicara tentang permanensi sebuah tindakan baik karena dalam definisi kebahagiaan, Aristoteles menegaskan bahwa kebahagiaan adalah aktivitas jiwa yang sesuai dengan kebajikan. Kebajikan adalah sesuatu yang bertahan lama sehingga sulit dilupakan. Sekalipun tragedi datang, tragedi itu akan dilihat secara baru oleh yang baik. Kebajikan adalah suatu prinsip yang stabil dalam kehidupan manusia.

Orang yang baik tidak akan pernah melakukan apa yang jahat, sehingga dia tidak akan menderita. Sekalipun demikian, jika bencana menimpahnya, kita boleh mengatakan bahwa “orang tersebut tidak senang karena bencana tersebut, tetapi dia bisa tetap hidup bahagia. Karena itu Aristoteles menasihati manusia untuk bersikap baik karena hanya dengan kebajikan yang bersifat stabil dan permanen orang dapat menghadapi tragedi dalam hidupnya secara bijaksana.

2.1.3. Peran Kebaikan untuk Kebahagiaan

Aristoteles menegaskan bahwa orang yang bahagia adalah orang yang memiliki aktivitas yang sesuai dengan kebajikan sempurna dengan dukungan kebaikan-kebaikan eksternal untuk

⁷⁸ Robert Sokolowski, *Op. Cit.*, hlm. 32

kehidupan yang sempurna.⁷⁹ Deskripsi tentang kebahagiaan dan tujuan terakhir atau kebaikan tertinggi yang dikemukakan Aristoteles ini tampaknya sesuai dengan apa yang dimengerti oleh orang-orang biasa dan para filsuf Platonistis di atas.

Kalau demikian, apa yang membedakan ide Aristoteles dari pandangan-pandangan ini? Kebaikan adalah segala sesuatu yang pantas dikejar, diusahakan, atau dikehendaki. Sesuatu itu dikejar karena kesempurnaan yang ada pada benda itu sendiri dan kegunaannya untuk tujuan yang lebih tinggi. Untuk maksud ini, Aristoteles membedakan tiga jenis kebaikan: kebaikan eksternal, seperti uang, harta milik dan jabatan-jabatan; kebaikan internal untuk badan, seperti kecantikan dan kesehatan badan; dan kebaikan internal jiwa, seperti ingatan, inteligensi, dan kebajikan. Lalu, Aristoteles menganalisis berbagai ide tentang keutamaan manusia dan menunjukkan bahwa konsep ini sesuai dengan apa yang telah dikatakannya serta respeknya terhadap pendapat umum dan tradisi.

Aristoteles mengobservasi bahwa kehidupan yang baik adalah juga sesuatu yang menyenangkan. Berkaitan dengan ini dia membuat beberapa poin penting.⁸⁰ *Pertama*, apa yang dicintai adalah sesuatu yang menyenangkan dan tindakan bajik akan menyenangkan bagi orang yang mencintai kebajikan. *Kedua*, kesenangan yang dimiliki masing-masing orang bisa konflik satu sama lain karena mereka tidak mencintai apa yang menyenangkan dalam dirinya sendiri (secara obyektif) tetapi hanya apa yang menyenangkan untuk orang tertentu (secara subyektif). Tetapi, orang yang mencintai sesuatu yang mulia (*noble*), mencintai apa yang menyenangkan dalam dirinya sendiri sehingga akan ada keharmonisan dalam kesenangannya. Apa yang menyenangkan dalam dirinya sendiri adalah juga menyenangkan untuknya. Karena itu, kesenangan menjadi bagian dari hidupnya, bukan sesuatu yang ditambahkan dari luar. *Ketiga*, Jika orang tidak menikmati tindakan-tindakan bajik, dalam arti tidak menemukan kesenangan dalam tindakan-tindakan tersebut, dia sungguh tidak akan menjadi agen yang bajik. *Keempat*, tindakan bajik memiliki tiga ciri, seperti menyenangkan dalam diri mereka sendiri, mulia, dan baik. Dan ketiganya muncul secara bersamaan dan bukannya secara aksidental dipersatukan.

Jadi dalam terang pemikiran ini, walaupun Aristoteles menolak identifikasi kebaikan tertinggi dengan salah satu kebaikan eksternal karena sifatnya yang sementara dan tidak memiliki tujuan dalam dirinya sendiri, namun Aristoteles tidak bisa menghindari kenyataan akan pentingnya unsur-unsur ekstrinsik demi pencapaian kebahagiaan yang sempurna. Kebahagiaan membutuhkan kebaikan eksternal karena orang tidak mungkin melakukan suatu tindakan bajik kalau tidak ada sumber yang tersedia.⁸¹ Justru kebaikan ekstrinsik merupakan kondisi atau

⁷⁹ NE 1101 a 15-17

⁸⁰ NE 1099 a 1-24

⁸¹ NE 1099 b 1

prasyarat yang memungkinkan terwujudnya kebahagiaan. Beberapa contoh bisa disebutkan berikut ini.

Pertama, kekayaan. Manusia harus memiliki harta benda *secukupnya* demi mempertahankan kelangsungan hidupnya. Dengan memiliki harta secukupnya, manusia tidak terjerumus ke dalam kesengsaraan jasmaniah dan upaya penimbunan harta berlebihan dengan cara yang tak halal. Hanya dengan memiliki harta secukupnya manusia dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Kekayaan dapat mendatangkan kebahagiaan kalau orang pandai mengatur dan menggunakannya sesuai dengan tujuan yang sebenarnya. Frederick Meyer mengatakan: “Aristoteles menganggap harta milik pribadi sebagai sumber kebahagiaan karena harta mengajar orang untuk menghidupi hidup yang berbudaya dan menikmati hasil dari usahanya sendiri.”⁸²

Kedua, kesenangan. Pandangan Aristoteles tentang kesenangan merupakan jalan tengah antara dua pendapat yang sangat bertentangan yang berkembang pada waktu itu. Speusippus, pengganti Plato sebagai pemimpin Akademi, menyangkal bahwa kesenangan adalah suatu kebaikan. Sedangkan Eudoxus, seorang astronom dan murid Plato, menegaskan bahwa kesenangan adalah kebaikan tertinggi. Menurut Aristoteles, setiap orang mengejar kesenangan tapi bukan sebagai tujuan terakhir hidupnya. Kesenangan dikejar hanya sebagai prasyarat kebahagiaan yang adalah tujuan terakhir.

Aristoteles menolak hedonisme—yang mengklaim bahwa kesenangan adalah segala-galanya. Menurutnya, kesenangan bukanlah kebahagiaan, tetapi secara natural mengiringi *eudaimonia*. Kesenangan sebagai unsur batiniah melengkapi kebahagiaan seseorang. Kesenangan bukanlah syarat mutlak karena ada orang yang merasa bahagia walaupun secara fisik mereka menderita atau sangat tidak senang akibat penindasan karena keteguhan pendirian mereka. Sebaliknya rasa senang yang tidak diikuti oleh kebahagiaan batin adalah sebuah rasa senang yang semu. Kesenangan merupakan satu tanda dari orang yang bertindak luhur karena keyakinan bahwa dengan bertindak demikian ia merasa bahagia.

2.2. KEBAJIKAN

Pembicaraan tentang etika senantiasa aktual karena obyek refleksinya adalah manusia dan seluruh tingkah lakunya. Sebagai cabang ilmu, etika merefleksikan sikap serta tata adat manusia dalam kaitannya dengan norma moral yang berlaku syah dalam masyarakat. Dan, karena manusia adalah makhluk multidimensional, maka pada zaman sekarang ini muncul sekian banyak teori tentang norma yang mengatur hidup, entah sebagai pribadi ataupun anggota masyarakat tertentu. Salah satu teori yang dikembangkan pada akhir-akhir ini sebagai kritik atas

⁸² Ernest Barker, *The Political Thought of Plato and Aristotle*, Op. Cit., hlm. 75

etika teleologis⁸³ dan deontologis⁸⁴ adalah etika kebajikan, yang mendasarkan penilaian moral atas watak dan kepribadian manusia sebagai agen moral. Elizabeth Anscombe, misalnya, mengkritik pendekatan legalistik karena moralitas didasarkan pada pengertian-pengertian legalistik seperti kewajiban a priori (deontologisme) dan kewajiban a posteriori, kewajiban yang mendatangkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang (utilitarianisme). Menurutnya, jalan satu-satunya yang bisa memberikan fundasi etika ada dalam pengertian tentang kebajikan, yang dipahami terlepas dari kewajiban sebagai bagian dari kemajuan manusia (*human flourishing*).⁸⁵

Tetapi, apa sesungguhnya etika kebajikan itu sendiri? Secara umum dapat dikatakan bahwa etika kebajikan adalah teori moral yang menegaskan bahwa kita hendaknya menjalani kehidupan baik atau bertindak secara baik. Definisi ini sesungguhnya belum sempurna karena kalau dilihat dari alasan “mengapa orang harus bertindak baik”, maka bisa muncul alasan utilitarian, yaitu untuk memaksimalkan kebahagiaan atau alasan deontologis dari Kant, yaitu untuk menaati hukum moral. Karena itu, untuk menghindari hal tersebut, etika kebajikan menunjuk pada rasionalitas kebajikan itu sendiri. Pengertian kebajikan jauh lebih mendasar daripada pengertian utilitarian ataupun deontologis. Alasan utama mengapa orang tidak boleh menipu yaitu karena hal itu tidak jujur, dan bukan karena melawan hukum moral ataupun karena tidak memaksimalkan kebahagiaan. Ada dua karakter utama etika kebajikan modern yaitu penekanan pada konsep yang berpusat pada kebajikan ketimbang konsep yang berpusat pada kewajiban, serta fokusnya pada agen moral dan kehidupannya, dan bukannya pada tindakan-tindakan atau aturan-aturan yang mengatur tindakan tersebut.⁸⁶

Tidak bisa disangkal bahwa teori kebajikan Aristoteles merupakan titik tolak dan sumber inspirasi utama teori-teori kebajikan modern. Karena itu, berikut ini akan diuraikan secara detail konsep Aristoteles tentang kebajikan seperti ada dalam *Nicomachean Ethics*. Aristoteles memulai penjelasan tentang kebajikan dengan membuat kontras antara kebajikan intelektual dan

⁸³ Etika teleologis menekankan tujuan atau hasil dari perbuatan manusia. Akibat yang baik dari suatu tindakan merupakan suatu kebaikan moral, dan sebaliknya akibat yang buruk dianggap sebagai sebagai keburukan moral. Dalam kelompok ini ada hedonisme, eudaimonisme, dan juga utilitarianisme. Bdk. Roger Crisp and Michael Slote (eds.), *Virtue Ethics*, (Oxford: Oxford University Press, 1997), hlm. 1-3

⁸⁴ Menurut teori deontologis, bukan hasil perbuatan yang dinilai tetapi intensi atau apa yang ada dalam pikiran dan kehendak si pelaku. Teori ini digagaskan oleh Immanuel Kant (1724-1804). Menurut Kant, suatu kehendak dinilai baik kalau bertindak sesuai dengan apa yang seharusnya atau kewajiban. Kewajiban itu diberikan oleh akal budi praktis manusia sendiri. Akal budi praktis memberikan perintah yang bersifat mewajibkan secara mutlak kepada kehendak manusia (imperatif kategoris). Bdk. *Ibid.*, dan Immanuel Kant, *Critique of Practical Reason*, penerj. Mary Gregor, (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), hlm. 18

⁸⁵ G. E. M. Anscombe, “Modern Moral Philosophy,” dalam Roger Crisp and Michael Slote (eds.), *Virtue Ethics*, (Oxford: Oxford University Press, 1997), hlm. 26-44

⁸⁶ Roger Crisp and Michael Slote, *Op. Cit.*, hlm.2-3

kebajikan moral. Dia mengatakan bahwa kebajikan intelektual muncul melalui pengajaran dan kebajikan moral melalui habituasi.

Untuk menjelaskan perbedaan ini, Aristoteles membuat tiga poin penting berikut ini.⁸⁷ *Pertama*, kebajikan moral tidak muncul dalam diri kita secara alamiah atau berkembang secara alamiah sebab alam tidak mengisinkan perkembangan yang bertentangan dengan kodrat/alam itu sendiri, tetapi mungkin bagi kita untuk mengembangkan kejahatan—yang merupakan sesuatu yang bertentangan dengan tingkahlaku alamiah kita. Jadi, kita memperoleh kebajikan dan juga kejahatan lewat latihan. *Kedua*, berkaitan dengan kemampuan alamiah, kita pertama-tama memiliki kemampuan (*capacity*) dan kemudian aktivitas, tetapi berkaitan dengan kebiasaan, kita harus pertama-tama melaksanakan aktivitas (dibawah bimbingan orang lain) dan kemudian mencari kemampuan untuk bertindak sendiri. Keduanya, kebajikan dan ilmu, dimiliki lewat latihan atau tindakan. *Ketiga*, aktivitaslah yang menjadikan seorang agen moral itu baik atau buruk. Di sini, Aristoteles menekankan pentingnya habituasi dalam pembentukan moralitas manusia.

2.2.1. Kebajikan Moral

Aristoteles mengobservasi bahwa kita harus melihat tindakan—yang bisa merupakan hasil dari pembiasaan dan juga yang menghasilkan kebiasaan yang kita miliki. Selanjutnya dia melihat bahwa sebuah kebiasaan bisa dihancurkan oleh tindakan yang berlebihan dan yang terlalu kurang (*excessive and deficient*).⁸⁸ Kebiasaan dibentuk dan dipelihara lewat tindakan-tindakan yang tidak berlebihan atau tidak kurang tetapi yang pas-pasan. Dari sinilah muncul konsep jalan tengah (*middle way*). Aristoteles menjelaskan hubungan positif antara tindakan yang berada di tengah (antara yang berlebihan dan kurang) dan kebiasaan-kebiasaan baik. Tindakan yang merupakan jalan tengah tidak hanya membentuk kebajikan, tetapi juga merupakan pengaktualisasian kebajikan. Kebajikan adalah sebuah potensi yang diaktualisasikan dalam tindakan-tindakan yang merupakan jalan tengah.

Selanjutnya Aristoteles membedakan antara tindakan bajik dan tindakan ilmiah. Atau, antara sebuah karya seni/ilmiah dan tindakan bajik.⁸⁹ Untuk itu, Aristoteles mengemukakan bahwa ada tiga ciri utama yang harus diperhatikan, antara lain: Entahkah tindakan itu dibuat secara sadar—dalam arti orang tahu apa yang dia buat; Entahkah tindakan itu dipilih dalam dan untuk tindakan itu sendiri; dan entahkah tindakan itu dilakukan karena sebuah disposisi yang permanen atau tetap.

⁸⁷ Robert Sokolowski, *Op. Cit.*, hlm. 6

⁸⁸ NE 1104 a 12-19

⁸⁹ NE 1105 a 15-1105 b 15

Bertolak dari ketiga kriteria tersebut, Aristoteles lalu menegaskan bahwa tindakan ilmiah lebih bersifat eksternal karena yang terpenting untuk sebuah tindakan ilmiah adalah bahwa tindakan tersebut terlaksana secara baik dan dilaksanakan sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki. Pengetahuan adalah ciri yang paling pertama: kita tahu apa yang kita lakukan. Misalnya, ketika membuat sebuah meja, kita harus tahu apa yang kita lakukan. Persoalan tentang entahkan tindakan ilmiah dibuat demi tujuan dalam dirinya sendiri, bukanlah hal yang penting. Kita bisa melakukan sesuatu demi uang atau ketenaran atau untuk menyenangkan orang lain. Dan, entahkan perbuatan itu sesuatu yang permanen atau tidak, bukanlah ciri yang penting. Kita bisa menghasilkan sebuah karya seni pada saat tertentu karena nasib baik.

Sebaliknya tindakan bajik mengandaikan bahwa ciri “dilakukan dengan sadar” adalah suatu keharusan tetapi tidak terlalu penting. Ini hanyalah suatu syarat untuk menjadikan tindakan tersebut menjadi milik kita, dan bukannya karena disuruh atau dipaksa oleh orang lain. Kita harus tahu bahwa apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang baik. Ciri “tindakan harus dilakukan demi tindakan itu sendiri” merupakan ciri yang paling penting karena kalau kita melakukan tindakan tersebut demi tujuan lain seperti kehormatan, uang, atau nama baik, maka tindakan tersebut kurang bajik. Ciri “tindakan tersebut harus keluar dari sebuah karakter yang kuat dan stabil dan bukannya karena kebetulan atau dilakukan sekali saja” merupakan ciri yang paling penting dan utama. Jika kita melakukan sesuatu yang murah hati, tetapi kalau kita bukanlah seorang yang murah hati, tindakan kita itu baik tetapi belum bisa dikategorikan sebagai tindakan bajik karena tindakan bajik harus keluar dari sebuah karakter yang permanen. Karena itu, orang tidak bisa menjadi bajik pada waktu yang singkat. Kalau orang tiba-tiba melakukan tindakan murah hati—kita masih bisa mempertanyakan motivasi di baliknya, apa tujuannya. Misalnya, hanya ketika menjelang pemilu, kontestan membagi-bagi uang kepada pemilih, maka dia bukanlah seorang yang murah hati. Dia melakukan hal itu dengan tujuan untuk memperoleh dukungan pemilih.

Sesudah membuat observasi awal ini, Aristoteles lalu berusaha memberikan definisi tentang kebajikan moral. Menurutnya, ada tiga elemen utama dalam jiwa manusia, yaitu emosi atau perasaan (*passion/pathos*): perasaan senang atau sakit; kemampuan (*power/dynamis*): kemampuan alamiah untuk merasakan sesuatu seperti marah atau takut; dan disposisi (*disposition/hexis*): cara kita dilatih dan dibentuk untuk mengalami sesuatu, entah yang baik atau yang buruk.⁹⁰

Dalam mendefinisikan kebajikan, Aristoteles memperhatikan, dari ketiga elemen tersebut di atas, apa yang menjadi *genus*—umum--untuk kebajikan. Menurutnya, perasaan tidak dapat menjadi *genus* untuk kebajikan karena kebajikan dan kejahatan tidak terdapat dalam perasaan.

⁹⁰ NE 1105 b 20-1106 a 14

Perasaan dalam dirinya sendiri tidak membuat kita baik atau buruk. Kenyataannya, kita tidak memilih perasaan sebagai perasaan. Perasaan hanyalah bagian dari keberadaan kita sebagai makhluk rasional. Kemampuan juga tidak dapat menjadi *genus* karena kebajikan dan kejahatan tidak terdapat dalam kemampuan untuk mengalami perasaan. Karena itu Aristoteles berkesimpulan bahwa disposisi merupakan *genus* dari kebajikan. Kebajikan ditemukan dalam cara kita membentuk diri kita dalam menghadapi perasaan, yang menjadi pusat uraian tentang kebajikan.

Dengan analisis ini, Aristoteles tiba pada kesimpulan sementara bahwa kebajikan dikategorikan ke dalam *genus*-disposisi. Tetapi, apa yang menjadi kekhasan disposisi tersebut? Aristoteles mendiskusikan persoalan ini dengan membedakan antara barang yang aktif dan aktivitas dari barang tersebut. Kebajikan atau keutamaan menyempurnakan sesuatu dan menjadikan barang tersebut berfungsi secara baik pula. Jadi, kebajikan menyempurnakan keduanya: barang yang aktif dan aktivitas barang tersebut.

Kemudian Aristoteles mengembangkan beberapa ide menarik berkaitan dengan rangkaian atau kesinambungan yang tak terbatas jumlahnya.⁹¹ Tindakan dan perasaan manusia merupakan suatu rangkaian dan sangat mungkin bagi kita untuk membagi rangkaian itu pada beberapa fase atau poin yang jumlahnya bisa tak terbatas. Tetapi beberapa dari fase akan membentuk sebuah “pertengahan” antara dua ekstrem. Ada fase yang menjadi titik tengah antara titik yang satu dengan yang lainnya. Dan pertengahan itu sendiri harus dibedakan antara ***titik tengah dalam barang itu sendiri*** atau ***titik tengah untuk kita***. Titik tengah dalam diri barang itu sendiri, misalnya dalam matematika: 2 merupakan titik tengah antara 1 dan tiga, dsb., sementara titik tengah untuk kita bukanlah titik tengah matematis. Titik tengah untuk kita lebih merupakan titik tengah moral. Karena itu, titik tengah moral tidak memiliki ketepatan matematis tetapi tergantung dari pribadi, siapakah pribadi tersebut. Agen dan kondisi hidupnya dipertimbangkan dalam menentukan titik tengah sebuah tindakan pribadi tersebut.

Kenyataan menunjukkan bahwa ada kemungkinan setiap tindakan manusia bisa menjadi buruk oleh karena dilakukan terlalu banyak atau terlalu kurang (*excess and defect*) yang merupakan ekstrim dari tindakan manusia itu. Ekstrim adalah sesuatu yang eviden, bisa dikenal secara mudah. Ekstrim sering kali muncul dalam kaitan dengan perasaan manusia (senang atau susah) dan juga berkaitan dengan aktivitas-aktivitas lainnya. Misalnya, ketika latihan fisik, kita bisa dengan jelas mengatakan bahwa latihan fisik orang tertentu terlalu berlebihan atau terlalu kurang; atau ketika makan, orang makan nasi terlalu banyak atau terlalu kurang. Atau, berhubungan dengan perasaan takut: ada dua ekstrim yang muncul, takut yang berlebihan (penakut) dan tidak ada rasa takut sama sekali sehingga orang bertindak secara tergesa-gesa ketika berhadapan langsung dengan sesuatu (*rashness*).

Bertolak dari uraian di atas Aristoteles lalu mengatakan bahwa kebajikan moral diperoleh dari proses pembiasaan atas sikap moral yang baik yang ada dalam diri manusia itu sendiri. Yang

⁹¹ Robert Sokolowski, *Op. Cit.*, hlm 7-8

terpenting bukanlah mengetahui apa itu kebajikan tetapi menjadi baik dalam praksis. Kualitas moral bisa hilang kalau ada ekkses atau defisiensi dalam proses aktualisasinya. Karena itu dibutuhkan jalan tengah. Tindakan memilih jalan haruslah merupakan suatu kebiasaan permanen dan menyatu dengan kepribadian orang tersebut. Dalam konteks ini Aristoteles melukiskan kebajikan moral sebagai suatu karakter permanen yang memungkinkan manusia untuk memilih jalan tengah antara kedua ekstrim: ekkses dan defisiensi.

Masalahnya, jalan tengah bersifat relatif dan subyektif karena tidak memiliki ukuran matematis yang universal dan absolut. Karena itu peran akal budi sangat penting dan kebajikan intelektual kebijaksanaan praksis (*phronesis*) membantu kita dalam menentukan jalan tengah tersebut. Kebijaksanaan praktis merupakan kemampuan yang memungkinkan manusia mengatakan sesuatu itu baik atau buruk. Ia menyempurnakan pengetahuan manusia sejauh pengetahuan itu diarahkan pada sesuatu yang bisa diterapkan dalam kehidupan konkret manusia. Melalui *phronesis*, rasionalitas menjiwai emosi dan tindakan manusia. Karena itu, *phronesis*lah yang memungkinkan manusia memilih jalan tengah yang tepat. Seorang yang bijaksana adalah orang yang menentukan jalan tengah antara kedua ekstrim dengan mempertimbangkan situasi konkretnya. Karena itu dalam menentukan jalan tengah hendaknya dipertimbangkan apa kata orang bijaksana. Atau, jalan tengah ditentukan sebagaimana orang bijaksana dalam praksis menentukan itu.

Dari semua analisis di atas, Aristoteles lalu sampai pada definisi kebajikan moral. Menurutnya, kebajikan moral adalah suatu karakter permanen, disposisi yang berkaitan dengan pilihan dan yang memungkinkan manusia untuk memilih jalan tengah antara kedua ekstrim: ekkses dan defisiensi; jalan tengah seperti yang ditentukan oleh prinsip rasionalitas atau seperti yang ditentukan oleh orang-orang yang memiliki kebijaksanaan praktis.”⁹² Dalam kebajikan kita berhubungan dengan perasaan dan juga tindakan. Seorang baik merasa senang, marah, atau takut, tetapi mereka mengalami hal-hal itu secara benar dan tepat karena perasaan mereka telah dibentuk dan diintegrasikan secara tepat ke dalam intelek atau akal budi.

2.2.2. Kebajikan Intelektual

Diskusi Aristoteles tentang kebajikan intelektual bertolak dari kenyataan bahwa orang dikatakan baik kalau tindakannya sesuai dengan prinsip-prinsip benar yang merupakan hasil kerja akal budi dan bahwa kebahagiaan manusia dalam arti kegiatan jiwa mencapai kesempurnaannya, tidak terlepas dari peran intelek itu sendiri.⁹³

⁹² NE 1107 a 1-3

⁹³ Sir David Ross, *Op. Cit.*, hlm. 215

Diskusi Aristoteles tentang kebajikan intelektual merupakan penyempurnaan terhadap penjelasan Plato yang melihat kebajikan dalam tingkah laku seseorang yang dimotivasikan oleh akal budi dan sekaligus kritik terhadap kaum sofis yang menganggap diri sebagai orang bijaksana karena keahlian retorik mereka. Plato dan kaum sofis lebih memfokuskan diri pada pemikiran yang murni kontemplatif.

Menurut Aristoteles, harus ada pemikiran yang benar dan sekaligus keinginan yang benar untuk menghasilkan suatu tindakan baik, dan karena kehendak dan pemikiran muncul dari karakter dan akal budi, maka keduanya dibutuhkan untuk memulai suatu tindakan.⁹⁴ Jika akal budi diisolasi dalam dirinya sendiri, maka manusia bukanlah asal mula tindakan. Pikiran dalam dirinya sendiri hanya mengetahui dan tidak bergerak ke dalam tindakan. Yang dibutuhkan adalah kombinasi akal budi dan kehendak, atau kehendak yang dipenetrasi oleh akal budi sehingga tindakan tersebut sungguh-sungguh manusiawi. Jadi, Aristoteles memperluas pandangan Plato dan kaum sofis di atas dengan penekanan pada peranan intelek secara keseluruhan. Karena itu dia mendefinisikan kebajikan intelektual sebagai disposisi yang memungkinkan seseorang untuk dapat berkontemplasi tentang kebenaran-kebenaran utama dan sekaligus mengaplikasikan prinsip itu dalam tindakan dan tingkah laku konkret.⁹⁵

Berbeda dengan kebajikan moral yang menekankan peran perasaan, kebajikan intelektual justru menekankan peran intelek. Untuk itu kita harus hakikat intelek atau akal budi. Intelek adalah kekhasan manusia sebagai makhluk rasional. Intelek mengangkat manusia setaraf lebih tinggi dari makhluk hidup lainnya. Secara kodrati tindakan intelek berbeda dengan kehendak. Kegiatan intelek berobyekkan kebenaran—kesesuaian antara ide dan realitas, sedangkan obyek kehendak adalah kebaikan. Jadi, ada dua kesanggupan utama akal budi, yaitu kesanggupan ilmiah dan praktis. Kesanggupan teoretis atau ilmiah memungkinkan akal budi untuk memahami dan merenungkan obyek-obyek pengetahuan yang pasti dan absolut (*theoria*), sedangkan kesanggupan praktis yang memungkinkan akal menerapkan kebenaran-kebenaran teoretis dalam situasi-situasi konkret atau memberikan petunjuk supaya orang mengetahui apa yang harus diputuskan dalam keadaan tertentu (*praxis*).⁹⁶

Kedua kesanggupan ini menghasilkan kebijaksanaan. Aristoteles membedakan dua macam kebijaksanaan, yaitu praktis dan teoretis. Kebijaksanaan praktis merupakan terjemahan dari kata Yunani, *phronesis*, yang diartikan sebagai kemampuan untuk membuat pertimbangan, bukan tentang bagaimana sesuatu dibuat atau dihasilkan, tetapi tentang hal-hal yang baik untuk diri seseorang, yaitu bagaimana menghasilkan suatu kondisi menyeluruh yang akan memuaskan

⁹⁴ NE 1139 a 18-1139 b 10

⁹⁵ NE 1141 a 5-8

⁹⁶ Sir David Ross, *Op. Cit.*, hlm. 215

manusia.⁹⁷ Dalam arti ini kebijaksanaan tidak boleh direduksikan hanya sebatas kepandaian atau keahlian intelektual semata-mata. *Phronesis* merupakan keahlian yang diterapkan dalam tindakan konkret sesuai dengan norma yang berlaku syah, atau kebajikan intelektual untuk mengaplikasikan prinsip umum moralitas dalam situasi konkret. Dalam konteks ini, kebajikan praktis diartikan sebagai kondisi jiwa yang memungkinkan orang untuk menyatakan secara tepat hal-hal konkret mana yang boleh dipilih karena dianggap baik untuk hidup. Dalam kaitan dengan kebajikan moral, dia merupakan kriteria tertinggi untuk menentukan jalan tengah dari suatu tindakan moral.

Sedangkan kebijaksanaan teoretis (*sophia/wisdom*) merupakan kegiatan spekulatif yang dengannya intelek manusia mengetahui kebenaran. Menurut Aristoteles, keadaan memandang kebenaran merupakan sesuatu yang membahagiakan dan merupakan kebaikan paling tinggi bagi manusia. Kebijaksanaan teoretis merupakan penyatuan antara ilmu dan intuisi yang terarah kepada obyek yang tertinggi.⁹⁸ Pada umumnya kebijaksanaan teoretis hanya dimiliki oleh orang terpelajar, yang memiliki keahlian khusus. Karena itu tidak mengherankan kalau Aristoteles mengatakan bahwa kebodohan merupakan kendala utama orang menjadi bijaksana. Persoalannya, entahkah ada kebijaksanaan yang *per se* murni, seperti diklaim oleh kaum sofis. Mereka menyebut diri bijaksana karena tahu secara pasti apa yang baik bagi diri mereka dan bagi kepentingan banyak orang. Memang benar, seorang yang bijaksana hendaknya memiliki pengetahuan a priori tentang suatu prinsip ilmiah sebelum diterapkan dalam realitas. Sebelum menggunakan suatu prinsip orang harus sungguh yakin bahwa prinsip itu benar dalam dirinya.⁹⁹

Jadi, kedua kebijaksanaan tidak bisa terlepas satu sama lain secara absolut. Sekalipun demikian, tanpa mengabaikan peran pengetahuan ilmiah, Aristoteles lebih lanjut menegaskan bahwa unsur yang menyebabkan seseorang mengikuti satu garis kebijaksanaan tertentu bukanlah adanya beberapa standar abstrak yang dimanifestasikan dalam satu visi kontemplatif, melainkan pilihan-pilihan konkret yang dilakukan setiap hari kalau orang berhadapan dengan realitas tertentu. Memang, selalu ada kecenderungan untuk mencari satu tujuan supernatural yang menurut Aristoteles terlalu idealistis dan tak berguna banyak untuk kesempurnaan eksistensinya di dunia, karena obyek pencaharian itu melampaui kodrat manusia. Hal ini tidak berarti bahwa Aristoteles mengabaikan kebijaksanaan teoretis karena dengan menegaskan pentingnya kebijaksanaan praktis untuk menentukan tindakan konkret, orang sekaligus menegaskan adanya kebenaran di balik semua pilihan dan pertimbangan. Bagi manusia, berpikir merupakan sesuatu yang sangat luhur.

⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 217

⁹⁸ Alasdair McIntyre, *After Virtue*, (London: Duckworth, 1985), hlm. 156

⁹⁹ NE 1141 a 17

Dalam relasi keduanya, kebijaksanaan mana yang lebih dahulu ada? Sangat sulit untuk mengklarifikasikan hubungan ini karena dilihat dari obyeknya, jelas bahwa kebijaksanaan teoretis lebih tinggi dari kebijaksanaan praktis karena dia berurusan dengan prinsip-prinsip atau teori-teori universal (keadilan, kebaikan). Tetapi justru sebaliknya kalau dilihat dari aplikasinya, karena kebijaksanaan praktis memungkinkan manusia untuk menerapkan prinsip itu dalam kehidupan konkret demi kebahagiaan. Berkaitan dengan poin terakhir ini muncul persoalan, bagaimana mungkin kebijaksanaan teoretis diatur oleh kebijaksanaan praktis?

Aristoteles menjawab persoalan ini dengan menegaskan beberapa hal berikut ini.¹⁰⁰ *Pertama*, kebijaksanaan teoretis dan praktis dalam diri mereka sendiri adalah sesuatu yang baik sehingga layak dikejar. *Kedua*, kebijaksanaan praktis dapat menghasilkan kebahagiaan, tetapi bukan seperti ilmu medis yang menghasilkan kesehatan secara langsung dari agen (dokter) kepada pasien. Kebijaksanaan teoretis adalah penyebab final dan bukanlah penyebab efisien. Kebijaksanaan teoretis hanya menarik orang karena kesempurnaannya. *Ketiga*, kebijaksanaan teoretis memungkinkan manusia untuk memenuhi fungsi jiwanya dalam mencapai tujuan tertinggi hidupnya. Kebijaksanaan teoretis memungkinkan orang untuk menentukan tujuan yang tepat untuk dikejar dan kebijaksanaan praktis memungkinkan orang untuk memilih jalan yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. *Keempat*, kebijaksanaan praktis dapat dikatakan mengatur kebijaksanaan teoretis, bukan dalam arti kebijaksanaan praktis menggunakan kebijaksanaan teoretis, tetapi lewat menyediakan sarana bagi terealisasinya kebijaksanaan teoretis. Ilmu kedokteran mengatur kesehatan manusia tetapi bukan dalam arti kedokteran menggunakan kesehatan itu tetapi dengan menyediakan kondisi yang tepat agar kesehatan tersebut direalisasikan.

2.3. CATATAN KRITIS

2.3.1. Tentang Kebahagiaan sebagai Kebaikan Tertinggi

Dari konsep Aristoteles tentang kebahagiaan sebagai kebaikan tertinggi seperti diuraikan di atas, ada beberapa poin yang perlu diklarifikasikan untuk menghindari kesalahpahaman dalam membaca maksud Aristoteles. *Pertama*, adanya pendapat yang mengatakan bahwa ada inkonsistensi atau konflik internal dalam pandangan Aristoteles tentang kebahagiaan. Inkonsistensi muncul karena, di di satu pihak, khususnya dalam buku I NE, Aristoteles berpendapat bahwa kebaikan-kebaikan eksternal, seperti kesenangan, kekayaan, kehormatan, dan kebajikan, dalam diri mereka sendiri bukanlah kebahagiaan, tetapi mereka merupakan kondisi atau prasyarat utama kebahagiaan itu sendiri. Atau dengan kata lain, ada unsur-unsur dalam

¹⁰⁰ Robert Sokolowski, *Op. Cit.*, hlm. 18

kebaikan-kebaikan eksternal tersebut yang memungkinkan terciptanya kebahagiaan dalam diri manusia.

Di pihak lain, dalam buku X NE, Aristoteles memberikan sebuah deskripsi baru tentang kebahagiaan, yang mengaburkan konsep pertama dalam buku I. Dia mengatakan bahwa kebahagiaan sempurna terdiri atas aktivitas intelektual yang disebut kontemplasi (*theoria*). Di sini, dapat diinterpretasikan bahwa kebahagiaan terdiri atas aktivitas kontemplasi saja. Interpretasi seperti ini dibuat oleh Martha C. Nussbaum, misalnya, yang menafsirkan ide kebahagiaan Aristoteles dengan menekankan bahwa hanya kontemplasi saja yang memiliki nilai intrinsik, sehingga yang bisa disamakan dengan kebahagiaan hanyalah kontemplasi.¹⁰¹ Atau, John Cooper menafsirkan bahwa manusia diidentifikasi dengan kemampuan akal budi teoretisnya dan bahwa semua kebaikan, selain kontemplasi, merupakan sesuatu yang asing bagi manusia.¹⁰² Dengan ini jelas bahwa hanya aktivitas kontemplasi yang bisa diidentifikasi dengan kebahagiaan. Apakah dengan ini Aristoteles mempertentangkan dirinya sendiri karena konsep ini bertentangan dengan apa yang dikatakan dalam buku I?

Menurut tafsiran Richard Kraut, sesungguhnya tidak ada konflik internal dalam konsep Aristoteles tentang kebahagiaan. Pembicaraan tentang kebahagiaan dalam buku I dan X membentuk satu kesatuan.¹⁰³ Aristoteles menggunakan dua cara dalam menjawab pertanyaan apa itu kebahagiaan. Menurut jawaban terbaik pertama, kebahagiaan terdiri dari hanya satu kebaikan, yaitu aktualisasi bagian teoretis dari akal budi, yang disebut *theoria*. Semua kebaikan lain (termasuk kebajikan etis) diinginkan demi aktivitas yang satu ini. Sedangkan menurut jawaban terbaik kedua, kebahagiaan terdiri atas aktivitas praktis yang baik, pelaksanaan kebajikan-kebajikan seperti kebesaran jiwa, keberanian, keadilan, pengendalian diri, kebijaksanaan praktis, dan lain-lain. Sama seperti semua kebaikan dalam kehidupan terbaik diinginkan demi kontemplasi, demikian halnya dengan semua kebaikan dalam kehidupan terbaik kedua, diinginkan demi aktivitas yang sesuai dengan kebajikan praktis.

Dengan kata lain, Aristoteles menghadirkan dua model bagaimana seseorang harus menjalani hidupnya, yaitu seorang hendaknya menjadi filsuf (seseorang yang mendeosikan dirinya untuk melaksanakan kebajikan-kebajikan teoretis) atau seorang negarawan¹⁰⁴ (seorang yang mendeosikan diri di atas segalanya untuk melaksanakan secara penuh kebajikan moral. Jika seseorang memilih opsi pertama dan situasi memungkinkan, maka dia memperoleh

¹⁰¹ Bdk. Martha C. Nussbaum, *The Fragility of Goodness: Luck and Ethics in Greek Tragedy and Philosophy*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1986), hlm. 375-376.

¹⁰² John Cooper, "Contemplation and Happiness: A Reconsideration," dalam *Synthese* 72, 1987, hlm. 180

¹⁰³ Richard Kraut, *Aristotle on the Human Good*, (Princeton: Princeton University Press, 1989), hlm. 5

¹⁰⁴ Negarawan dan politikus sering kali digunakan secara bergantian karena keduanya merupakan terjemahan dari istilah Aristoteles sendiri *politikos*. Kata Yunani ini dapat menunjuk secara luas kepada setiap orang yang memainkan peran utama dalam urusan-urusan civic. Jelas bahwa orang yang menjalani kehidupan terbaik kedua masuk dalam kategori negarawan.

kebahagiaan sempurna (*perfect happiness*); jika seseorang memilih yang kedua, maka dia akan bahagia dalam cara kedua. Hal itu berarti bahwa aktivitas-aktivitas lain di luar aktivitas filosofis dan politis, tidak dapat dijadikan model bagaimana seseorang menghidupi hidupnya ke tingkat yang bahagia.

Untuk mendukung interpretasi ini, Richard Kraut menginterpretasikan maksud Aristoteles dengan menekankan bahwa kebaikan bagi hidup manusia dilokasikan dalam sebuah hirarki yang memiliki tujuan satu-satunya pada puncaknya. Pada deretan paling bawah dari hirarki ada kebaikan seperti kekayaan dan kesenangan yang diinginkan hanya dengan persyaratan bahwa kebaikan tersebut membimbing kepada kebaikan-kebaikan lain yang lebih tinggi. Di atasnya, ditempatkan kebaikan seperti kehormatan, yang diinginkan dalam dirinya sendiri, sekalipun tidak bisa diidentifikasi sebagai kebahagiaan karena masih ada kebaikan lain yang lebih tinggi, yaitu aktivitas-aktivitas etis, kebaikan yang secara intrinsik diinginkan.

Masing-masing kebaikan pada level bawah layak dipilih demi beberapa kebaikan yang ada di atasnya. Dari kenyataan bahwa kebaikan pertama diinginkan demi kebaikan lainnya, maka Aristoteles menyimpulkan bahwa kebaikan kedua lebih diinginkan ketimbang kebaikan pertama,¹⁰⁵ dan sebagai akibatnya kebaikan yang ada pada puncak haruslah merupakan tujuan paling baik atau kebaikan tertinggi dalam hirarki tersebut. Kalau kita memperhatikan pelokasian kebaikan-kebaikan tersebut di atas, maka jelas terlihat bahwa aktivitas-aktivitas etis—yang merepresentasikan kehidupan politik—ada pada puncak hirarki. Aktivitas etis ini secara tepat dapat diidentifikasi dengan kebahagiaan dalam terang jawaban terbaik kedua, di mana kebahagiaan muncul sebagai akibat dari pelaksanaan kebajikan-kebajikan moral dalam kehidupan publik.

Bagi orang yang memilih untuk menjadi negarawan, pelaksanaan kebajikan-kebajikan moral sudah cukup, tetapi bagi seorang yang memilih model hidup terbaik pertama, filsuf, hal itu belumlah cukup. Karena itu harus ditambah satu level lagi di atas aktivitas etis, yaitu aktivitas kontemplasi. Justru kontemplasi inilah yang ada pada puncak hirarki, di atas aktivitas bajik (etis).¹⁰⁶ Menurut interpretasi ini, kehidupan filosofis adalah model kehidupan dari seorang yang baik, yaitu seorang yang memiliki dan melaksanakan kebajikan-kebajikan moral. Orang yang tidak baik secara moral, tidak memiliki peluang untuk mencapai kebahagiaan sempurna.

Sekalipun seseorang harus memutuskan entahkah menjadi seorang pemimpin teoretis atau praktis, ada kebaikan-kebaikan standar tertentu yang dibutuhkan, yaitu kebajikan keadilan, keberanian, kebijaksanaan praktis, dan lain-lain. Karena kebajikan-kebajikan ini sangat penting dimiliki oleh kedua model hidup (negarawan dan filsuf) secara bersama-sama, maka kesemuanya mendapat perhatian utama dari Aristoteles. Inilah yang dibicarakan Aristoteles dalam *Nicomachean Ethics*, yang adalah sebuah karya politik karena fokusnya pada kualitas-kualitas

¹⁰⁵ NE 1094 a 18-22

¹⁰⁶ Richard Kraut, *Op. Cit.*, hlm. 5-6

yang harus dimiliki oleh semua warga negara. Demi kepentingan aktivitas teoretis—semua kebaikan lain diinginkan untuknya—itulah ideal opsional: seseorang dapat hidup baik tanpa harus menjadi seorang filsuf.

Namun, itu tidak berarti bahwa pembelaan Aristoteles atas kehidupan filosofis dalam buku X semata-mata sebuah tambahan yang dengan gampang diabaikan. Sebaliknya, jika kita salah membaca segmen terakhir ini, dan gagal untuk melihat bagaimana kesinambungannya dengan pembicaraan tentang kebahagiaan pada bab I, maka kita akan banyak menyeleweng. Secara khusus, kita akan gagal untuk melihat mengapa Aristoteles berpikir bahwa kebajikan-kebajikan moral bernilai dalam diri mereka sendiri.

Richard Kraut menunjukkan bahwa pembelaan Aristoteles atas kehidupan filosofis seiring dengan pembelaannya atas kebajikan-kebajikan praktis. Aristoteles sesungguhnya mengintelektualisasikan kebajikan-kebajikan seperti keberanian, kemurahan hati, dan keadilan, serta menganggap mereka sebagai aproksimasi (*approximations*) dari kebajikan teoretis.¹⁰⁷ Tujuan tertinggi dari kehidupan manusia dan fungsi yang tepat dari manusia adalah menggunakan akal budi secara baik. Tujuan ini dapat dicapai lewat dua cara, yaitu secara ideal lewat menghidupi kehidupan filosofis dan menjadikan kontemplasi sebagai tujuan tertinggi. Tetapi, jika opsi ideal ini tidak bisa diambil, maka orang melakukan dengan mengembangkan secara penuh kebajikan praktis dan melakukan itu dalam skala besar di arena publik. Inilah dasar bersama yang menyatukan kedua model hidup ini.

Kedua, ada pendapat yang mengatakan bahwa Aristoteles memiliki pandangan yang inklusif tentang kebahagiaan. Hal ini bertolak dari perkataan Aristoteles sendiri: “Kebaikan yang ada dalam dirinya sendiri dan tidak membutuhkan kebaikan lain, membuat kehidupan layak dipilih. Kebaikan itulah yang disebut kebahagiaan.”¹⁰⁸

Kutipan di atas mau menunjukkan bahwa Aristoteles tampaknya mengatakan, kebahagiaan manusia tidak membutuhkan kebaikan lain sebab kebahagiaan sudah mengandung semua komponen dari kebaikan intrinsik, atau semua yang dapat dimasukkan ke dalam kehidupan tunggal.¹⁰⁹ Kebahagiaan adalah kebaikan yang paling layak dipilih karena struktur inklusifnya, yaitu semua kebaikan intrinsik yang membentuknya termasuk di dalamnya, sehingga tidak ada cara untuk membuatnya lebih diinginkan dengan menambahkan sesuatu yang lain padanya. Inilah tafsiran yang dikenal dengan inklusivisme.

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm 7

¹⁰⁸ NE1097 b 14-20.

¹⁰⁹ Pandangan ini diperkenalkan antara lain oleh J. L. Ackrill, yang menafsirkan pernyataan Aristoteles di atas bahwa tampaknya Aristoteles mengatakan bahwa kebahagiaan terdiri atas semua kebaikan intrinsik, atau semua yang dapat dicocokkan ke dalam kehidupan tunggal. Bdk. J. L. Ackrill, “Aristotle on Eudaimonia”, dalam *Essays on Aristotle's Ethics*, Amelie Oksenberg Rorty, (ed.), (Berkeley: University of California Press, 1980), hlm. 17-33

Menurut Richard Kraut, tafsiran inklusif ini didasarkan pada kekeliruan membaca kutipan di atas dan beberapa teks lain.¹¹⁰ Pandangan Aristoteles tentang kebahagiaan bukanlah sebuah inklusivisme karena bertentangan dengan apa yang ditegaskan dalam buku I, dan juga tidak mempunyai dasar yang kuat dalam buku X. Tesis utama buku I adalah bahwa kebahagiaan terdiri atas sebuah sketsa panjang aktivitas sempurna dari jiwa rasional karena Aristoteles mengatakan bahwa kebahagiaan adalah aktivitas jiwa yang sesuai dengan kebajikan sempurna.¹¹¹ Satu kebaikan dianalisis ke dalam beberapa bagian karena Aristoteles membedakan beberapa jenis kebajikan sempurna dari jiwa rasional. Tetapi, kebahagiaan bukanlah gabungan dari kebaikan intrinsik. Misalnya, kebahagiaan tidak mencakupi kesenangan fisik, kehormatan, atau persahabatan.

Sekalipun inklusivisme diterima secara luas, tetapi penafsiran tersebut akan membahayakan pemahaman kita tentang kebahagiaan dalam buku I dan X dan menghalangi kita untuk menangkap peran sentral dari aktivitas bajik dalam teori Aristoteles. Aristoteles berpikir bahwa untuk menghidupi hidup kita secara baik, kita membutuhkan lebih dari sebuah daftar kebaikan intrinsik. Kita harus menentukan mana dari semua kebaikan itu yang paling layak dan bagaimana masing-masingnya dikejar. Cara Aristoteles menekankan pengaturan tujuan manusia adalah dengan mengatur tujuan kita dalam sebuah hirarki dan menempatkan aktivitas bajik (entah teoretis atau praktis) pada puncak hirarki. Kebahagiaan adalah tujuan, deminya semua kebaikan yang lain diinginkan. Kebahagiaan terdiri hanya atas aktivitas bajik dan bukanlah gabungan dari semua kebajikan intrinsik.

Karena kebahagiaan terdiri hanya atas aktivitas bajik, kebahagiaan tidak akan bertambah atau berkurang dengan memiliki kebaikan lainnya. Dan karena kebahagiaan sempurna terdiri atas kontemplasi, tidak ada batas dari aktivitas ini. Tidak ada aktivitas yang lebih filosofis dari apa yang diinginkan. Lebih lanjut Aristoteles mengatakan bahwa aktivitas moral memiliki prioritas ini atas kebaikan-kebaikan lain di bawahnya. Kalau kita membandingkan dua model hidup yang bukan filosofis, maka kita akan mengatakan bahwa kehidupan etis lebih membahagiakan. Kebahagiaan tidak terdiri atas salah satu dari kebaikan yang lebih rendah. Sama seperti kebahagiaan sempurna terdiri atas atas kontemplasi sendirian, demikian juga bentuk kedua dari kebahagiaan terdiri atas aktivitas etis sendirian.

2.3.2. Relasi antara Kebahagiaan dan Kebajikan serta Penilaian Aristoteles atas Politik

Aristoteles mengaitkan konsep kebahagiaan dengan kebajikan. Kebajikan sebagai suatu kemampuan eksistensial untuk berperilaku secara baik bisa terjadi dalam kaitannya dengan emosi atau karakter manusia. Inilah yang dikenal dengan kebajikan moral, yang berkaitan erat

¹¹⁰ Richard Kraut, *Aristotle on the Human Good*, *Op. Cit.*, hlm. 8

¹¹¹ NE 1100a 4. 1101 a 14-15.

dengan seorang individu dalam interaksi sosialnya dengan orang lain. Tetapi, ada juga kebajikan yang terjadi dalam kaitannya dengan intelek atau aktivitas intelektual. Inilah yang dikenal dengan kebajikan intelektual. Menurut Aristoteles kebajikan intelektual lebih bernilai karena melibatkan bagian terbaik dalam diri manusia yaitu intelek. Lebih dari itu, aktivitas intelektual seperti kontemplasi atau *theoria* merupakan suatu aktivitas yang dilakukan demi dirinya sendiri. Tidak ada tujuan lain yang lebih tinggi yang dikejar oleh aktivitas tersebut. Bertolak dari kedua fakta ini kontemplasi merupakan suatu aktivitas ilahi, mandiri, dan sangat rileks.¹¹² Inilah juga kriteria-kriteria untuk hidup yang baik dan bahagia. Dalam konteks ini, Aristoteles mengklaim bahwa kebajikan intelektual lebih bernilai ketimbang kebajikan moral.

Persoalannya, bagaimana hubungan antara kebajikan intelektual dan kebajikan moral karena tidak ada indikasi bahwa orang yang mampu berfilsafat bakal mampu mensubordinasi semua aktivitas--termasuk praktek kebajikan moral--sebagai sarana untuk mencapai tujuan lainnya. Atau ketika berdiskusi tentang kebajikan moral tidak ada isyarat bahwa orang yang sungguh baik akan memilih aktivitas tertentu untuk memfasilitasi kontemplasi. Penjelasan yang lebih konsisten ditemukan dalam ide Aristoteles tentang *mixed ideal*, di mana kebajikan moral secara independen bernilai sekalipun dianggap kurang penting dibandingkan dengan kontemplasi dalam upaya mencapai kebahagiaan. Orang yang bijaksana dan baik akan dengan sendirinya mengabdikan bagian terbaik dirinya untuk berkontemplasi, tetapi dia juga membutuhkan kehadiran orang lain dan juga sebuah negara untuk memenuhi kebutuhan hidup yang lebih manusiawi.¹¹³ Karena itu, isu yang paling penting bukanlah bagaimana kebajikan moral dikaitkan dengan kontemplasi tetapi bagaimana peranan partisipasi politik dalam pelaksanaan kebajikan moral itu sendiri.

Karena seorang warga negara yang baik adalah orang-orang yang mengoptimalkan kemampuan rasionalnya untuk mencapai hidup yang terbaik, dia akan mengatur cara hidupnya atas pertimbangan rasional tentang tujuan hidupnya dan interese yang akan mendatangkan kebahagiaan.¹¹⁴ Entahkah kehidupan praxis identik dengan kehidupan seorang negarawan sehingga *the mixed ideal* berarti suatu kombinasi antara kontemplasi dan kenegarawanan dan karena itu orang yang bijaksana dan baik harus berpartisipasi dalam politik? Atau dapatkah kebajikan moral dilaksanakan tanpa harus terjun ke dalam karier politik sehingga *the mixed ideal* berarti kombinasi antara kontemplasi dengan kehidupan pribadi seorang individu?

¹¹² Kathleen Wilkes, "The Good Man and the Good for Man," in Amelie Oksenberg Rorty, ed., *Essays on Aristotle's Ethics*, (Berkeley: University of California Press, 1980), 347-348

¹¹³ Richard Mulgan, *Op. Cit.*, 199

¹¹⁴ Kathleen Wilkes, *Op. Cit.*, 354

Jawaban atas pertanyaan ini sangat tergantung dari pandangan Aristoteles tentang kebaikan eksternal. Aristoteles membedakan kebaikan eksternal seperti kekayaan, kesehatan, dan persahabatan, dari kebaikan internal seperti kebajikan. Kebaikan eksternal sangat penting sekalipun hanya sebagai tambahan dalam usaha untuk mencapai kebahagiaan. Hal ini bisa dicapai lewat dua cara; *pertama*, kebaikan eksternal merupakan instrumen penting untuk pelaksanaan suatu aksi yang bajik. Untuk bisa melaksanakan kebajikan moral persahabatan, orang membutuhkan teman, kemurahan hati mengandaikan adanya kekayaan, atau orang tidak bisa melaksanakan tindakan-tindakan bajik tanpa adanya kesehatan yang baik. *Kedua*, tanpa adanya kebaikan eksternal tertentu, kebahagiaan akan berkurang. Misalnya, ketiadaan kecantikan sejak lahir akan mengurangi kebahagiaan.¹¹⁵ Atau kematian seorang anggota keluarga atau teman akrab akan mempengaruhi kebahagiaan seseorang.

Aristoteles menentang pandangan yang dikembangkan oleh Stoics bahwa kebajikan sendiri bisa membuat orang bahagia dan kebaikan eksternal tidak berpengaruh apapun. Tetapi Aristoteles juga menentang kecenderungan untuk menjadikan kebaikan eksternal sebagai tujuan utama hidup. Dia menolak pemimpin politik yang mengejar kebajikan sebagai sarana untuk mendapatkan kehormatan dan kekayaan. Sekalipun kebaikan eksternal penting untuk kebajikan, hanya jumlah yang secukupnya yang dibutuhkan. “Kita tidak boleh berpikir bahwa orang yang bahagia akan membutuhkan banyak hal, seolah-olah dia tidak bahagia tanpa kebaikan eksternal, karena kemandirian dan tindakan tidak boleh berlebihan dan kita dapat melakukan tindakan-tindakan mulia tanpa harus mengurus bumi dan laut.”¹¹⁶

Dari kutipan ini ada indikasi bahwa Aristoteles sesungguhnya menentang dua klaim yang ekstrim yaitu bahwa orang yang kaya secara otomatis hidup bahagia dan orang yang tidak beruntung atau tidak mempunyai harta sedikitpun bisa hidup bahagia. Untuk bisa hidup bahagia orang harus memiliki harta dalam jumlah yang secukupnya: tidak berlebihan atau tidak berkekurangan. Tetapi konsep ini tidak berlaku untuk kekuasaan dan kehormatan politik—salah satu kebaikan eksternal—karena kehilangan kekuasaan atau pembatalan kewarganegaraan tidak akan menghilangkan kemungkinan orang untuk bisa hidup baik dan bahagia, seperti halnya pada orang yang kehilangan teman atau anggota keluarga. Orang akan bisa hidup bahagia sekalipun dia kehilangan jabatan politis atau dikucilkan dari kehidupan publik.¹¹⁷

Inferensi bahwa aktivitas politik tidaklah penting untuk kebahagiaan dikonfirmasi Aristoteles dalam diskusinya tentang kebajikan. Aristoteles menganalisis kebajikan dalam konteks doktrinnya tentang “jalan tengah (*middle way*). Beberapa kebajikan yang berkaitan

¹¹⁵ NE 1099 b 2-3

¹¹⁶ NE 1179 a 1-5

¹¹⁷ Richard Mulgan, *Op. Cit.*, 201

dengan kehidupan publik akan dianalisa dalam tulisan ini. *Pertama*, kehormatan. Hormat tidak hanya ditujukan kepada yang ilahi tetapi juga merupakan hadiah bagi orang yang melakukan tindakan-tindakan hebat untuk kepentingan publik. Nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan kebaikan eksternal karena relevansinya dengan publik. Sekalipun Aristoteles mengkritik orang yang mengejar kehormatan sebagai tujuan utama, tetapi dia tidak memperbolehkan orang-orang bajik untuk bermasa bodoh terhadap pengakuan publik. Orang yang memberikan sumbangan uang dalam jumlah besar demi kepentingan bersama patut mendapat kehormatan. Seorang prajurit patut dihormati karena tindakan-tindakan heroiknya untuk mempertahankan negara. Warga negara biasa yang melakukan tindakan-tindakan luar biasa demi negara layak mendapatkan jabatan-jabatan atau pengakuan publik. Aristoteles mengatakan bahwa kehormatan merupakan jalan tengah antara ambisi dan ketiadaan ambisi. Orang hendaknya menginginkan kehormatan tidak terlalu banyak atau tidak terlalu sedikit, tetapi “*as one should.*”¹¹⁸ Orang yang baik akan menerima jabatan politis kalau memang dia layak dan berhak mendapatkannya atau kalau ditawarkan, tetapi jika dia tidak layak atau tidak ditawarkan, dia tidak perlu merasa kehilangan dan tidak akan dipersalahkan.¹¹⁹

Kedua, keberanian yang berasosiasi langsung dengan kewarganegaraan. Keberanian melibatkan ketakutan dan kepercayaan diri.¹²⁰ Keberanian merupakan jalan tengah antara ketakutan yang tak beralasan dan kepercayaan diri yang berlebihan. Menurut Aristoteles keberanian berkaitan dengan sikap yang tepat terhadap ketakutan atau kematian mulia di medan pertempuran karena hal itu merupakan sesuatu yang mulia untuk dilakukan. Keberanian merupakan salah satu realisasi dari pelaksanaan tugas sebagai warga negara. Tetapi itu tidak berarti bahwa semua tindakan berani penting untuk memperoleh hidup yang bajik. Orang yang baik akan memilih untuk mengorbankan hidupnya kalau memang dia harus berbuat demikian. Ada dua alasan utama mengapa seorang warga negara mengorbankan diri sebagai seorang tentara: pertama, kemenangan dan juga karena hal itu merupakan suatu tindakan yang mulia.¹²¹ Orang yang berani tidak mencari-cari alasan untuk bertempur supaya dianggap sebagai orang bajik. Sesungguhnya seorang tentara yang baik memiliki juga rasa takut tetapi mereka selalu siap menghadapi ancaman terutama yang berkaitan dengan keamanan dan kesejahteraan negara. Mereka akan dengan senang hati mengorbankan diri demi tujuan mempertahankan keamanan dan keutuhan negara.

¹¹⁸ NE 1125 b 20-21

¹¹⁹ Richard Mulgan, *Op. Cit.*, 203

¹²⁰ NE 1117 a 28-29

¹²¹ David Pears, “Courage as a Mean,” in Amelie Oksenberg Rorty, ed., *Essays on Aristotle’s Ethics*, (Berkeley: University of California Press, 1980), 174

Ketiga, keadilan. Aristoteles membedakan dua macam definisi keadilan, yaitu pengertian keadilan umum dan khusus. Secara umum, keadilan dijelaskan dalam kaitannya dengan hukum. Bertindak adil berarti taat hukum atau bertindak sesuai dengan hukum atau peraturan yang berlaku. Dalam pengertian ini, keadilan ekuivalen dengan kebajikan yang sempurna dan orang yang adil mampu menggunakan kebajikannya dalam perspektif yang lebih umum.¹²² Kebajikan pribadi diperluas untuk menjangkau kebaikan orang lain. Dalam konteks kehidupan di sebuah negara-kota, Aristoteles mengklaim bahwa konsep keadilan menuntut adanya partisipasi aktif setiap warga negara dalam urusan negara. Kehidupan moral menurut pandangan Aristoteles mencakupi urusan sosial yang berkaitan erat dengan pemimpin, tradisi, norma, dan hukum dari sebuah komunitas politik. Karena itu, keadilan bukanlah berkaitan dengan relasi antara bagian-bagian jiwa manusia seperti yang dimengerti oleh Plato, tetapi berkaitan dengan relasi antara individu yang satu dengan yang lainnya. Menjadi warga negara di sebuah negara berarti setiap tindakan mempunyai aspek ganda: tindakan itu bisa dimengerti dari perspektif pribadi atau dari perspektif kepentingan orang lain. Orientasi tindakan adil diarahkan ke diri sendiri dan juga kepada orang lain karena tindakan ini akan mendatangkan keuntungan bagi orang lain.¹²³

Sedangkan secara partikular, keadilan dimengerti dalam konteks *equality*.¹²⁴ Karena itu, ada keadilan distributif yang menuntut adanya distribusi barang-barang material seperti uang dan juga kehormatan, secara adil dan merata; dan ada keadilan korektif, dalam arti orang yang berbuat salah harus mendapat hukuman yang adil. Keadilan distributif menuntut adanya distribusi barang sesuai dengan kontribusi masing-masing orang.¹²⁵ Pengakuan atau kehormatan diberikan karena kualitas atau kontribusi orang terhadap kebaikan bersama. Seorang tentara yang menang dalam pertempuran patut mendapatkan pengakuan publik. Karena konsep keadilan menuntut adanya partisipasi warga, maka paradigma seorang yang adil bukanlah filsuf yang berkontemplasi tentang hal-hal abstrak tetapi seorang ahli tentang hukum dan konstitusi, orang yang tahu bagaimana mencegah sistem politik yang sudah buruk menjadi lebih buruk dan juga orang yang menggunakan keahliannya untuk mempromosikan kebaikan warga negara biasa di kota-kota.¹²⁶

Selain kebajikan moral yang dilaksanakan dalam arena publik yang begitu esensial secara politis dan luas jangkauannya, ada juga kebajikan yang lebih bersifat sosial karena dilaksanakan di antara anggota keluarga, teman-teman akrab dan bisnis. Inilah yang disebut

¹²² NE 1129 b 30-35

¹²³ Susan Collins, "Justice and Moral Virtue in Aristotle's *Nicomachean Ethics*," dalam Aristide Tessitore, (ed.), *Aristotle and Modern Politics: The Persistence of Political Philosophy*, (Indiana: University of Notre Dame Press, 2002), 115

¹²⁴ NE 1130 b30-32

¹²⁵ Susan Collins, *Op. Cit.*, 118

¹²⁶ Richard Kraut, *Aristotle on the Human Good, Op. Cit.*, 101

dengan persahabatan. Ketika berdiskusi tentang persahabatan, Aristoteles menegaskan bahwa persahabatan tidak mungkin terjalin di sebuah negara. Persahabatan sejati hanya bisa terjalin di antara beberapa orang tertentu saja. “Seseorang tidak dapat berteman dengan banyak orang dalam arti memiliki jenis persahabatan sejati dengan mereka, sama seperti seseorang tidak dapat mencintai banyak orang pada waktu yang sama.”¹²⁷

Persahabatan yang paling rendah tingkatannya karena dibangun atas kegunaan atau kesenangan semata-mata bisa meluas jangkauannya dalam kehidupan sosial dan politik seperti persahabatan bisnis dan persahabatan politis, di mana orang bersahabat karena tujuan bisnis atau politis. Aristoteles mengingatkan bahwa aspek sosial sebuah negara kota, di mana manusia secara natural cocok di dalamnya, melibatkan suatu jaringan yang kompleks dan kaya sebab negara kota merupakan perkumpulan dari berbagai asosiasi sosial dengan karakter yang beranekaragam. Tetapi intinya manusia secara natural membutuhkan kehadiran orang lain, terutama teman akrab, karena itu persahabatan merupakan sesuatu yang esensial juga dalam kehidupan seorang individu dan sekaligus warga negara. Karena itu Aristoteles menyimpulkan bahwa orang yang baik dan bahagia akan dengan sadar dan hati-hati memenuhi tugas kemiliteran dan politiknya sebagai warga negara kapan saja dibutuhkan. Tetapi, tidak ada anjuran bahwa pelaksanaan tugas sebagai warga negara tersebut merupakan satu-satunya hal yang esensial dalam hidupnya karena sebagai makhluk sosial dia membutuhkan kehadiran orang lain.¹²⁸

Sikap Aristoteles terhadap partisipasi politik masih ambivalen karena kenyataan menunjukkan bahwa aktivitas politik menyediakan kesempatan yang unik dan bernilai bagi setiap warga negara untuk melaksanakan tindakan bajik. Misalnya, keberanian tidak mungkin tanpa harus pergi ke medan pertempuran sebagai seorang warga negara. Tetapi Aristoteles tidak serta merta menyimpulkan bahwa orang yang tidak mendapat kesempatan seperti itu kurang mampu untuk bisa memperoleh hidup yang baik dan bahagia. Karena kehidupan sosial dalam sebuah negara kota di mana orang diberi kesempatan untuk berinteraksi dengan anggota keluarga dan teman akrab merupakan hal yang sangat esensial untuk hidup secara baik dan bahagia. Orang masih bisa hidup baik dan bahagia selama dia mempunyai harta yang cukup dan orang-orang dekat. Entahkah kesimpulan bahwa partisipasi politik tidaklah esensial bagi seorang individu dalam usahanya untuk mencapai kebahagiaan dari perspektif etika, sesuai dengan teori politik Aristoteles? Untuk maksud ini kita harus meneliti doktrinnya tentang komunitas politik, manusia sebagai makhluk berpolitik, *man as political animal*, apa artinya menjadi warga negara, dan pandangannya tentang konstitusi atau kepemimpinan politik dalam bagian berikut ini.

¹²⁷ NE 1158 a 10-12

¹²⁸ Richard Mulgan, *Op. Cit.*, 204

BAB III

PARTISIPASI POLITIK

Pada bagian akhir *Nicomachean Ethics*, Aristoteles mengatakan bahwa ilmu yang bertugas untuk mempelajari tujuan tertinggi manusia adalah politik.¹²⁹ Sesudah mempelajari bagaimana hidup secara baik, warga negara dituntut untuk mempromosikan kehidupan yang baik dalam arena publik. Setelah dididik dengan baik, mereka harus memiliki interesse untuk kesejahteraan orang lain dan bukannya hanya untuk teman-teman dekat dan anggota keluarga mereka. Hal ini mengandaikan bahwa anggota *polis* hendaknya tertarik dengan sesuatu yang melampaui diri mereka sendiri dan orang-orang terdekat. Lebih lanjut, warga negara yang baik harus menggunakan pengetahuan tentang kehidupan yang baik untuk menuntun kerja mereka dalam arena publik. Ilmu politik memainkan peran sangat penting dalam kehidupan publik.

Dengan pemahaman seperti ini, Aristoteles lalu menulis bukunya *Politics*, yang harus dipahami sebagai sebuah upaya untuk meningkatkan keterampilan mengambil keputusan bagi mereka yang hendak memainkan peran dalam kehidupan publik. Konsep politik Aristoteles bukanlah instrumen untuk mempertahankan hak politik atau cara untuk melindungi barang-barang privat. Dalam pandangan Aristoteles, hal yang paling penting dalam pembuatan keputusan politis adalah proses dengannya sebuah keputusan otoritatif dihasilkan dan bukannya tujuan dalam dirinya sendiri.

Hal yang paling signifikan tentang politik adalah keterlibatan warga negara dalam proses pembentukan identitas kolektif. Hal ini sesuai dengan sistem demokratis Athena yang bergantung sepenuhnya pada pemerintahan rakyat. Pemerintahan dilaksanakan dalam pembuatan keputusan administratif dalam asembli, yang melibatkan semua warga negara.¹³⁰ Atas dasar ini, Aristoteles mengadvokasi cara hidup partisipatif, di mana warga negara memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam politik lewat mengambil bagian dalam memerintah dan diperintah, karena semua warga negara adalah bebas dan sederajat. Praktik ini mungkin di Athena karena institusi Athena secara umum melibatkan sebagian besar warga negara. Misalnya, warga negara

¹²⁹ NE 1094 a 26-28

¹³⁰ R. K. Sinclair, *Op. Cit.*, 106

memiliki kesempatan untuk melayani sebagai pejabat-pejabat publik dan terlibat dalam pemerintahan *polis*, entah lewat pemilihan umum atau penarikan lot.¹³¹

Karena partisipasi dalam kehidupan politik sangat krusial bagi kehidupan yang baik, orang harus dilengkapi dengan pengetahuan yang tepat tentang kodrat manusia sebagai manusia dan warga negara, bagaimana komunitas politik hendaknya diatur, dan konstitusi apa yang terbaik dalam sebuah *polis* ideal. “Seseorang harus familiar dengan kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan dari pengaturan konstitusional, kemampuan untuk memperbaikinya, serta antisipasi atas bahaya yang bisa muncul dari konstitusi tertentu.”¹³² Seseorang harus tahu kodratnya sendiri, bagaimana dia berhubungan dengan sesamanya dalam sfer publik, dan akhirnya bagaimana dia dapat melaksanakan secara tepat apa yang perlu untuk kesejahteraan komunitas di mana dia hidup. Pengetahuan ini penting untuk menjadi warga negara yang baik.

Untuk itu, berikut ini akan dijelaskan konsep Aristoteles tentang komunitas politik (*polis*) yang bertolak dari pemahamannya tentang siapa itu manusia, tentang kewarganegaraan untuk melihat bagaimana manusia berelasi dengan sesamanya, dan tentang konstitusi untuk memahami bagaimana sebuah komunitas politik hendaknya diatur. Dalam uraiannya ini, kita akan melihat konsep Aristoteles tentang pentingnya partisipasi politik.

3.1. KOMUNITAS POLITIK (*POLIS*)

Komunitas politik atau negara merupakan istilah yang relatif modern dan tidak dikenal dalam perbendaharaan Yunani klasik. Karena itu, ketika Plato dan Aristoteles berbicara tentang komunitas politik, mereka menggunakan kata *polis*, yang diterjemahkan dengan negara kota (*city-state*). Untuk memahami konsep Aristoteles tentang komunitas politik, kita harus meneliti apa yang dimaksudkannya dengan *polis*.

3.2.1. Pengertian *Polis*

Seperti karya-karya lainnya, Aristoteles mengawali *Politics* dengan suatu pernyataan umum:

Observasi kita sendiri mengatakan kepada kita bahwa setiap polis adalah sebuah komunitas pribadi-pribadi, yang terbentuk dengan sebuah tujuan bersama yang baik. Saya mengatakan “baik” karena dalam tindakan mereka, semua orang dalam kenyataannya bertujuan pada apa yang mereka pikirkan baik. Komunitas-komunitas lain bertujuan pada beberapa kebaikan, dan harus ada satu komunitas yang paling tinggi dan merangkul

¹³¹ Ibid., hlm. 106

¹³² Richard Kraut, *Aristotle: Political Philosophy, Op. Cit.*, hlm. 93

semua komunitas yang lain karena bertujuan pada kebaikan yang lebih tinggi. Itulah komunitas yang kita sebuah polis dan tipe komunitas seperti itu bersifat politis (komunitas politik).¹³³

Konsep negara-kota (*polis*) Aristoteles merupakan reaksi penolakan atas pandangan sofisme yang dianggap sebagai pandangan umum bangsa Yunani pada waktu itu. Kaum sofis mengajarkan bahwa negara semata-mata sebagai alat yang digunakan manusia untuk mencapai keinginan subyektifnya. Bagi Aristoteles, negara bukanlah sekedar instrumen belaka tetapi merupakan suatu organisme, dalamnya terbina relasi yang akrab mesra antara anggota. Apabila negara merupakan suatu persekutuan hidup politis yang dipahami dan dihayati sebagai satu organisme dan dalam pengalamannya, keterhubungan warga negara satu sama lainnya benar-benar diwarnai kekhususan, keakraban dan kemesraan—yang senantiasa dijaga dan dirawat kelestariannya, maka dalam hal yang demikian, kesatuan dan keutuhan negara yang begitu didamba-dambakan, dengan sendirinya akan tercipta, terpelihara, dan terjamin.¹³⁴

Dari konsep ini jelas bahwa Aristoteles menganalisis *polis* dengan menggambarannya sebagai sebuah komunitas (*koinonia*), sebuah konsep yang sangat mendasar untuk teori politiknya. Kata benda *koinonia* ditarik dari kata sifat *koinos*, yang menunjuk pada sesuatu yang disyeringkan bersama atau dimiliki bersama. Karena itu secara harafiah, *koinonia* berarti syering bersama atau *partnership*.¹³⁵ Setiap *koinonia* dibangun demi beberapa kebaikan, dalam arti bahwa semua yang berpartner dalam *koinonia* bertindak bersama dalam mengejar beberapa tujuan yang dianggap baik. Aristoteles menganjurkan bahwa setiap komunitas hendaknya memiliki tujuan-tujuan moral yang bernilai dan bahwa *koinonia* yang benar akan mengejar kebaikan yang benar atau sesungguhnya.

Polis merujuk pada komunitas aktual yang kecil dalam jumlah penduduknya dan ukurannya. Bagi Aristoteles, berapa persisnya jumlah penduduk tidak terlalu penting. Dia hanya menekankan bahwa jumlah penduduk hendaknya pas-pasan, tidak boleh terlalu sedikit atau terlalu banyak. Kalau terlalu sedikit maka negara itu tidak akan mampu menyediakan kebutuhan-kebutuhan dasar untuk kehidupan yang baik; sedangkan kalau terlalu banyak, maka negara akan sulit untuk mengaturnya secara baik. Menurutnya, sangat tidak mungkin untuk menerapkan keteraturan pada jumlah penduduk yang begitu besar.

Berkaitan dengan ukuran wilayah, sekali lagi Aristoteles menolak negara yang terlalu luas karena menghalangi jalinan kerja sama antaranggota, dan negara yang terlalu sempit karena

¹³³ P 1252 a 1-5

¹³⁴ J. H. Rapar, *Filsafat Politik Aristoteles*, Op. Cit., hlm. 35

¹³⁵ Richard Mulgan, *Aristotle's Political Theory*. (Oxford: Oxford University Press, 1977), hlm. 12

nanti tidak dapat mempertahankan diri dari gangguan negara lain. Yang ideal adalah negara-kota (*polis*), cukup luas untuk memungkinkan warga dapat hidup dan bergerak secara bebas. Di samping itu, sebuah negara hendaknya memiliki sumber daya alam yang secukupnya, yang mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok untuk semua warganya. Wilayah yang berlimpahan sumber daya alam harus dihindari untuk mencegah warga hidup dalam kemewahan.

Dalam konteks ini, Aristoteles mendefinisikan *polis* sebagai sebuah komunitas kecil dan intim, sebuah sistem etika sosial yang integral, yang mampu merealisasikan secara penuh kemampuan masing-masing anggotanya.¹³⁶ Jadi, yang menjadi kriteria penting dalam menilai sebuah negara—entah itu negara ideal, negara yang biasa-biasa saja atau negara yang tidak sempurna adalah tujuan pembentukan negara tersebut dan sejauh mana negara mampu merealisasikan kemampuan anggota-anggotanya. Karena itu, ketika dia mengevaluasi sebuah negara dia akan menggunakan kriteria ini—entahkah negara tersebut memiliki tujuan moral dan entahkah kebaikan yang dikejar negara adalah kebaikan yang sejati.

Karakteristik essensial lain dari sebuah *koinonia* ialah bahwa *koinonia* seharusnya melibatkan dua aspek, yaitu persahabatan dan keadilan.¹³⁷ Konsep persahabatan di sini jauh lebih luas pengertiannya dibandingkan dengan konsep modern. Persahabatan meliputi juga sosiabilitas umum, sebuah keinginan untuk bekerjasama dalam aktivitas-aktivitas bersama dalam bentuk apapun juga. Keadilan, sebuah term fundamental lainnya dalam teori politik dan etika Aristoteles, dalam pengertian yang luas mencakupi semua prinsip moral yang mengatur tingkah laku sosial masyarakat. Tetapi keadilan juga digunakan dalam pengertian yang lebih khusus, yang mencakupi prinsip-prinsip partikular yang dikaitkan dengan pengertian kesamaan (*equality*).

Dalam politik, prinsip yang paling penting adalah keadilan distributif yang mengatur pembagian barang-barang dan keuntungan untuk anggota yang berbeda dari kelompok yang sama dan inilah aspek penting dari keadilan yang merupakan ciri khas essensial setiap *koinonia*. Menurut keadilan distributif, pembagian hendaknya sama antara partner, tidak dalam arti identik atau sama rata tetapi dalam arti proporsional, sesuai dengan kontribusi masing-masing anggota. Dan sesuai dengan status yang relatif, kontribusi dari anggota akan sangat berbeda dari satu komunitas ke komunitas yang lainnya. Misalnya, di beberapa komunitas yang merupakan perkumpulan teman-teman sejati, partner memiliki status yang sama dan kontribusi timbal balik mereka juga sama. Di banyak komunitas lain, di mana anggotanya sederajat tetapi kontribusi mereka tidak sama, maka masing-masing menerima pembagian yang berbeda sesuai dengan

¹³⁶ Ernest Barker, *The Politics of Aristotle*, *Op. Cit.*, hlm. xlvii

¹³⁷ Richard Mulgan, *Aristotle's Political Theory*. *Op. Cit.*, hlm. 15-20

kontribusi: yang memberi banyak akan menerima banyak dan yang memberi kurang akan menerima kurang juga.

Konsep keadilan seperti ini berlaku baik dalam komunitas yang terdiri dari anggota-anggota yang sederajat dengan kontribusi yang berbeda-beda, tetapi bagaimana dengan komunitas yang terdiri dari anggota yang tidak sederajat, misalnya antara orangtua dan anak-anak, dan antara tuan dan hamba? Di sini tidak ada standar yang pasti untuk membandingkan kontribusi dan keuntungan masing-masing anggota. Dalam kasus ini, Aristoteles tetap berpegang teguh pada kesamaan proporsional karena dia mengakui bahwa pasti selalu ada sesuatu yang umum (*common*) untuk anggota yang tidak sederajat tersebut. Yang dimaksudkan Aristoteles dengan sesuatu yang *common* adalah tujuan bersama. Untuk mencapai tujuan yang satu dan sama, masing-masing kelompok anggota yang berbeda dalam status, menciptakan aktivitas dan memilih sarana yang berbeda pula dalam mencapai tujuan bersama tersebut.

Aristoteles memberikan contoh antara jiwa dan badan; orangtua dan anak; serta antara tuan dan hamba. Jiwa memiliki aktivitas berpikir dan sarana yang digunakan adalah intelek, sedangkan badan memiliki aktivitas sensitivitas dan menggunakan sarana pancaindera untuk mencapai tujuan bersama kebahagiaan manusia secara keseluruhan. Tuan dan hamba atau orangtua dan hamba memiliki aktivitas yang berbeda-beda untuk mencapai kesejahteraan bersama dalam rumah tangga. Bertolak dari aktivitas yang dilakukan jelas bahwa aktivitas jiwa lebih tinggi dari aktivitas badan; aktivitas seorang tuan jauh lebih mulia dari aktivitas hamba. Jadi keadilan dalam konteks ini berarti memberikan kepada orang atau kelompok orang sesuai dengan kualitas perbuatannya. Atau dengan kata lain, orang yang terbaik (dalam arti aktivitas yang dilakukan dan sarana yang digunakannya) menerima yang terbaik pula dan sebaliknya. Contoh yang lebih konkret dalam kaitan dengan ini: orang yang pintar main gitar hendaknya diberikan gitar yang terbaik (proporsionalitas dengan keterampilan dan kualitas)nya sedangkan orang yang pas-pas atau baru latihan main gitar hendaknya diberikan gitar yang lama/bekas.

Memang konsep ini bisa diperdebatkan, khususnya dalam kaitan dengan relasi perbedaan antara tuan-hamba, tetapi masih dipraktekkan dalam kehidupan modern ini, misalnya dalam komunitas ilmiah. Di sekolah-sekolah atau universitas ada senat dosen, pegawai administrasi, dan pekerja kasar. Semua mempunyai tugas dan tanggungjawab berbeda-beda dan karena itu hak mereka pun berbeda-beda. Tetapi semua mempunyai tujuan yang satu dan sama yaitu demi kelangsungan atau kesejahteraan sekolah dan biara.

Aristoteles menempatkan *polis* dalam konteks yang lebih luas dari semua asosiasi manusiawi dan menghubungkan beberapa prinsip yang selalu ada dalam semua kelompok sosial, misalnya kebaikan, keadilan, dan kebebasan. Tetapi, *polis* lebih dari sekadar sebuah tipe *koinonia*. *Polis*

merupakan sebuah tipe *koinonia* yang unik dan spesial. Negara merupakan persekutuan hidup yang tertinggi karena merangkul semua persekutuan hidup lain.¹³⁸ Konsekuensinya, negara memiliki tujuan yang paling tinggi dan mulia, dalamnya semua tujuan individu dan kelompok bernaung. Negara tidak dibentuk demi negara tetapi demi warga negara secara keseluruhan. Aristoteles menganut paham yang memberi posisi terhormat pada kepentingan negara. Segala interese pribadi, kelompok, atau golongan mengalah demi kepentingan umum sebagai satu kesatuan *polis*. Dalam konteks ini tujuan negara adalah mengupayakan dan menjamin adanya kebaikan semaksimal mungkin secara kuantitatif dan kualitatif bagi warganya.

3.1.2. *Polis* adalah Sesuatu yang Alamiah

Sesudah menguraikan apa itu *polis*, Aristoteles kemudian membuktikan bahwa *polis* adalah sesuatu yang alamiah, dalam arti ada secara alamiah atau natural. Hal ini harus dilihat dalam konteks debat filosofis Yunani pada waktu itu dan pandangan Aristoteles sendiri tentang alam. Aristoteles berupaya untuk menjawab beberapa pemikir pada waktu itu, khususnya kaum sofis (pengajar profesional) yang mengklaim bahwa *polis* dan institusi-institusinya bertentangan dengan alam. Diskusi bertolak dari perbedaan antara *physis* dan *nomos*. Kedua term ini digunakan dalam pengertian yang luas. *Physis*, mewakili pertumbuhan, alamiah, dan realitas fundamental; sedangkan *nomos*, mewakili apa yang dibuat manusia, kesepakatan/konvensi dan kebiasaan/adat istiadat.

Aplikasi dari perbedaan antara *physis* dan *nomos*—yang ditentang oleh Aristoteles—adalah pandangan kaum sofis bahwa manusia secara natural berkecenderungan untuk mengejar kesenangan dan keberuntungan mereka sendiri dengan mengorbankan sesamanya. Inilah apa yang alamiah/*physis* bagi manusia. Institusi seperti negara dan hukum-hukumnya atau nilai-nilai seperti keadilan yang mendorong manusia untuk mengejar kepentingan bersama dan untuk bekerjasama ketimbang berkompetisi satu sama lain, dilihat sebagai kesepakatan—buatan manusia sendiri. Mereka adalah ciptakan manusia atau *nomos*.¹³⁹ Hal ini semakin dipertegas karena kata *nomos* sendiri sering diterjemahkan dengan hukum—yang dipertentangkan dengan *physis*.

Konsekuensi lanjutnya adalah bahwa hukum dan prinsip-prinsip seperti keadilan boleh ditolak dan individu-individu dipaksa untuk mengikuti kodratnya, kepentingan dirinya sendiri semampunya. Hukum dan keadilan dinilai berguna hanya untuk mengekang kodrat manusia, dan dibenarkan untuk menghindari kejahatan yang lebih besar yang disebabkan oleh mengisinkan

¹³⁸ P 1252 a 3-5

¹³⁹ Konsep kaum sofis ini diwakili oleh Callicles, yang dalam dialog dengan Socrates menegaskan bahwa keadilan bersifat konvensional karena konsep itu didasarkan pada pendapat umum. Bdk. Plato, *Gorgias*, penerj.. James H. Nichols Jr., (Ithaca and London: Corner University Press, 1998) 73-74

kendali penuh kepada dorongan alamiah. Ini pandangan sofist sebagai akibat dari distingsi antara *physis* dan *nomos* dalam praksis.

Bagi Aristoteles—seperti juga Plato—posisi terakhir ini tidak bisa diterima karena aplikasi atau premis yang menjadi titik tolak kesimpulan seperti di atas tidak bisa diterima. Hukum, keadilan dan negara, sekalipun merupakan penemuan manusia, tidak boleh dilihat sebagai sesuatu yang jahat, tetapi harus dinilai dalam diri mereka sendiri sebagai sesuatu yang secara fundamental baik dan essensial bagi perkembangan kodrat manusia secara tepat. Karena itu mereka tidak boleh dipertentangkan dengan *physis*, dan konsekuensinya perbedaan antara *physis* dan *nomos* harus ditolak.

Penolakan Aristoteles terhadap ide kaum sofis yang membedakan *physis* dan *nomos* serta konsepnya tentang teleologi menunjukkan bahwa teleologi bisa diaplikasikan pada tingkah laku manusia dan penemuan-penemuan manusiawi. Menurut premis teleologis, semua perilaku, entah pencaharian intelektual, pilihan moral, ataupun aktivitas fisik diarahkan kepada tujuan tertentu.

Aristoteles berbicara tentang kealamiahannya sebuah *polis*, dengan mempertimbangkan *polis* sebagai sebuah organisme biologis dan berupaya untuk menemukan kodrat *polis* tersebut dengan meneliti pola pertumbuhan dan perkembangan. *Polis*, sama seperti organisme hidup lainnya secara alamiah berkembang dari dalam ke arah tujuan tertentu.¹⁴⁰ Karena itu, Aristoteles menganalisis sketsa perkembangan *polis* dari rumah tangga dan perkampungan. Tahap pertama ialah rumah tangga atau keluarga, yaitu asosiasi yang ada secara alamiah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.¹⁴¹ Tetapi, rumah tangga dalam dirinya sendiri tidak mampu menyediakan semua yang diinginkan oleh manusia sebagai individu. Manusia memiliki insting sosial, yang juga adalah sesuatu yang alamiah. Karena itu, dia selalu membutuhkan kebersamaan sosial dan politis.

Karena itu, keluarga yang semula hidup terpisah, kemudian bergabung bersama dalam sebuah perkampungan untuk saling membantu dan melindungi. Bentuk asosiasi inipun masih terbatas dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan manusia yang paling tinggi. Tetapi sebuah kampung juga masih terlalu kecil, jadi beberapa kampung bergabung dalam sebuah komunitas yang lebih besar, yang disebutnya *polis*, yang dianggap cukup luas untuk menjamin kemandirian. Dorongan awal untuk terbentuknya *polis*, muncul dari kebutuhan akan *necessitas* atau keharusan hidup, tetapi *polis* terus berada demi menjamin suatu hidup yang baik. Dalam arti bahwa manusia pertama-tama membentuk sebuah *polis* dengan alasan yang sangat sederhana untuk menjamin kelangsungan hidup, tetapi setelah tercipta, *polis* tersebut memungkinkannya

¹⁴⁰ Ernest Barker, *The Political Thought of Plato and Aristotle*, hlm. 221

¹⁴¹ P 1252 b 12-15

terrealisasinya tujuan yang lebih tinggi. Dan manusia kemudian melihat tujuan tersebut sebagai alasan untuk eksistensinya. Aristoteles mengatakan: “Karena itu *polis* adalah sebuah bentuk komunitas yang secara alamiah, seperti komunitas awal (keluarga) darinya *polis* muncul adalah juga alamiah. *Polis* merupakan tujuan akhir dari semua komunitas lainnya dan kodratnya adalah dalam dirinya sendiri sebuah tujuan; karena apa saja kalau bertumbuh dan mencapai kesempurnaannya, kita sebut alam (*nature*).”¹⁴²

Sekalipun mengikuti pola perkembangan organisme sebagai model dalam menjelaskan kealamiah *polis*, tetapi perlu ditegaskan bahwa Aristoteles tidak memperlakukan pertumbuhan negara sama seperti pertumbuhan makhluk hidup lainnya. Dalam analisisnya tentang *polis*, Aristoteles tidak menegaskan proses perkembangan, tetapi tujuan yang menjelaskan perkembangan tersebut. Sama seperti sebuah kapak didefinisikan dari fungsinya untuk memotong kayu, maka *polis* pertama-tama didefinisikan sebagai sebuah asosiasi keluarga dan perkampungan yang syering dalam kehidupan kebajikan dan bertujuan pada sebuah tujuan pada eksistensi yang perfek dan sempurna dalam dirinya sendiri. Jika tujuan menjelaskan perkembangan, maka valid untuk menyimpulkan bahwa kehidupan yang baik sebagai tujuan polis menjelaskan eksistensi negara.¹⁴³

Karena *polis* yang adalah tujuan akhir, dianggap sebagai tahap perkembangan terakhir dari individu, keluarga, perkampungan, maka adalah tepat untuk mengatakan bahwa *polis* ada lebih dahulu dari keluarga dan individual secara alamiah. *Polis* ada sebagai forma (bentuk). Misalnya, sebelum seorang pemahat memahat sebuah patung, dia harus sudah memiliki dalam benaknya bentuk patung seperti apa yang mau dipahatnya. Itu berarti, bentuk akhir patung itu ada lebih dahulu sebelum material yang dipakai untuk pembuatan patung. Dalam konteks ini, *polis* adalah sebab final, karena itulah tujuan kepadanya proses pertumbuhan (keluarga dan perkampungan) diarahkan dan berakhir dan sekaligus sebab formal karena tujuan itu diidentifikasi dengan bentuk, esensi, atau forma yang mau direalisasikan ketika sesuatu yang partikular, dalam hal ini keluarga dan perkampungan berkembang secara sempurna. Sedangkan dari perspektif proses dan waktu, keluarga dan individual ada lebih dahulu dari negara. Sama seperti dalam proses pembuatan patung, material harus ada lebih dahulu, sebelum bentuk final dari patung itu sendiri.

Aristoteles tidak memperlakukan *polis* sebagai sebuah substansi alamiah yang memiliki prinsip pergerakannya sendiri. “Polis adalah alamiah dari sifat dan tujuan manusiawi, bukan dari potensialitas demi bentuk yang sempurna dari dirinya sendiri.”¹⁴⁴ Karena itu, kealamiah *polis* harus ditemukan dalam tujuan kehidupan politis atau sebuah komunitas dan tujuan dari

¹⁴² P 1278 b 20-28

¹⁴³ Ernes Barker, *The Political Thought of Plato and Aristotle*, hlm. 224

¹⁴⁴ Bernard Yack, *The Problem of a Political Animal*, (Berkeley: University of California Press, 1993), hlm. 90

komunitas politis ditemukan dalam tujuan warga negara yang adalah anggota dari *polis*. Individu-individu memiliki dorongan alamiah untuk menggabungkan diri ke dalam sebuah *polis* untuk memperoleh bagi diri mereka sendiri kondisi kemandirian yang diinginkan, yang adalah kondisi awal untuk tujuan manusiawi yang lebih tinggi. Sekali kemandirian dicapai, *polis* dapat mengejar tujuan dalam dirinya sendiri, yaitu kesejahteraan hidup yang merupakan kebaikan moral. Tidak ada unit sosial yang lebih kecil dari *polis* yang mampu mencapai tujuan tersebut. Yang membuat negara alamiah, dalam pandangan Aristoteles, adalah kenyataan bahwa sekalipun itu berada atau diadakan, adalah pemenuhan dorongan imanen dalam kodrat manusia ke arah kesempurnaan moral—sebuah dorongan imanen yang menarik manusia ke arah yang lebih tinggi, lewat berbagai bentuk komunitas, sampai pada bentuk akhirnya, komunitas politik.¹⁴⁵

Aplikasi teori teleologi pada politik telah dikritik karena tampaknya menyangkal bahwa asosiasi politis dapat berkembang lebih lanjut. Dikatakan bahwa Aristoteles gagal mengakui kemungkinan bahwa tidak adanya batas perkembangan. Dengan mengklaim bahwa negara kota adalah tujuan kepenuhan terakhir semua progress politik, Aristoteles menyangkal kemungkinan memiliki sebuah asosiasi politik yang lebih baik dan lebih universal daripada *polis*. Misalnya, kekaisaran universal yang dibangun oleh Aleksander Agung, yang mencakupi juga Yunani. Lebih lanjut, lewat konsep teleologisnya, Aristoteles memasukkan sebuah komponen absolut dan barangkali intoleran ke dalam pemikiran politik. Karena setiap individu dilihat dapat berfungsi dalam skema yang diciptakan oleh negara, tidak ada tingkat kebebasan dalam peranan manusia. Aristoteles tampaknya tidak mempertimbangkan kemungkinan melaksanakan fungsi-fungsi tertentu untuk mencapai fungsi yang lebih tinggi.¹⁴⁶

Sekalipun demikian, menurut Ernest Barker, kritik seperti ini tidak sesuai dengan pemahaman Aristoteles tentang teleologi sebab teleologi yang benar haruslah bersifat internal dan beroperasi dari dalam organisme. Adalah tujuan internal yang menuntut setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam mencapai kebaikan bersama. Barker menulis: “Aktivitas atau energi dalam realisasi langsung fungsi negara menjadikan seseorang bagian dari negara atau warga negara; dan orang yang tidak memberikan kontribusi secara aktif kepada realisasi tersebut bukanlah bagian negara, bukan warga negara tetapi orang yang melakukan pekerjaan yang membosankan.”¹⁴⁷

Kealamiahannya *polis* bukan semata-mata karena dia adalah tahap terakhir dalam evolusi historis, tetapi karena dia sendiri memenuhi semua kebutuhan manusia; dia sendiri *self-sufficient*. Aristoteles membedakan dua bentuk kemandirian yang berhubungan dengan kebutuhan untuk

¹⁴⁵ Ernest Barker, *The Politics of Aristotle*, hlm xlix

¹⁴⁶ *Ibid.*, 226

¹⁴⁷ *Ibid.* 227

keharusan hidup dan kebutuhan untuk kehidupan yang baik. Hanya *polis* yang dapat menyediakan kemandirian dalam kedua pengertian di atas. Pentingnya kemandirian *polis* sebagai bukti kealamiahannya ditegaskan dalam argumen singkat berikut ini: “Bagi masing-masing barang ketika berkembang secara penuh, disebut alamiah, entah kita berbicara tentang manusia, kuda atau keluarga. Di samping itu, penyebab terakhir dan tujuan segala sesuatu adalah terbaik dan pemenuhan diri sendiri adalah tujuan dan yang terbaik.”¹⁴⁸

3.1.3. Manusia adalah Makhluk Politik

Argumen bahwa sesuatu yang alamiah merupakan yang terbaik dan yang terbaik adalah sesuatu yang natural menjadi dasar bagi Aristoteles untuk membuktikan bahwa *polis* adalah sesuatu yang alamiah bagi manusia dan karena itu *polis* adalah yang terbaik untuk manusia. Tetapi kesimpulan bahwa *polis* adalah yang terbaik untuk manusia tidak sepenuhnya didasarkan pada argumen-argumen etis di atas, tetapi juga bahwa manusia—menurut Aristoteles—adalah makhluk politik. Inilah salah satu doktrin terkenal Aristoteles.

Makhluk politik (*politikon zoon*) secara harafiah berarti binatang yang hidup dalam sebuah polis atau “polis-animal”. Sebagai makhluk politik, manusia secara alamiah cocok dengan kehidupan di sebuah *polis*.¹⁴⁹ Manusia memiliki inklinasi dan kemampuan untuk hidup bersama untuk mencapai kehidupan yang baik di mana manusia dapat mengembangkan secara penuh semua kemampuannya.¹⁵⁰ Adalah sesuatu yang baik untuk hidup bersama dalam sebuah polis dan anggota-anggotanya memiliki stimulus untuk bekerja bersama demi kemajuan dan keberlangsungan eksistensinya. Dari awal, manusia memiliki dorongan politis yang menggerakkan mereka ke arah kehidupan bersama. Kecenderungan ini ada dalam semua manusia sejak lahir.

Sekalipun demikian, dalam bukunya *Historia Animalum*, Aristoteles menggunakan pengertian yang lebih luas karena menunjuk pada setiap spesies binatang yang bekerjasama dalam sebuah kegiatan bersama. Dia memberi contoh, disamping manusia, ada lebah, tawon, dan semut, yang juga hidup bersama dalam kelompok. Karena itu, term politis tidak boleh diartikan secara harafiah “hidup bersama dalam sebuah *polis*” karena binatang tersebut di atas juga hidup berkelompok, tetapi harus dimengerti dalam pengertian yang lebih luas, “makhluk sosial”, dalam arti bahwa ada cara hidup khas dan tindakan bersama. Atas dasar ini, Aristoteles mengklaim

¹⁴⁸ P 1252 b 32-34

¹⁴⁹ NE 1097 b 11; 1162 a 17-18; 1169 b 18-19

¹⁵⁰ Bernard Yack, *Op. Cit.*, hlm. 62

bahwa ada binatang yang suka berteman atau hidup dalam kelompok; dan yang lain suka hidup sendirian. Manusia merupakan campuran keduanya.¹⁵¹

Sebagai makhluk yang suka hidup dalam kelompok, manusia diklasifikasikan dalam kelompok yang sama dengan makhluk lain, seperti lebah, tawon, dan semut sebab binatang-binatang ini pun hidup dalam kelompok. Sekalipun demikian, ada beberapa tindakan alamiah yang khas manusiawi.¹⁵² *Pertama*, ada kecenderungan ke arah kebaikan alam yang kita syering dengan semua makhluk hidup untuk mempertahankan hidup kita. Berkaitan dengan manusia, kecenderungan ini tidak semata-mata untuk hidup, tetapi juga untuk hidup yang baik. *Kedua*, manusia memiliki kecenderungan yang sama dengan makhluk lain eke arah tujuan khusus seperti relasi seksual dan memelihara keturunan. Akhirnya, manusia memiliki akal budi yang memampukannya untuk mengetahui bukan saja apa yang berguna dan tidak, tetapi juga apa yang benar dan adil. Sebagai makhluk rasional, manusia memiliki inklinasi alamiah untuk mengetahui kebenaran dan hidup dalam komunitas. Kemampuan akal budi inilah yang memampukan individu-individu untuk memasukan diri mereka ke dalam sebuah komunitas.

Keinginan untuk hidup bersama dalam sebuah *polis* adalah sebuah inklinasi natural. Klaim Aristoteles bahwa dorongan yang secara alamiah menggerakkan manusia kepada kehidupan sipil ini didasarkan pada kenyataan bahwa setiap manusia memiliki inklinasi untuk mencari beberapa jenis asosiasi dengan orang lain. Di mana saja manusia, di sana ada sejumlah organisasi sosial. Selalu ada tendensi dalam manusia untuk membentuk organisasi sosial, seperti keluarga, perkampungan, dan kota untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan timbal balik melawan bahaya umum. Kenyataan ini menunjukkan bahwa manusia dalam arti luas adalah makhluk sosial. Sebuah insting sosial ditanamkan dalam semua manusi secara alamiah. Manusia tidak dapat hidup sendirian dalam periode waktu yang lama. Mereka butuh hidup bersama dengan yang lain. Aristoteles mengatakan: “Sungguh, adalah aneh, untuk membuat seorang yang hidup sendirian sungguh-sungguh bahagia; tak seorangpun memilih seluruh dunia untuk dihuni sendirian, sebab manusia adalah makluk politik dan memiliki kodrat untuk hidup bersama dengan orang lain.”¹⁵³ Atau dalam *Politics* Aristoteles menegaskan: “Manusia, sekalipun tidak membutuhkan bantuan orang lain, berkeinginan untuk hidup bersama karena mereka disatukan oleh interese bersama yaitu kesejahteraan bersama. Inilah tujuan utama setiap individu dan juga negara.”¹⁵⁴

¹⁵¹ Aristotle, *The History of Animals*, penerj. D’Acry W. Thompson, dalam W.D. Ross, *The Works of Aristotle*, (Oxford: The Clarendon Press, 1910), 488 a 8-9

¹⁵² *Ibid.*, 589 a

¹⁵³ NE 1169 b 17-19

¹⁵⁴ P 1278 b 17-21

Manusia memiliki insting untuk kehidupan sosial yang hadir dalam semua tahap perkembangan historis manusia. Manusia memiliki kebutuhan untuk hidup bersama dengan orang lain sebagai merkea adalah makhluk politik. Binatang-binatang lain seperti lebah juga memiliki inklinasi untuk membentuk sebuah kelompok untuk hidup bersama dengan yang lain. Sekalipun demikian, bagi manusia, hidup bersama bukan semata-mata didasarkan pada keinginan untuk menghindari diri dari isolasi, tetapi juga untuk hidup dalam sebuah komunitas untuk memiliki model hidup yang lebih baik. Manusia bukanlah politik dalam arti sempit, tetapi dia juga adalah makhluk sosial karena aktivitasnya secara alamiah berlangsung dalam sebuah asosiasi sosial dan politik. Aktivitas yang dilakukan manusia bertujuan pada kebaikan tertinggi, yaitu *eudaimonia* (kebahagiaan).¹⁵⁵ Hal ini berarti bahwa manusia tidak puas dengan kehidupan pada umumnya atau dengan barang-barang yang dtemukan dalam keluarga atau perkampungan, tetapi dengan sesuatu yang lebih tinggi yang hanya dapat diperoleh dalam sebuah *polis*.

Konsep ini kemudian diambil alih St. Thomas Aquinas yang mengatakan: “*Homo est naturaliter politicus, id est, socialis*,”¹⁵⁶ (manusia secara alamiah adalah politik dalam arti sosial). Kata sosial berasal dari perbendaharaan Latin dan tidak ditemukan dalam kosa kata Yunani kuno. Term sosial sesungguhnya mencakupi kondisi manusia yang sangat fundamental. Kalau Plato dan Aristoteles tidak menggunakan term sosial, tidak berarti bahwa mereka tidak menyadari pentingnya hidup bersama, tetapi mereka menganggap bahwa hidup bersama merupakan suatu fenomena umum untuk semua binatang, bukan sesuatu yang khas manusiawi. Penggunaan kata *society* berkonotasi politik karena mengindikasikan sebuah aliansi antara masyarakat demi suatu tujuan khusus—termasuk di dalamnya aliansi untuk menguasai orang lain, melakukan tindakan kriminal, ataupun juga aliansi bisnis.

Karena itu, untuk memahami maksud Aristoteles yang sesungguhnya, kita harus menelusuri pengertiannya tentang manusia sebagai *zoon logon ekhon*, (makhluk hidup yang mempunyai kemampuan berbicara) atau yang kemudian dikenal dengan *rational animal*. Aristoteles menghubungkan komunitas dengan kemampuan khas manusia untuk berpikir, berbicara dan beragumen. Aristoteles mengatakan: “Bahwa manusia adalah lebih politik dari lebah atau makhluk yang hidup berkelompok lainnya adalah jelas. ... manusia adalah satu-satunya binatang yang dianugerahi oleh alam dengan hadiah berbicara.”¹⁵⁷ Menurut Aristoteles, manusia adalah makhluk sosial karena dia memiliki kemampuan berbicara. Hanya manusia memiliki kemampuan untuk belajar bahasa, berkomunikasi dan beragumen dengan yang lain.

¹⁵⁵ Tim Duval and Paul Dotson, “Political Participation and Eudaimonia in Aristotle’s Politics, dalam *History of Political Thought*, Vol. xix, no. 1, 1998, hlm. 23

¹⁵⁶ Hannah Arendt, *Op.Cit.*, 23-24

¹⁵⁷ P 1253 a 8-10

Manusia adalah makhluk politik pertama-tama karena mereka adalah makhluk rasional. Rasionalitas membantu manusia untuk memutuskan apa yang benar dan apa yang salah dengan bantuan orang lain. Adalah alamiah bagi manusia untuk hidup dalam polis seperti lebah hidup bersama dalam sarang lebah; sekalipun demikian, sarang lebah berbeda dari polis sama seperti manusia berbeda dari lebah. Lebah-lebah mendirikan sarang oleh dorongan insting semata-mata, tetapi manusia mempunyai kemampuan untuk mempertimbangkan berbagai alternatif, menentukan tujuan bersama, memilih sarana yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut, dan secara bersama terlibat aktif dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. “Bahasa memberikan manusia kemampuan untuk berefleksi, memilih tugas bersama dan berusaha mencapainya dalam kerja sama dengan yang lain dengan inteligensi yang tinggi daripada yang dimiliki oleh binatang lainnya. Kita dapat memiliki untuk membuat deliberasi kolektif sebagai tujuan bersama dan bukan sekedar sarana pemuasan keinginan politis kita.”¹⁵⁸

Lebih lanjut, akal budi memampukan manusia untuk mempertimbangkan keuntungan dan kerugian atau akibat dari tindakannya. Bernard Yack menulis: “Komunitas politis muncul demi keamanan, kenyamanan, dan kemandirian dengan menyatukan kelompok-kelompok yang berbeda-beda, yang memiliki barang dan keterampilan yang berbeda-beda ke dalam satu komunitas. Dan adalah alamiah, menurut Aristoteles, bagi manusia untuk membentuk komunitas seperti itu karena adalah alamiah bagi mereka untuk berpikir tentang dan berkomunikasi tentang keuntungan dan kerugian dari berbagai bentuk kehidupan bersama.”¹⁵⁹

Sesudah mengeliminasi makhluk lain dari kategori makhluk politis, Aristoteles membedakan manusia “yang lengkap” dan “tidak lengkap”. Perbedaan ini didasarkan pada kemampuan untuk menggabungkan diri ke dalam sebuah polis dan kualitas berpikir. Semua manusia, laki-laki, wanita, anak-anak dan hamba, memiliki keinginan yang sama untuk bergabung dengan dalam sebuah polis. Di sini, semua manusia adalah makhluk politik dalam arti umum. Sekalipun demikian, hanya laki-laki dewasa bebas yang adalah makhluk politik dalam arti yang lebih khusus karena mereka memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sipil. Laki-laki dewasa yang bebas dikatakan “lengkap” karena itu mereka adalah makhluk sosial dan politik; sedangkan wanita, anak-anak, dan hamba hanyalah makhluk sosial, tetapi bukan politik karena mereka tidak mempunyai cara untuk berpartisipasi secara penuh dalam politik. Semua manusia “lengkap” memiliki kemampuan untuk menghidupi kehidupan politis. Hal ini berarti bahwa mereka akan cenderung untuk memilih berpartisipasi dengan yang lain dalam mengejar kebaikan bagi *polis* di mana mereka menjadi anggotanya.¹⁶⁰ Hanya dengan terlibat dalam

¹⁵⁸ Richard Kraut, *Aristotle: Political Philosophy, Op. Cit.*, hlm. 251

¹⁵⁹ Bernard Yack, *Op. Cit.*, hlm. 65

¹⁶⁰ Josiah Ober, *Op. Cit.*, hlm. 297

aktivitas politik, laki-laki dewasa bebas menjadi sempurna karena partisipasi dan kerjasama merupakan karakter dari aktivitas politik.

Berkaitan dengan kemampuan akal budi, Aristoteles beragumen bahwa wanita, anak-anak, dan hamba tidak memiliki kemampuan untuk berpikir dan berdeliberasi.¹⁶¹ Kelompok ini sama dengan orang-orang Yunani awal, yang menyerahkan diri mereka kepada kontrol monarkis dan pahlawan-pahlawan karena mereka gagal untuk mengembangkan kemampuan akal budi mereka. Selanjutnya Aristoteles mengklaim bahwa *polis* terbaik terdiri dari warga negara yang adalah laki-laki dewasa yang memiliki kebijaksanaan praktis. Dalam diri orang-orang tersebut ada aktualisasi penuh kemampuan rasional manusia. Dalam sebuah *polis* yang dibentuk oleh warga negara seperti itu, perkembangan penuh kodrat manusia menjadi mungkin.

Lebih lanjut, Aristoteles menegaskan bahwa sebagai makhluk politik, manusia mengakui kenyataan bahwa kebaikan tertinggi haruslah dalam arti tertentu mandiri. Kemandirian dimaksudkan bagi orang yang hidup di tengah-tengah orang lain. Hal ini berarti bahwa secara alamiah, manusia berbuat baik hanya jika dia hidup di tengah keluarga, teman-teman, dan sesama warga negara. Aristoteles menulis: “Kemandirian tidak dimaksudkan untuk manusia dalam dirinya sendiri, bagi orang yang hidup sendirian, tetapi juga bagi orang tua, anak-anak, istri, dan secara umum bagi teman-teman dan sesama warga negara karena manusia dilahirkan untuk ke dalam kewarganegaraan.”¹⁶²

Aristoteles memberi label manusia sebagai makhluk politik bukan dalam arti psikologis, tetapi dalam arti model khusus kehidupan yang baik untuk manusia. Hal itu mengandaikan bahwa berpartisipasi dalam mengejar kebaikan bersama bersama orang lain merupakan salah satu unsur penting dari kehidupan yang baik. Sebagian dari tujuan semua manusia adalah untuk aktif bukan hanya dengan menggunakan secara baik barang-barang yang ditawarkan kepadanya oleh polis, seperti stabilitas, kebutuhan fisik manusia, tetapi juga dengan menjadi partisipan aktif dalam deliberasi dan pengambilan keputusan yang dibuat secara kolektif oleh semua warga negara. Dalam konteks ini, wanita, anak-anak, dan hamba dieliminasi dari kelompok ini karena mereka tidak mendapat keuntungan untuk hidup dalam polis sebagai partisipan politis yang aktif.¹⁶³

Tidak mungkin bagi manusia untuk merealisasikan potensinya secara penuh tanpa hidup dalam sebuah komunitas politis dan moral dengan orang lain.¹⁶⁴ Aristoteles mengatakan bahwa

¹⁶¹ Bernard Yack, *Op. Cit.*, hlm. 69

¹⁶² NE 1097 b 8-11

¹⁶³ Bernard Yack, *Op. Cit.*, hlm. 252

¹⁶⁴ Sybil Schwarzenbach, “A Political Reading of the Reproductive Soul in Aristotle,” dalam *History of Philosophy Quarterly*, Vol. 9, July, 1992, hlm. 248

memisahkan seseorang dari relasi moral dengan orang lain sama dengan menyangkal kodrat manusia. Orang yang tidak mempunyai keinginan untuk hidup bersama dalam sebuah polis bukanlah manusia, tetapi antara lebah atau dewa. Aristoteles mengatakan: “Seperti manusia sebagai yang terbaik di antara semua binatang kalau dia mencapai kesempurnaannya, jadi dia juga merupakan yang terburuk dari semuanya kalau dia dipisahkan dari hukum dan keadilan.”¹⁶⁵

Manusia hanya dapat mengembangkan kemampuannya lewat mengambil bagian dalam kehidupan komunitas. Kenyataan historis menunjukkan bahwa manusia secara alamiah membentuk polis, tinggal di dalamnya, dan mencapai tujuan alamiahnya dalam sebuah polis. Manusia secara alamiah berkeinginan untuk hidup dalam polis; mereka membutuhkan persahabatan dan pelayanan orang lain untuk merealisasikan potensi sebagai manusia. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa partisipasi dalam kehidupan komunitas sebagai keseluruhan adalah sesuatu yang alamiah dan otomatis. Manusia secara otomatis berpartisipasi dalam cara tertentu dalam polis. Lebih lanjut, karena komunitas politik menyediakan kesempatan bagi manusia untuk berkembang dan mencapai tujuan alamiahnya untuk hidup bahagia, maka partisipasi dalam kehidupan sipil sangat penting.

Dalam konteks ini sebuah komunitas politik mempunyai peranan yang sangat sentral untuk mencapai kebahagiaan individu. Misalnya, setiap individu mempunyai akal untuk mengobservasi keadilan tetapi dia membutuhkan negara untuk mengimplementasikan keadilan tersebut. Dibutuhkan negara untuk mengklasifikasikan tindakan-tindakan yang tidak adil dan memberlakukan hukuman bagi para penyelewengnya. Atau, diakui bahwa keluarga mempunyai peran penting dalam pendidikan, tetapi dibutuhkan sebuah peraturan umum yang bisa mengontrol dan mendukung pelaksanaan nilai-nilai luhur suatu komunitas politik lewat sistem pendidikan yang bersifat nasional. Karena itu argumen bahwa manusia sebagai makhluk politik tidak hanya mengindikasikan pentingnya partisipasi politik demi hidup yang baik, tetapi juga mengisyaratkan manusia sebagai makhluk sosial dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sebuah negara kota dan peraturannya. Berpartisipasi dalam urusan negara kota menjadi sesuatu yang tak bisa dihindari. Aristoteles menegaskan bahwa negara-kota bukan saja sebuah komunitas politik, tetapi juga sebuah komunitas moral yang dibentuk untuk mendidik dan melatih warganya untuk menjadi orang-orang yang baik dan bijaksana.¹⁶⁶

Manusia dilengkapi dengan kemampuan nalar untuk melihat keuntungan timbal balik yang diperoleh dari partisipasi dalam kelompok. Akibatnya, secara alamiah manusia didorong untuk membangun dan mempertahankan komunitas. Bagi Aristoteles, sebuah komunitas politik muncul secara natural dan sekaligus memiliki tujuan natural yaitu perkembangan dan pemenuhan

¹⁶⁵ P 1253 a 31-32

¹⁶⁶ Ernest Barker, *The Political Thought of Plato and Aristotle*, *Op. Cit.* hlm. 292

kemampuan manusia secara komplit. Alam mendisposisikan manusia untuk berpartisipasi dalam komunitas politis dan partisipasi pada gilirannya akan menyempurnakan perkembangan manusia sedemikian rupa sehingga terbuka kemungkinan untuk kebahagiaan.¹⁶⁷ Atau, secara singkat bisa dikatakan bahwa manusia mewarisi kodrat alamiah untuk membentuk kehidupan bersama, dan sebaliknya kehidupan bersama tersebut merupakan sesuatu yang baik secara natural sehingga menarik setiap orang untuk bergabung di dalamnya.

Manusia adalah makhluk politik harus juga dimengerti dalam arti bahwa dia mampu merealisasikan potential moral. Dia membutuhkan aturan dan kontrol yang disediakan oleh pemerintahan dalam sebuah negara. Kesempurnaan moral anggota *polis* dapat dicapai hanya lewat sarana pelaksanaan hukum secara publik. Negara berkewajiban menyediakan sarana, seperti hukum dan pendidikan, untuk menjadikan warga negara sebagai orang-orang yang baik. Hal ini tidak berarti bahwa pemerintah harus melaksanakan kontrol penuh terhadap kesejahteraan warganya. Aristoteles justru melihatnya secara lebih mendalam karena keyakinannya yang mendalam terhadap nilai positif dari pendidikan dan hukum. Dalam sebuah negara, di mana pendidikan dijalankan secara baik, serta hukum disusun dan dipraktikkan secara konsisten, warga negara dengan sendirinya dibentuk dan dibiasakan untuk hidup secara baik.

3.2. KEWARGANEGARAAN

Partisipasi politik menjadi sangat jelas ketika Aristoteles menganalisis dan membandingkan berbagai macam bentuk konstitusi untuk menemukan konstitusi ideal untuk sebuah negara-kota. Konsep Aristoteles tentang warga negara mempunyai relasi yang amat dekat dengan konsepnya tentang konstitusi karena ciri khas seorang warga negara yang baik berbeda dari satu sistem politik ke sistem politik lainnya. Aristoteles mulai dengan mengelimasi pengertian yang keliru tentang warga negara, di mana menjadi warga berarti menjadi residen di sebuah tempat tertentu atau orang yang memiliki hak legal karena adanya kontrak komersial.

Menurut Aristoteles, kedua kondisi di atas tidak menjadikan seorang individu warga negara karena kondisi seperti itu juga dimiliki oleh para hamba dan orang-orang asing karena seorang hamba juga tinggal dalam polis dan orang-orang asing juga bisa memiliki hak legal karena memiliki kontrak komersial dalam sebuah polis tertentu. Ciri khas yang tepat untuk kewarganegaraan ialah memiliki hak politis, yaitu hak untuk berpartisipasi dalam tugas-tugas publik dan syering dalam pelaksanaan kekuasaan politik. Karena itu Aristoteles mendeskripsikan

¹⁶⁷ Bernard Yack, *Op. Cit.*, hlm. 62

seorang warga negara sebagai orang yang mengambil bagian dalam pelaksanaan keadilan dan jabatan-jabatan kantor .”¹⁶⁸

Untuk membantu menspesifikasi kantor-kantor politik yang menyediakan kualifikasi bagi kewarganegaraan, Aristoteles membedakan antara kantor yang terbatas atau khusus dan kantor yang tidak dispesifikasi/tak terbatas. Kantor terbatas (*definite office*) dapat dijabat untuk suatu periode waktu tertentu, sedangkan kantor tak terbatas seperti keanggotaan dalam sebuah assembli deliberatif atau pengadilan umum, tidak ada batas waktunya. Menurut Richard Mulgan, definisi Aristoteles di atas harus dimengerti dalam konteks berpartisipasi dalam sebuah *indefinite office* (jabatan tanpa ada batas waktu) seperti keanggotaan di sebuah assembli atau pengadilan umum.¹⁶⁹ Tetapi hal ini cocok hanya di sebuah sistem demokrasi, di mana ada pertemuan umum yang dilaksanakan secara regular dan proses pengadilan diputuskan oleh seluruh rakyat, dan tidak cocok di sistem politik lain, di mana tidak ada pertemuan umum atau proses hukum diputuskan oleh hakim.

Karena itu, Aristoteles mengevaluasi definisi awal dan mengatakan bahwa warga negara adalah orang yang berhak mengambil bagian dalam tugas-tugas deliberatif dan yudisial.¹⁷⁰ Dalam definisi terakhir ini, penekanan bukan lagi pada keanggotaan dari sebuah *indefinite office* tetapi pada partisipasi, atau lebih tepat pada hak untuk berpartisipasi dalam proses deliberasi dan pengambilan suatu keputusan. Menjadi warga negara berarti berpartisipasi secara langsung dalam pelaksanaan sebuah kedaulatan, *sovereignty*. Menurut Aristoteles, setiap warga negara mempunyai hak untuk bergabung dalam pemilihan eksekutif. Orang-orang yang terpilih sebagai eksekutif bukan untuk berkuasa tetapi untuk mengobservasi dan melayani hukum. Karena itu menjadi seorang eksekutif bukanlah sesuatu yang luar biasa karena semua warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama.¹⁷¹

Definisi ini diakui Aristoteles cocok untuk hampir semua sistem pemerintahan/konstitusi. Misalnya, dalam sistem kerajaan (*kingship*) atau oligarkhi, kekuasaan deliberatif dan yudisial bisa dibatasi pada sekelompok kecil orang dan ada orang yang ada diluar kelompok ini—khususnya anggota militia—yang masih dianggap sebagai warga negara. Sekalipun definisi tidak sepenuhnya tepat, definisi tersebut sangat deskriptif dan bebas nilai. Karena itu Aristoteles mengajukan pertanyaan lain: siapa yang secara tepat disebut warga negara?

Ada pendapat umum waktu itu bahwa seorang warga negara ditentukan oleh kelahirannya. Hal ini berarti bahwa warga negara adalah orang-orang yang dilahirkan dari kedua

¹⁶⁸ P 1275 a 23-24

¹⁶⁹ Richard Mulgan, *Aristotle's Political Theory, Op.Cit.* hlm. 54

¹⁷⁰ P 1275 b 18-20

¹⁷¹ Ernest Barker, *The Political Thought of Plato and Aristotle, Op.Cit.*, hlm., 295

orang (bapa-mama) yang adalah warga negara. Seorang warga negara ditentukan oleh karena keturunannya dari orangtua yang adalah juga warga negara. Pendapat umum seperti ini menimbulkan dua persoalan dalam hubungannya dengan hak-hak konstitusional.¹⁷²

Pertama, bagaimana dengan generasi-generasi ketiga dan keempat dan seterusnya? Misalnya, orang-orang yang tinggal di daerah tertentu karena nenek atau moyang mereka warga negara di tempat itu tetapi orangtua mereka tinggal di tempat lain. Apakah mereka juga warga negara ditempat tinggalnya itu? Dalam kasus-kasus seperti ini, Aristoteles beragumen bahwa sejauh generasi-generasi ini memiliki hak-hak konstitusional untuk share dalam kantor yudisial dan deliberatif, mereka boleh disebut warga negara. Dia mengatakan bahwa sangat tidak mungkin menerapkan persyaratan “lahir dari bapa-mama yang adalah warga negara” kepada penduduk pertama dan pendiri negara.

Kedua, kesulitan yang paling serius berkaitan dengan kenyataan bahwa sebuah konstitusi dapat berubah entah secara normal atau lewat revolusi. Jadi hak warga negara diperoleh lewat perubahan konstitusi. Ada dua persoalan yang muncul: apakah warga negara baru yang menerima hak-hak sebagai akibat dari revolusi secara syah disebut warga negara? Dan, apakah konstitusi baru sebagai akibat perubahan revolusioner, valid dan syah? Aristoteles menjawab persoalan ini dengan mengklaim bahwa dari definisinya seseroang adalah warga negara bertolak dari kenyataan bahwa menjabat jabatan dikantor dank arena itu, walaupun konstitusi secara mendasar berubah, orang tersebut masih disebut warga negara bertolak dari hak-hak sipil yang ia telah terima.

Aristoteles lalu mendiskusikan status para pekerja.¹⁷³ Dia bertanya entahkah kelompok para pekerja boleh disebut warga negara karena mereka tidak memperoleh keutamaan sebagai orang-orang baik. Dan walaupun mereka warga negara, di kelompok manakah mereka harus ditempatkan? Karena para pekerja seperti ini bukanlah orang-orang asing, Aristoteles mempertimbangkan mereka sebagai warga negara dalam pengertian bersyarat, yaitu bahwa status mereka sebagai warga negara bergantung dari jenis konstitusi dari negara tersebut. Dalam beberapa konstitusi, para pekerja disebut warga negara, sedangkan dalam beberapa konstitusi lainnya sangatlah tidak mungkin bagi kelompok ini untuk menjadi warga negara. Dalam konstitusi terbaik dimana jabatan dibagikan berdasarkan keunggulan dan keutamaan, sangatlah tidak mungkin para pekerja berpartisipasi dalam pemerintahan, dank arena itu mereka tidak cocok disebut warga negara. Tetapi dalam demokrasi para pekerja terhitung dalam proses deliberasi dan yudisial dank arena itu mereka disebut warga negara.

Partisipasi merupakan kata kunci dalam definisi Aristoteles tentang warga negara di atas, tetapi beliau juga mengakui bahwa partisipasi dalam deliberasi dan judisial menuntut

¹⁷² Richard Mulgan, *Aristotle's Political Theory, Op. Cit.*, hlm. 60

¹⁷³ P 1278 a 10-25

kemampuan dan juga waktu luang, *leisure*. Inilah kualitas yang merupakan hadiah yang hanya dimiliki oleh beberapa orang tertentu. Kualitas tersebut tidak dimiliki oleh para pekerja, seperti tukang, petani, dan pedagang, yang begitu sibuk dengan urusan pemenuhan kebutuhan fisik dan karenanya tidak mempunyai waktu untuk bersantai dan mengabdikan diri mereka untuk belajar dan memenuhi kebutuhan spiritual lainnya. Karena itu, partisipasi dalam sebuah pemerintahan hanya dibatasi pada orang-orang yang mampu dan mempunyai banyak waktu luang. Lebih lanjut Aristoteles mengingatkan, karena jabatan di kantor-kantor atau magistrasi sangat terbatas dan hanya bisa ditempati oleh beberapa orang, dibutuhkan suatu sistem politik di mana warga negara yang sederajat mengambil bagian untuk memimpin dan dipimpin.¹⁷⁴ Warga negara yang berkualitas diberikan kesempatan secara bergantian untuk memimpin dan dipimpin. Aristoteles mengklaim bahwa dalam pemerintahan politik, orang belajar untuk memimpin lewat pertamanya membiarkan diri dipimpin lebih dahulu.

Menjadi warga negara berarti terlibat dalam urusan publik di sebuah kota sebagai keseluruhan dan juga terlibat aktif dalam urusan pribadi dengan anggota keluarga atau teman akrab. Aristoteles mengakui bahwa ada orang yang lebih memperhatikan urusan pribadi ketimbang urusan publik, dan juga sebaliknya. Contohnya, orang-orang miskin karena menginginkan banyaknya waktu luang, *leisure*, tidak bisa berpartisipasi dalam assemblé atau menjadi juror di pengadilan.¹⁷⁵ Mereka tidak menginginkan jabatan di kantor-kantor karena tidak ada yang didapatkan dari posisi tersebut, tetapi orang-orang kaya, yang tidak membutuhkan uang akan dengan senang hati menerima jabatan tersebut.

Walaupun demikian, ada kemungkinan bahwa negara menyediakan kesempatan bagi semua untuk berpartisipasi dalam assemblé dan pengadilan umum dengan membayar orang-orang yang hadir dalam assemblé tersebut. Disini, orang-orang kaya memilih untuk tidak berpartisipasi dalam assemblé dan pengadilan umum karena tidak membutuhkan uang, tetapi orang miskin diberikan kesempatan dan ada kemungkinan besar bagi mereka untuk berpartisipasi karena adanya pembayaran. Hal ini menunjukkan bahwa orang-orang miskin dan orang-orang kaya mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam assemblé dan pengadilan umum, dan jabatan-jabatan administrative. Karena itu, orang miskin seperti pekerja dan petani dianggap sebagai warga negara tetapi hanya dalam pengertian terbatas.

Setelah memahami apa artinya menjadi warga negara dalam sebuah negara ideal menurut Aristoteles, kita mendapatkan sekilas bayangan tentang tuntutan untuk menjadi seorang warga negara yang baik. Negara yang baik membutuhkan warga negara yang baik pula. Aristoteles mengakui bahwa setiap jenis konstitusi menuntut kualitas tertentu dari warga negaranya. Karena

¹⁷⁴ P 1259 b 4-9

¹⁷⁵ P 1293 a 7-9

itu sesuai dengan konstitusi negara, kualitas warga negara bisa berbeda-beda, tetapi kualitas orang baik berlaku untuk semua jenis konstitusi dalam semua situasi dan kondisi. Orang yang baik memiliki kebajikan yang sempurna, yang cocok untuk semua model sistem politik, sedangkan seorang warga negara yang baik memiliki kebajikan tertentu yang dituntut oleh negara dan sistem politiknya.¹⁷⁶ Dalam konteks ini, Aristoteles menegaskan bahwa seorang individu bisa menjadi seorang warga negara yang baik tanpa harus memiliki kebajikan sempurna seperti seorang yang baik. Richard Kraut menyimpulkan bahwa kebajikan orang-orang baik cocok untuk semua kondisi: mereka tidak menjadi bajik di kota-kota tertentu dan tidak bajik di kota-kota lainnya. Sebaliknya, kualitas yang dibutuhkan untuk mempertahankan sebuah kota sangat khusus sesuai dengan konstitusi kota tersebut. Kebajikan sipil berbeda-beda tetapi kebajikan sempurna tidak. Hal itu berarti bahwa seseorang bisa memiliki kebajikan sipil tanpa harus memiliki kebajikan sempurna.¹⁷⁷

Konsep Aristoteles tentang partisipasi dalam melaksanakan tugas-tugas publik atau syering dalam memimpin sebuah komunitas politik sangat dekat kaitannya dengan pengertian modern. Aristoteles menegaskan bahwa di samping terlibat aktif dalam urusan publik sebagai warga negara, seorang individu juga terlibat aktif dalam urusan pribadi dengan anggota keluarga dan teman-teman akrab, teman bisnis, yang juga menyita cukup banyak waktu. Dalam konteks ini, ada perbedaan yang cukup jelas antara kehidupan publik dan kehidupan pribadi. Sekalipun demikian konsep kehidupan pribadi tidak identik dengan pengertian modern liberal dan individualistik, di mana orang dilarang mengintervensi urusan pribadi orang lain, atau dalam konteks yang lebih luas, negara tidak diperbolehkan melanggar hak-hak pribadi orang perorangan.¹⁷⁸ Toleransi didasarkan atas penghormatan terhadap privasi individual. Interferensi terhadap hak individu dalam bentuk apapun juga dianggap illegal. Aristoteles dan orang-orang Yunani pada umumnya mempunyai konsep yang sangat berbeda. Menurut Aristoteles, aspek personal dan komunal seorang individu selalu berkaitan erat dengan komunitas dan peraturan-peraturannya. Orang Yunani kuno pada umumnya bangga dengan praktek demokrasi karena toleransinya terhadap hak pribadi, tetapi toleransi bukan didasarkan pada pribadi dan hak-haknya tetapi pada kesuksesan sebuah komunitas dalam mengakomodasi diversitas yang dimiliki oleh kelompok-kelompok sosial yang bergabung di dalamnya.

3.3. KONSTITUSI

¹⁷⁶ Richard Kraut, *Aristotle: Political Philosophy, Op.Cit.*, hlm.363

¹⁷⁷ *Ibid.*, 364

¹⁷⁸ Richard Mulgan, *Aristotle's Political Theory, Op.Cit.*, 198

Aristoteles menangkap problem tentang apa yang menentukan identitas orang-orang yang ada dalam sebuah polis dan langsung menyimpulkan bahwa konstitusi merupakan faktor satu-satunya yang secara tepat menggambarkan identitas polis. Aristoteles menulis: “Karena polis adalah sebuah komunitas warga negara dalam sebuah konstitusi, maka ketika konstitusi berubah dan diganti menjadi konstitusi lainnya, *polis* juga turut berubah.”¹⁷⁹ Dari kutipan ini jelas terlihat bahwa perbedaan sistem politik dilihat sebagai metode yang berbeda-beda dalam mengatur hidup dan kekuasaan dalam sebuah negara.

Untuk maksud ini Aristoteles menganalisis konstitusi, yang merupakan diskusi lanjutan dari warga negara, karena konstitusi menentukan bagaimana warga negara menjalani hidup mereka sendiri dan bagaimana kekuasaan politik diatur dan dilaksanakan. Sebuah komunitas politik memiliki tujuan bersama dan otoritas tertinggi yang diatur dalam konstitusi. Karena itu, Aristoteles mendefinisikan konstitusi sebagai: “Pengaturan yang diadopsi negara untuk membagi jabatan-jabatan dan menentukan siapa yang berkuasa dan tujuan yang dikejar bersama.”¹⁸⁰ Konstitusi mengatur jabatan pemerintahan dan menentukan siapa yang berhak memegang jabatan-jabatan politis. Ada dua aspek penting yang diidentifikasi secara jelas dalam definisi di atas, yaitu aspek etis yang berkaitan dengan tujuan yang dikejar bersama, dan aspek institusional yang mencakupi struktur-struktur institusi politik dan pembagian kekuasaan.

Dalam mengkombinasi kedua aspek ini, Aristoteles mengikuti pola pikir Yunani. Orang-orang Yunani tidak membedakan secara tegas aspek legal dan etis. Ketika mereka berbicara tentang konstitusi Sparta, misalnya, mereka berpikir tidak saja tentang kekuasaan raja-raja dan pengaturan konstitusional lainnya, tetapi juga tentang cara hidup dan idealisme yang diekspresikannya. Tetapi penekanan mereka pada aspek institusional. Aristoteles memperluas konsep Yunani ini dengan memasukkan aspek etis. Sekalipun berkonotasi etis, konstitusi merupakan suatu konsep deskriptif, dalam arti menggambarkan nilai-nilai aktual yang ada dalam komunitas partikular, dan bukan konsep universal tentang etika.

Perspektif etis dapat dilihat dari tujuan bersama yang dikejar secara bersama oleh semua warga negara, seperti dirumuskan dalam konstitusi tersebut. Tujuan bersama tersebut dengan kebaikan bersama (*bonum commune*). Dalam sebuah polis, warga negara hendaknya bersatu untuk mengejar kebaikan bersama dan mempertahankan konstitusi. Seorang warga negara dinilai baik kalau dia bisa membantu negara mencapai tujuan bersama dan memberikan andil dalam mempertahankan konstitusi.

¹⁷⁹ P 1276 a 1-5

¹⁸⁰ P 1274 b 38-39

Sedangkan perspektif institusional terungkap dalam pengaturan pembagian jabatan dan penentuan siapa yang memimpin. Aristoteles membedakan tiga lembaga utama yang harus dimiliki sebuah konstitusi, yaitu deliberatif, magisterial, dan judicial.¹⁸¹ Dari ketiganya, lembaga deliberatif memainkan peran yang jauh lebih penting karena beberapa alasan. *Pertama*, dia bertanggungjawab memutuskan kebijakan luar negeri, perang, dan perdamaian, serta membentuk atau memutuskan aliansi dengan negara lain. *Kedua*, dia memiliki fungsi legal yang berkaitan dengan pembuatan dan penafsiran hukum-hukum. *Ketiga*, dia memberlakukan hukuman kepada orang yang bersalah. *Keempat*, dia melaksanakan pemilihan anggota magistra dan meneliti kinerja mereka sesudah masa kerja mereka selesai. Aristoteles menganggap lembaga pemerintahan ini sebagai yang tertinggi karena tugasnya tidak sekedar membuat keputusan tetapi mempertahankan kontrol atas lembaga-lembaga pemerintahan lainnya.

Dengan latar belakang pemikiran seperti ini Aristoteles lalu meneliti konstitusi yang ada di Yunani pada waktu itu. Ada tiga model konstitusi yang berlaku, yakni monarki, di mana kekuasaan politik dipegang oleh seorang individu; oligarki, kekuasaan dipegang oleh orang-orang terpilih; dan demokrasi, kekuasaan berada di tangan semua warga negara.¹⁸² Aristoteles mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan ketiganya dalam *Politics V*. Setelah membandingkan ketiganya, Aristoteles mengklaim bahwa ketiganya tidak ideal karena gagal untuk mempromosikan kebahagiaan, tidak sesuai dengan tujuan utama negara sebagai satu kesatuan utuh, dan tidak berpihak pada kepentingan warga negara. Ketiganya mengabaikan interese orang yang dipimpin dan hanya berfokus pada keuntungan pemimpinnya. Hal ini sangat bertentangan dengan ideal sebuah *polis* dan gagal untuk mengakui bahwa *polis* merupakan suatu asosiasi dari orang-orang yang bebas dan sederajat.¹⁸³

Aristoteles menyadari bahwa dalam sebuah perkumpulan sipil, pemimpinnya bisa satu, beberapa, atau banyak orang. Tetapi model kepemimpinan tersebut di atas tidak perfek. Alasannya, di satu pihak, kepemimpinan oleh massa hanya bisa dibenarkan kalau ketika masyarakat berkumpul bersama secara kolektif, mereka bisa memutuskan sesuatu secara objektif. Tetapi masalahnya, dalam proses pengambilan keputusan tersebut, kualitas pribadi sering kali diabaikan. Kualitas terbaik seorang individu diabaikan demi mendukung keputusan bersama. Di lain pihak, kepemimpinan oleh beberapa orang terbaik menciptakan kesulitan untuk mencapai suatu kesepakatan karena begitu banyaknya kualitas yang dimiliki oleh para pemimpin.

¹⁸¹ P 1295 a 25-35

¹⁸² A. E. Taylor, *Op. Cit.*, , 103

¹⁸³ Ernest Barker, *The Politics of Aristotle, Op.Cit.*, hlm. 112-113

Karena itu, untuk mengakomodasi massa terutama orang miskin untuk berbagi kekuasaan dan juga kualitas yang dibutuhkan untuk membuat suatu deliberasi dan keputusan, Aristoteles menganjurkan pentingnya memberikan kekuasaan deriberasi dan judisial kepada masyarakat umum. Ini berarti bahwa massa memilih orang-orang berkualitas untuk menjadi anggota suatu magistrasi atau memegang jabatan-jabatan publik dan masyarakat pula meminta pertanggungjawaban orang-orang terpilih tersebut pada masa akhir jabatan mereka. Tetapi beda dengan pengertian modern, menurut Aritoteles, orang-orang tersebut bukan dipilih untuk menjadi penguasa tetapi menjadi pengobservasi dan pelayan hukum negara.

Sadar bahwa ketiga model konstitusi diatas sangat mudah disalahgunakan dan tidak sesuai dengan tujuan negara-kota, Aristoteles mengusulkan alternatif kepemimpinan seorang raja (*kingship*) dan kepemimpinan oleh orang-orang terbaik (aristokrasi). Keduanya menurut Aristoteles merupakan model yang ideal sejauh kepemimpinan, entah seorang raja atau orang-orang terbaik, diarahkan untuk kebaikan negara dan warga negaranya.¹⁸⁴ Jika di sebuah negara kota ada satu atau beberapa orang individu yang mempunyai kelebihan secara moral dan intelektual, merekalah yang dipilih untuk memegang jabatan tertinggi karena kekuasaan harus diberikan kepada orang yang mempunyai kemampuan untuk melayani sebuah negara. Jika seorang raja karena memiliki kebijaksanaan praktis dan mengerti secara baik tugas utamanya untuk menciptakan kedamaian bagi warganya, dia hendaknya menjadi pemimpin.

Lebih lanjut ditegaskan, seorang raja yang diakui dan dihormati rakyatnya karena superioritas dalam hal watak dan intelek, berhak untuk mendapat otoritas secara permanen. Prinsip yang sama diaplikasikan juga dalam sebuah sistem Aristokrasi. Pandangan Aristoteles tentang Aristokrasi tidak jelas sehingga menimbulkan kebingungan karena pada awal buku IV *Politics*, dia hanya mengatakan bahwa kekuasaan hendaknya diberikan kepada orang-orang terbaik dan prinsip dasar pemberian kekuasaan adalah kebajikan.

Karena itu, untuk memahami maksud Aristoteles, kita harus mengerti konsepnya tentang orang-orang terbaik. Menurutnya, orang-orang terbaik adalah orang-orang terpandang atau mulia (*noble*) karena berpendidikan, berbudaya, dan berasal dari keluarga terhormat, serta berjasa, terutama memberikan sumbangan besar untuk proyek-proyek yang berguna untuk kepentingan negara secara keseluruhan. Aristoteles menyebut tindakan berjasa terakhir ini dengan kebajikan *magnificence*.¹⁸⁵ Seorang yang magnifisen tidak menghabiskan uang untuk diri sendiri tetapi untuk kebaikan bersama, sehingga dia layak mendapat kehormatan. Karena itu, pada hemat saya, kebajikan harus dibaca dalam konteks ini. Orang yang berpendidikan memiliki kebajikan intelektual dan orang-orang magnifisen memiliki kebajikan moral. Hanya orang yang

¹⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 114

¹⁸⁵ NE 1122 b 1-1123 a 30

mempunyai keutamaan intelektual dan moral inilah yang layak memimpin karena mereka mampu menciptakan sebuah model pemerintahan yang baik demi kepentingan bersama.¹⁸⁶ Hal ini sesuai dengan ide dasar Aristokrasi, pemerintahan oleh beberapa orang demi kepentingan bersama.

Aristoteles berpendapat bahwa aristokrasi merupakan konstitusi ideal, tetapi dalam situasi ketiadaan aristokrasi, Aristoteles lebih memilih *politeia* atau pemerintahan konstitusional, di mana kelas menengah menjadi pemimpin. Ada dua alasan mengapa *politeia* ideal untuk sebuah negara.¹⁸⁷ *Pertama*, kepemimpinan tersebut mengutamakan kebijaksanaan kolektif karena setiap individu yang memiliki kebajikan dan kebijaksanaan praktis memberikan kontribusi yang sama kepada kelompok. *Kedua*, kepemimpinan tersebut menuntut adanya pendidikan dan latihan. Untuk memimpin sebuah negara dibutuhkan keahlian yang diperoleh lewat proses latihan dan pendidikan yang tepat seperti halnya keahlian dalam bidang kedokteran dan navigasi.

Dalam sebuah negara dibutuhkan orang-orang yang ahli dalam bidang tertentu untuk mengambil keputusan dan menjalankan pemerintahan tetapi mereka sendiri harus dikontrol oleh hukum dan peraturan negara. Jika ada beberapa orang yang punya keahlian yang luar biasa, mereka hendaknya diberikan kesempatan untuk memimpin atas kehendak atau persetujuan mereka sendiri. Menurut prinsip keadilan, kekuasaan politik diberikan kepada orang-orang berkualitas selama tindakan mereka konsisten dengan kualitas luar biasa yang mereka miliki. Warga negara yang baik akan dengan senang hati atau sadar mengakui pemimpin yang memberikan teladan yang sempurna.¹⁸⁸ Mereka akan dengan senang hati mengorbankan hak memiliki kekuasaan politik karena itulah tindakan adil yang harus dilakukan. Adalah sesuatu yang salah kalau orang berusaha mempertahankan kekuasaan padahal ada orang lain mempunyai kemampuan yang lebih unggul. Aristoteles menegaskan bahwa kekuasaan politik harus dilaksanakan di antara orang-orang yang sederajat sesuai dengan prinsip keadilan, dan ketika prinsip keadilan menuntut, kekuasaan harus dilepas dan diberikan kepada orang lain tanpa ada rasa kehilangan dan frustrasi.

Aristoteles lebih lanjut menegaskan bahwa konstitusi yang baik memberikan kesempatan kepada orang-orang kelas menengah untuk memimpin. Menurut Aristoteles, orang-orang dari kelas menengah memiliki harta secukupnya untuk mengadakan peralatan perang demi menciptakan militer yang kuat untuk mempertahankan stabilitas sebuah negara. Stabilitas merupakan salah satu tujuan utama negara karena yang paling dibutuhkan oleh warga negara

¹⁸⁶ A. E. Taylor, *Op.Cit.*, 104

¹⁸⁷ Richard Mulgan, *Aristotle's Political Theory*, *Op. Cit.*, 104-105

¹⁸⁸ P 1284 b 33

ialah stabilitas atau kedamaian sehingga mereka dapat menghidupi hidup mereka secara penuh dan bahagia.

Lebih lanjut Aristoteles menegaskan bahwa kelas menengah merupakan sebuah kelompok sosial yang paling stabil dan nyaman dalam sebuah komunitas karena tidak ada orang kaya yang membuat orang miskin irihati yang dapat menciptakan revolusi sosial. Alternatif ini mencegah adanya perpecahan antara kelompok kaya dan miskin. Dan dalam kaitan dengan memimpin dan dipimpin model konstitusi seperti ini memberikan harapan bahwa pemerintah akan didukung penuh oleh warga negara. “Orang kaya dan orang miskin tidak akan setuju untuk diperintah oleh satu sama lain, tetapi keduanya mungkin setuju untuk diperintah oleh kelas menengah yang memainkan peran sebagai pengantara atau mediator.”¹⁸⁹

¹⁸⁹ Richard Mulgan, *Aristotle's Political Theory, Op. Cit.*, hlm. 110

BAB IV

NILAI PARTISIPASI POLITIK

Sesudah menganalisis secara detail konsep Aristoteles tentang etika dan politik seperti termuat dalam *Nicomachean Ethics* dan *Politics*, pada bab II dan III, tampak dengan jelas ambivalensi posisi Aristoteles atas nilai partisipasi politik. Dari perspektif etika, Aristoteles berkesimpulan bahwa aktivitas berpikir (kontemplasi) jauh lebih bernilai mendatangkan kebahagiaan sempurna bagi manusia ketimbang aktivitas politik. Tetapi, dari perspektif politik, Aristoteles seakan-akan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam politik karena hanya dalam negara, seseorang bisa mengembangkan segala potensinya dan menjadi manusia yang sempurna. Hal ini mengindikasikan adanya nilai positif dalam keterlibatan dalam aktivitas politik. Untuk memahami ambivalensi sikap Aristoteles ini berikut berikut ini akan diuraikan perbandingan antara aktivitas berpikir dan berpolitik untuk melihat beberapa makna atau nilai dari partisipasi politik, serta catatan kritis yang sekaligus merupakan relevansi ide Aristoteles dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia saat ini.

4.1. AKTIVITAS BERPIKIR DAN BERPOLITIK

Aristoteles menganalisis secara detail kedua bentuk aktivitas, berpikir dan berpolitik ini ketika dia berusaha untuk mendeskripsikan model hidup yang baik, dalam arti yang bisa mendatangkan kebahagiaan bagi manusia. Analisis bertolak dari pertanyaan dasar: model hidup mana yang lebih mendukung pencapaian kebahagiaan bagi seseorang? Tampaknya, dalam seluruh uraian etikanya Aristoteles mengagung-agungkan filsafat karena orientasinya pada kontemplasi tentang kebenaran yang mendatangkan kebahagiaan, dan mengeritik segala sesuatu yang bersifat duniawi, termasuk aktivitas politik. Karena itu dia mengeritik negarawan yang terlalu sibuk dengan urusan politik sehingga tidak mempunyai waktu luang untuk hal-hal yang lebih spiritual, yang berkaitan dengan esensinya sebagai makhluk rasional. Di sini tampak jelas bahwa bagi Aristoteles aktivitas politik mendapat posisi yang lebih rendah ketimbang aktivitas filosofis, kontemplasi. Ketika berdiskusi tentang negara ideal dalam *Politics VII*, Aristoteles mengulangi kembali argumen serupa yaitu bahwa filsafat lebih bernilai ketimbang politik.

Aristoteles memperkenalkan pengertian yang lebih substansial tentang kebahagiaan, dengan klaim bahwa kebahagiaan meliputi juga aktivitas bajik. Kebahagiaan bukan sekedar tujuan

terakhir dan tertinggi, tetapi juga suatu aktivitas.¹⁹⁰ Sebagai suatu aktivitas, kebahagiaan melibatkan bagian tertinggi dari jiwa manusia yaitu intelek. Aktivitas intelek seperti berpikir dan berkontemplasi merupakan aktivitas yang paling baik dan sempurna dan karena itu merupakan kebaikan tertinggi.¹⁹¹ Sebagai kebaikan tertinggi, kebahagiaan merupakan produk sebuah kehidupan aktif dari rasionalitas manusia. Dalam konteks ini, kebahagiaan diartikan sebagai “aktivitas kehidupan sempurna yang sesuai dengan kebajikan sempurna.”¹⁹²

Di sini, Aristoteles mengaitkan konsep kebahagiaan dengan kebajikan. Kebajikan sebagai suatu kemampuan eksistensial untuk berperilaku secara baik bisa terjadi dalam kaitannya dengan emosi atau karakter manusia. Inilah yang dikenal dengan kebajikan moral. Kebajikan moral berkaitan erat dengan seorang individu dalam interaksi sosialnya dengan orang lain. Tetapi, ada juga kebajikan yang terjadi dalam kaitannya dengan intelek atau aktivitas intelektual. Inilah yang dikenal dengan kebajikan intelektual. Menurut Aristoteles, kebajikan intelektual lebih bernilai karena melibatkan bagian terbaik dalam diri manusia yaitu intelek.

Lebih dari itu, aktivitas intelektual seperti kontemplasi atau *theoria* merupakan suatu aktivitas yang dilakukan demi dirinya sendiri. Tidak ada tujuan lain yang lebih tinggi yang dikejar oleh aktivitas tersebut. Bertolak dari kedua fakta ini, Aristoteles menegaskan bahwa kontemplasi merupakan suatu aktivitas ilahi, mandiri, dan sangat rileks.¹⁹³ Inilah juga kriteria-kriteria untuk hidup yang baik dan bahagia. Dalam konteks ini, Aristoteles mengklaim bahwa kebajikan intelektual lebih bernilai ketimbang kebajikan moral.

Persoalannya, bagaimana hubungan antara kebajikan intelektual dan kebajikan moral karena tidak ada indikasi bahwa orang yang mampu berfilsafat bakal mampu mensubordinasi semua aktivitas--termasuk praktek kebajikan moral--sebagai sarana untuk mencapai tujuan lainnya. Atau, ketika berdiskusi tentang kebajikan moral tidak ada isyarat bahwa orang yang sungguh baik akan memilih aktivitas tertentu untuk memfasilitasi kontemplasi. Penjelasan yang lebih konsisten ditemukan dalam ide Aristoteles tentang *mixed ideal*, di mana kebajikan moral secara independen bernilai sekalipun dianggap kurang penting dibandingkan dengan kontemplasi dalam upaya mencapai kebahagiaan. Orang yang bijaksana dan baik akan dengan sendirinya mengabdikan bagian terbaik dari dirinya untuk berkontemplasi, tetapi dia juga membutuhkan kehadiran orang lain dan juga sebuah negara untuk memenuhi kebutuhan hidup yang lebih manusiawi.¹⁹⁴ Karena itu, isu yang paling penting bukanlah bagaimana kebajikan moral

¹⁹⁰ J.L. Ackrill, *Essays on Plato and Aristotle, Op. Cit.*, hlm. 182

¹⁹¹ NE 1098 15-16

¹⁹² J.L. Ackrill, *Essays on Plato and Aristotle, Op.Cit.*, 195

¹⁹³ Kathleen Wilkes, *Op. Cit.*, 347-348

¹⁹⁴ Richard Mulgan, “Aristotle and the Value of Political Participation,” 199

dikaitkan dengan kontemplasi tetapi bagaimana peranan partisipasi politik dalam pelaksanaan kebijakan moral itu sendiri.

Karena seorang warga negara yang baik adalah orang yang mengoptimalkan kemampuan rasionalnya untuk mencapai hidup terbaik, dia akan mengatur cara hidupnya atas pertimbangan rasional tentang tujuan hidup dan interese yang akan mendatangkan kebahagiaan.¹⁹⁵ Entahkah kehidupan praksis identik dengan kehidupan seorang negarawan sehingga *the mixed ideal* berarti suatu kombinasi antara kontemplasi dan kenegarawanan dan karena itu orang yang bijaksana dan baik harus berpartisipasi dalam politik? Atau dapatkah kebijakan moral dilaksanakan tanpa harus terjun ke dalam karier politik sehingga *the mixed ideal* berarti kombinasi antara kontemplasi dengan kehidupan pribadi seorang individu?

Jawaban atas pertanyaan ini sangat tergantung dari pandangan Aristoteles tentang kebaikan eksternal. Aristoteles membedakan kebaikan eksternal seperti kekayaan, kesehatan, dan persahabatan, dari kebaikan internal seperti kebajikan. Kebaikan eksternal sangat penting sekalipun hanya sebagai tambahan dalam usaha untuk mencapai kebahagiaan. Hal ini bisa dicapai lewat dua cara; *pertama*, kebaikan eksternal merupakan instrumen penting untuk pelaksanaan suatu aksi yang bajik. Untuk bisa melaksanakan kebajikan moral persahabatan, orang membutuhkan teman, kemurahan hati mengandaikan adanya kekayaan, atau orang tidak bisa melaksanakan tindakan-tindakan bajik tanpa adanya kesehatan yang baik. *Kedua*, tanpa adanya kebaikan eksternal tertentu, kebahagiaan akan berkurang. Misalnya, ketiadaan kecantikan sejak lahir akan mengurangi kebahagiaan.¹⁹⁶ Atau kematian seorang anggota keluarga atau teman akrab akan mempengaruhi kebahagiaan seseorang.

Aristoteles menentang pandangan yang dikembangkan oleh Stoics bahwa kebajikan sendiri bisa membuat orang bahagia dan kebaikan eksternal tidak berpengaruh apapun. Tetapi Aristoteles juga menentang kecenderungan untuk menjadikan kebaikan eksternal sebagai tujuan utama hidup. Dia menolak pemimpin politik yang mengejar kebajikan sebagai sarana untuk mendapatkan kehormatan dan kekayaan.¹⁹⁷ Sekalipun kebaikan eksternal penting untuk kebajikan, hanya jumlah yang secukupnya yang dibutuhkan.

Ada indikasi bahwa Aristoteles sesungguhnya menentang dua klaim yang ekstrim yaitu bahwa orang yang kaya secara otomatis hidup bahagia dan orang yang tidak beruntung atau tidak mempunyai harta sedikit pun bisa hidup bahagia. Untuk bisa hidup bahagia orang harus memiliki harta dalam jumlah yang secukupnya: tidak berlebihan atau tidak berkekurangan. Tetapi konsep

¹⁹⁵ Kathleen Wilkes, *Op. Cit.*, 354

¹⁹⁶ NE 1099 b 2-3

¹⁹⁷ NE 1095 b 22-23

ini tidak berlaku untuk kekuasaan dan kehormatan politik—salah satu kebaikan eksternal—karena kehilangan kekuasaan atau pembatalan kewarganegaraan tidak akan menghilangkan kemungkinan orang untuk bisa hidup baik dan bahagia, seperti halnya pada orang yang kehilangan teman atau anggota keluarga. Orang akan bisa hidup bahagia sekalipun dia kehilangan jabatan politis atau dikucilkan dari kehidupan publik.¹⁹⁸ Karena kehidupan sosial dalam sebuah negara kota di mana orang diberi kesempatan untuk berinteraksi dengan anggota keluarga dan teman akrab merupakan hal yang sangat esensial untuk hidup secara baik dan bahagia. Orang masih bisa hidup baik dan bahagia selama dia mempunyai harta yang cukup dan orang-orang dekat.

Entahkah kesimpulan bahwa partisipasi politik tidaklah esensial bagi seorang individu dalam usahanya untuk mencapai kebahagiaan dari perspektif etika ini bisa dijadikan dasar bahwa Aristoteles mempromosikan penarikan diri dari aktivitas politik? Pada hemat saya, argumen etika tidak boleh dilihat sebagai upaya Aristoteles untuk mempromosikan filsafat dan penarikan diri dari aktivitas politik karena kenyataannya, walaupun Aristoteles menganggap filsafat merupakan aktivitas terbaik, tetapi beliau tetap membuka peluang bagi negarawan jika kesempatan ditawarkan sebagai bagian dari kehidupan sosial di sebuah negara kota. Aristoteles tidak dengan sepenuh hati mempromosikan—entah keterlibatan aktif dalam ataupun penarikan diri dari politik. Sekalipun demikian, dari seluruh uraian etika dan politiknya, kita bisa melihat adanya pengaruh positif tertentu yang dialami oleh warga negara yang berpartisipasi dalam politik. Atau, ada nilai atau makna positif yang bisa didapatkan oleh setiap warga negara yang terlibat aktif dalam kehidupan negara. Karena itu, menurut Richard Mulgan, diskusi tentang superioritas filsafat dalam *Politics VII* sangat unik bertolak dari tiga alasan yang sekaligus mengindikasikan nilai partisipasi politik dalam perspektif Aristoteles.¹⁹⁹

4.1.1. Negara Ideal

Fokus dari diskusi ialah perbandingan antara hidup baik untuk sebuah kota dan seorang individu, isu yang tidak ditemukan dalam *Nicomachean Ethics*. Argumen supremasi filsafat harus dilihat pada level negara, khususnya negara ideal yang didambakan oleh semua orang, dan bukan pada level individu. Ciri khas sebuah negara ideal adalah independen, mandiri, dan stabil yang memungkinkan warga negaranya untuk menikmati hidup bahagia secara fisik dan spiritual. Inilah juga ciri khas filsafat. Filsafat merupakan aktivitas independen dan berkaitan dengan hal-hal ilahi. Penilaian Aristoteles harus dibaca dalam konteks itu. Kalau demikian maka superioritas filsafat yang dikedepankan di sini tidak secara otomatis berarti bahwa Aristoteles mengabaikan nilai positif dari aktivitas politik.

¹⁹⁸ Richard Mulgan, "Aristotle and the Value of Political Participation," *Op. Cit.*, 201

¹⁹⁹ *Ibid.*, 208-210

Tetapi sebaliknya, ada nilai positif yang secara implisit terkandung dalam pernyataan tersebut yaitu bahwa berpartisipasi politik untuk menciptakan negara yang ideal, pada gilirannya akan membawa kebahagiaan fisik dan rohani bagi orang yang terlibat dalam proses tersebut. Seperti Plato, Aristoteles menekankan karakter moral atau etis dari sebuah negara. Negara dipahami sebagai sebuah persekutuan etis karena orang-orang yang berkumpul di dalamnya bertindak bersama untuk mengejar kebaikan bersama. Itu berarti, negara mempunyai tujuan moral yang luar biasa mulia karena negara ada untuk membantu manusia memperoleh kehidupan yang baik, untuk menciptakan lingkungan sosial, ekonomi, moral dan sosial, dengannya setiap warga negara bisa menyempurnakan wataknya ke arah yang lebih baik sebagai makhluk rasional. Karena itu, kalau warga negara terlibat dalam negara seperti itu, dia akan berkembang menjadi makhluk rasional yang sempurna.

Berdasarkan pandangan ini, tidak boleh serta-merta disimpulkan bahwa Aristoteles menganut paham totalitarianisme, di mana kekuasaan negara mutlak, kepentingan negara dijamin dengan mengorbankan kepentingan individu dan semua kepentingan individu dinasionalisasikan. Keunggulan negara dalam pemikiran Aristoteles tidak dikaitkan dengan kekuasaan, tetapi prioritas kepentingan. Secara hirarkis, negara paling tinggi, dan oleh sebab itu dalam prioritas kepentingan pun negara mendapat posisi yang lebih ketimbang kepentingan individu. Dalam mengejar kepentingan negara, secara tak langsung kepentingan pribadi pun terpenuhi karena negara adalah kumpulan pribadi-pribadi.²⁰⁰ Di samping itu, tujuan negara ini dikaitkan dengan kenyataan bahwa negara adalah sebuah komunitas yang memiliki kekuasaan tertinggi. Seperti disinggung di depan, Aristoteles percaya bahwa negarawan, lewat hukum dan institusi pemerintahan hendaknya melaksanakan kontrol terhadap warga negaranya untuk membantu warga negara mencapai kehidupan yang baik.

Karena itu, kalau dilihat dari tujuan negara dengan segala institusi yang ada di dalamnya, maka kesimpulan Aristoteles bahwa negara memiliki tujuan yang paling mulia dibandingkan dengan tujuan pribadi-pribadi, mengindikasikan penilaian positifnya atas fungsi negara. Menurutnya, negara ada untuk membantu warganya memperoleh kehidupan yang baik. Tujuan negara adalah memanusiaawikan warganya. Hanya dalam negara, manusia menemukan jati dirinya sebagai makhluk yang mengada, sosial, dan politis. Negara menjamin tercapainya kebajikan yang sempurna dalam hidup moralitas terpuji, yaitu moralitas yang memberi kualitas khusus bagi manusia agar semakin menjadi dirinya sendiri dan siap melakukan sesuatu demi kepentingan negara.

²⁰⁰ J. H. Rapar, *Op. Cit.*, hlm 70

4.1.2. Institusi Hukum dan Pendidikan

Penekanan Aristoteles atas supremasi aktivitas berpikir, harus dibaca dalam konteks pembicaraannya tentang tujuan negara dan institusi-institusi yang ada di dalamnya. Aristoteles berulang kali menegaskan bahwa negara ada untuk mendidik warga negara menjadi baik dan bijaksana. Inilah tugas moral sebuah negara. Dibandingkan dengan pandangan liberal modern yang menganggap moralitas sebagai suatu urusan pribadi, yang hanya bisa dilaksanakan dalam keluarga, gereja, ataupun asosiasi-asosiasi pribadi lainnya, Aristoteles justru menekankan bahwa moralitas bisa menjadi urusan publik dalam sebuah negara. Tetapi itu tidak boleh dibaca bahwa negara boleh bertindak totaliter dengan mengintervensi dan mengatur segala sesuatu yang berurusan dengan privasi warga negara. Penekanan Aristoteles tentang peran negara dalam meningkatkan moralitas bangsa harus dilihat dalam penilaian positifnya terhadap institusi-institusi hukum dan pendidikan. Aristoteles berkeyakinan bahwa negara dengan segala macam institusi yang ada di dalamnya, seperti pendidikan dan hukum berfungsi untuk mengabadikan tujuan moral sebuah negara yang pada akhirnya menciptakan kesatuan negara itu sendiri. Kesatuan *polis* tidak hanya terdiri dari kenyataan bahwa orang-orang mendiami wilayah tertentu di bawah satu pemerintahan, tetapi juga karena mereka syering bersama sebuah tujuan moral. Dan kesatuan seperti itu bergantung pada pendidikan dan hukum yang diciptakan dan diselenggarakan oleh negara. Aristoteles menegaskan bahwa pendidikan, dalam pengertian yang luas, merupakan fungsi dari negara dan fungsi tersebut adalah membantu manusia untuk menjadi baik.

Pertama, institusi hukum. Aristoteles memberikan posisi sentral bagi hukum. Hukum memiliki kewibawaan tertinggi melebihi kekuasaan. Kekuasaan, tugas dan kewajiban warga negara bersumber pada hukum. Aristoteles mengidentikkan hukum dengan kecerdasan yang tak dipengaruhi oleh kecenderungan manusiawi. Aristoteles membedakan dua macam hukum, hukum kebiasaan dan tertulis.²⁰¹ Hukum kebiasaan adalah segala tradisi, adat istiadat yang secara lisan diterima sebagai pengikat hidup bersama berdasarkan konvensi bersama. Hukum lahir dari suatu proses panjang, dimatangkan, dan diuji keabsahannya dalam sejarah. Hal itu mengandaikan satu kebijaksanaan kolektif yang hidup dalam masyarakat. Ada semacam persetujuan umum bahwa suatu tradisi itu baik dan benar serta dapat menjamin kelangsungan hidup bersama. Sedangkan hukum tertulis adalah hukum yang disusun manusia dalam bentuk peraturan atau undang-undang tertulis. Hal ini mengandaikan adanya sekelompok orang yang arif bijaksana yang mengetahui secara tepat prinsip moral yang harus ada dalam sebuah negara. Mereka juga harus memiliki kebijaksanaan teoretis dan praktis agar dapat memahami apa yang baik untuk umum sehingga dapat memproduksi hukum tertulis yang baik, dalam arti selalu berorientasi pada

²⁰¹ *Ibid.*, hlm. 65

kebaikan dan kesejahteraan umum. Jadi, kebajikan, dalam hal ini kebijaksanaan penting dalam penyusunan dan sekaligus pelaksanaan hukum-hukum tertulis tersebut.

Supremasi hukum penting untuk hidup moral terpuji. Memang benar bahwa seseorang tidak bisa dibuat baik secara literer oleh hukum, tetapi dengan larangan untuk tidak melakukan tindakan tidak bermoral dan mendorong orang untuk melakukan tindakan bermoral, negara lewat hukum-hukum yang baik, akan membantu perkembangan karakter yang baik dalam diri warga.

Kedua, pendidikan. Ada hubungan yang erat antara politik dan pendidikan. Kedua aktivitas tersebut tidak boleh dipisahkan. Politik memiliki tanggungjawab secara menyeluruh demi pencapaian hidup yang baik, sementara pendidikan merupakan sarana yang paling berpengaruh ke arah pencapaian tujuan tersebut. Sebuah negara ideal hendaknya memiliki materi-materi dan teritori dan juga institusi-institusi sosial dan politik yang tepat. Tetapi, tanpa pendidikan yang direncanakan secara baik akan sangat sulit untuk merealisasikan sebuah negara ideal. Karena itu pendidikan harus menjadi tanggungjawab publik. Menurut Aristoteles, negara hendaknya mengatur pendidikan sesuai dengan konstitusi.

Pendidikan dalam sebuah negara ideal diarahkan untuk pencapaian tujuan negara, kehidupan yang baik untuk semua anggota penuh negara tersebut. Inilah salah satu aspek kontrol umum yang dilakukan oleh hukum dan pemimpin atas tingkah laku individual. Ada tiga faktor dalam pendidikan: *nature*, *habit*, intelek. Aristoteles hanya mendiskusikan *nature* dan *habit*. Penekanan atas *habit* mengikuti pandangan Aristoteles tentang perkembangan moral. Hanya dengan pembiasaan orang akan sungguh-sungguh menjadi bajik dan memilih tindakan-tindakan yang benar untuk alasan-alasan yang tepat pula.

Untuk mengembangkan tingkahlaku yang benar, orang-orang muda harus secara tepat dibimbing. Mereka harus dilindungi dari pengaruh-pengaruh jelek seperti kontak dengan orang-orang yang berkualitas rendah dan berkarakter tidak baik, dengan bahasa-bahasa yang tidak baik, dan dengan cerita-cerita, drama-drama atau bahkan musik yang cenderung merusak. Perlu adanya sensor yang ketat. Aristoteles tidak menyetujui diberikan kebebasan untuk memilih apa yang buruk. Adalah lebih baik memaksa mereka untuk melakukan apa yang baik dengan harapan bahwa suatu saat mereka akan melakukan hal yang baik dengan kesadaran sendiri. Alasan utama pendekatan yang otoriter seperti ini adalah bahwa ideal politik dan etis merupakan sesuatu yang statis dan tidak berubah. Generasi tua telah dididik secara moral benar dan memiliki nilai-nilai politik yang sesuai sehingga mereka mampu meneruskan hal itu kepada generasi-generasi muda.

4.1.3. Tugas Negarawan

Aristoteles memperlakukan filsafat dan politik secara adil ketika membandingkan keduanya. Aristoteles tidak menentang semua aktivitas politik, tetapi hanya aktivitas yang mengagung-agungkan kesejahteraan pribadi dan pengejaran kekuasaan yang lalim dan imperial. Kritik Aristoteles tidak bermaksud untuk mendiskreditkan kehidupan seorang negarawan secara keseluruhan. Kepemimpinan oleh orang-orang yang sederajat dan bebas tidak identik dengan kepemimpinan lalim karena seorang pemimpin ideal, dalam perspektif Aristoteles, hendaknya memiliki keutamaan moral dan intelektual. Aristoteles percaya bahwa kebajikan dan kebahagiaan dapat ditemukan secara obyektif sehingga pemimpin mampu mengetahui jawaban yang tepat terhadap persoalan-persoalan etis.

Tugas kontrol politis atas moralitas mungkin kalau pemimpin-pemimpinnya bijaksana. Aristoteles mengandaikan bahwa jabatan politis merupakan satu bentuk kehormatan yang mempunyai nilai tertentu. Karena itu bernilai, kehormatan harus dibagikan secara adil. Dalam mendistribusikan kehormatan dan kekuasaan dalam negara, perlu diperhatikan fungsi atau tujuan negara. Negara bukan sekedar ada tetapi ada untuk suatu kehidupan yang baik. Pemimpin yang memiliki kebajikan civic dapat memberikan kontribusi untuk pencapaian tujuan kehidupan yang baik sebuah negara. Pemimpin seperti ini akan mampu menanamkan kebajikan dalam diri warga negaranya. Karena itu, klaim kebajikan bergantung pada kemampuan pemimpin untuk memimpin dan sekaligus partisipasi mereka dalam mengejar tujuan sebuah negara.

Dalam konteks inilah kritik Aristoteles terhadap negarawan dalam *Nicomachean Ethics*, harus dibaca. Negarawan dikritik semata-mata karena mereka tidak memiliki waktu luang untuk mengabdikan diri kepada aktivitas-aktivitas teoretis, yang sesuai dengan kodratnya sebagai manusia yang berakal budi. Di samping itu, kritik itu juga harus dibaca dalam terang *Politics VII*, di mana *leisure* yang merupakan gabungan dari tujuan etis sebuah negara ideal, paralel dengan kedamaian sebuah kota secara keseluruhan. Aktivitas politik atau kehidupan praksis mempunyai nilai yang penting untuk individu dan juga negara. Aristoteles tetap mempertahankan aktivitas politik sebagai sesuatu yang bernilai karena negara ada untuk mencari kedamaian bukan perang, dan kegiatan semua warga negara diarahkan untuk mengejar kebaikan bersama yang bertolak dari prinsip keadilan.

Di sini, Aristoteles tidak mengaitkan politik dengan ketiadaan *leisure*. Dalam diskusi tentang tujuan sebuah negara dan sistem pendidikan, Aristoteles mengkritik negara tertentu seperti Sparta yang menjadikan kebajikan keberanian sebagai sesuatu yang sangat sentral dan karena itu berkonsentrasi hanya pada perang.²⁰² Aristoteles tidak menyangkal nilai dari partisipasi aktif lewat pelaksanaan tugas publik secara baik sehingga penekanan atas *leisure* tidak boleh dilihat sebagai sesuatu yang inkonsisten dengan pelaksanaan tugas sebagai warga negara di

²⁰² P 1333 b 11-26

sebuah negara ideal. Aristoteles menginginkan bahwa sebuah negara ideal dan warga negara yang baik hendaknya berkonsentrasi pada kedamaian dan bukannya perang. Ide *leisure* tidak mengeksklusifkan partisipasi politik atau tidak menjadi alasan bagi seorang warga negara yang bajik untuk berhati-hati dalam pelaksanaan tugas-tugas publiknya.

4.2. CATATAN KRITIS DAN RELEVANSI

Dari uraian politik, tampak jelas bahwa Aristoteles sesungguhnya mempromosikan sebuah model pemerintahan partisipatif. Hanya saja, model partisipasi yang digambarkan oleh Aristoteles memang hanya cocok dan mungkin dalam sebuah negara yang kecil dalam ukuran dan jumlah penduduknya karena hanya dalam negara seperti itu keterlibatan langsung warga dalam berbagai urusan negara dimungkinkan. Atau, hanya dalam negara kecil, demokrasi langsung bisa diterapkan dan negara bisa menyediakan berbagai kemungkinan bagi warga untuk merealisasikan seluruh kemampuannya agar bisa hidup bahagia. Sekalipun demikian, dalam keseluruhan tulisan etika dan politik, secara khusus dalam uraiannya tentang partisipasi politik dan nilai seperti yang dikedepankan di atas, Aristoteles membuat beberapa klaim yang sungguh valid. Klaim ini bisa dijadikan pedoman dalam mengatur semua negara, kecil atau besar, bersistem demokrasi langsung ataupun tidak langsung dan sekaligus menilai proses penyelenggaraan sebuah negara.

Pertama, berkaitan dengan partisipasi warga negara. Dalam konteks Indonesia, adalah suatu fenomena umum bahwa semakin banyak orang yang bersikap apatis terhadap segala urusan negara, termasuk di dalamnya dengan sengaja tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Mengapa demikian? Pada hemat saya, fenomena ini tidak terlepas dari krisis multidemisional yang melanda bangsa kita sejak zaman Orde Baru (Orba), di mana politik kepentingan dan sistem kekeluargaan yang merelativasikan paham warga negara, menyuburkan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Negara, khususnya institusi-institusi politis tidak berfungsi maksimal karena dikendalikan oleh “penguasa” (ekonomis, sosial, dan politis) yang syarat dengan kepentingan tersembunyi. Lembaga pendidikan yang semakin berorientasi pasar, peradilan yang tidak independen, legislatif yang hanya mengesahkan saja produk undang-undang yang diskriminatif, seperti UU Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 dan UU Pornografi tahun 2008, serta eksekutif yang korup, mengindikasikan kenyataan bahwa negara kita kehilangan kewibawaan moral. Negara, yang seharusnya menjadi sebuah asosiasi moral karena warganya rasional dan bermoral, justru telah berbalik menjadi medan perebutan kepentingan. Akibatnya, terjadilah krisis vertikal antara warga negara dan negara, yang memunculkan sikap apatisisme dari pihak warga negara.

Karena itu, untuk mendorong dan menghidupkan kembali partisipasi aktif masyarakat, negara hendaknya tetap mempertahankan eksistensinya sebagai sebuah asosiasi moral, dalam arti semua institusi yang ada di dalamnya berfungsi secara baik dan benar. Misalnya, lembaga pendidikan dibentuk sedemikian rupa sehingga sungguh-sungguh menjadi sarana pembentuk watak atau karakter moral warga, hukum diciptakan dan diberlakukan secara tepat sesuai dengan cita-cita yang terkandung di dalamnya, dan pemerintahan hendaknya bersih dan berwibawa, tidak bersikap lalim, serta selalu memperhatikan kepentingan rakyat banyak. Kalau demikian maka warga negara akan dengan senang hati berpartisipasi dalam seluruh aktivitas negara sehingga terhindarlah sikap apatisisme. Inilah salah satu poin yang ditegaskan Aristoteles. Negara harus merupakan sebuah asosiasi moral karena warga negara yang mendiaminya adalah makhluk rasional dan bermoral. Sebagai makhluk rasional, manusia secara bersama membentuk komunitas politis di mana mereka menjadi anggotanya. Dan sebagai makhluk bermoral, manusia memiliki kemampuan secara sukarela untuk berkumpul demi merealisasikan satu tujuan bersama dan untuk mempertahankan kedamaian negara.

Kedua, Aristoteles menegaskan bahwa kehormatan publik dan jabatan-jabatan politis tetap dinilai dan diterima dengan senang hati jika ditawarkan. Dalam konstitusi ideal, warga *polis* memilih orang-orang terbaik karena memiliki kebajikan untuk menjadi pemimpin (satu ataupun beberapa) dalam sebuah pemilihan umum langsung. Dalam sebuah *polis*, semua warga negara mengenal secara baik dan personal satu sama lain, sehingga pemilihan langsung “orang-orang terbaik” oleh warga negara dimungkinkan. Hasil pemilihan itu kemudian ditawarkan kepada orang-orang terpilih dan dalam terang partisipasi, Aristoteles mengatakan bahwa orang-orang tersebut hendaknya dengan senang hati menerima kesempatan untuk memimpin itu sebagai bagian dari tugas sosialnya. Dan, kalau dalam perjalanan kesempatan atau kepercayaan itu ditarik kembali, maka mereka tidak boleh merasa frustrasi dan tidak puas. Orang harus dengan rela menyerahkan jabatannya kalau memang dia tidak dipercayai lagi ataupun kalau ada orang lain yang lebih kompeten dan *qualified* untuk jabatan tersebut.

Ide ini harus menjadi titik tolak bagi setiap orang yang mau berpartisipasi secara langsung entah menjadi anggota legislatif atau eksekutif, seperti presiden, gubernur, dan seterusnya sampai di tingkat paling bawah kepala desa. Pada zaman modern ini, ketika kekuasaan diperebutkan oleh semua orang dalam sebuah pemilu, kualifikasi intelektual dan moral tidak sepenuhnya dipertimbangkan, khususnya dari pihak orang-orang yang mencalonkan diri. Orang seakan-akan memaksakan diri sehingga tidak mengherankan kalau selalu muncul “kelompok sakit hati” dalam setiap pemilihan pemimpin. Inilah yang terjadi dalam beberapa pemilihan kepala daerah di Indonesia akhir-akhir ini yang berakhir ricuh dan menimbulkan konflik horizontal antara para calon dan pendukung-pendukung mereka. Yang kalah tidak menerima kekalahannya dan yang menang menganggap kemenangan sebagai kesempatan emas untuk “berkuasa”. Ataupun, dari pihak pemilih sendiri yang tidak mempertimbangkan kualifikasi obyektif seorang calon, tetapi lebih mengutamakan aspek kedekatan emosional, di mana kriteria

utamanya adalah “orang saya dan bukan orang saya.” Dalam kebudayaan timur, di mana kekerabatan masih sangat dominan, maka yang sering menjadi pilihan utama adalah “orang saya”. Dengan demikian, pemilih mengabaikan kualifikasi moral dan intelektual.

Di samping itu, kalau kita memperhatikan kinerja para anggota legislatif mulai dari pusat sampai ke daerah, keluhan yang sering muncul adalah mereka tidak peka terhadap kepentingan rakyat yang diwakili, mereka tidak menghadiri sidang-sidang dewan, dan walaupun hadir, mereka hanya duduk, diam, dan dengar. Hal ini mengindikasikan bahwa anggota legislatif kita seakan-akan tidak memiliki motivasi yang jelas. Atau dengan kata lain, anggota dewan tidak sadar akan kemampuan diri dan tujuan keterlibatannya dalam politik praktis. Padahal, menurut Aristoteles, kedua kesadaran ini vital untuk berpartisipasi dalam politik. Kalau setiap warga negara sadar akan kemampuan diri dan melihat kesempatan untuk memimpin sebagai bagian dari tugas sosialnya untuk mengabdikan negara dan masyarakat, maka konflik horizontal bisa dihindari dan dengan demikian sebuah proses pergantian pemimpin akan berlangsung secara aman dan damai.

Ketiga, negara memiliki tujuan moral yang hendaknya disosialisasikan dan dipertahankan. Negara berfungsi untuk mengartikulasikan dan mempertahankan tujuan negara. Aristoteles menamakan tujuan itu sebagai *bonum commune* (kebaikan bersama). Memang diakui bahwa masyarakat modern semakin kritis karena selalu berpikir tentang alternatif terbaik dari segala yang sudah ada. Karena itu muncul banyak tujuan variatif yang sekaligus menuntut adanya diversifikasi sarana untuk meraih tujuan-tujuan tersebut. Sarana atau instrumen harus diperbanyak untuk mengejar tujuan yang banyak dan beranekaragam. Sekalipun demikian, variasi tujuan dan diversifikasi sarana mengandaikan pengakuan terhadap hak individu untuk ikut serta dalam merumuskan dan merealisasikan tujuan-tujuan tersebut. Atau dengan kata lain, setiap warga negara ikut aktif dalam proses politik. Inilah inti dari demokrasi.

Riswandha Imawan mensinyalir bahwa ada dua dimensi utama dalam demokrasi, yaitu dimensi proses (musyawarah) dan dimensi tujuan (mufakat).²⁰³ Persoalan seringkali muncul karena penekanan pada pencapaian tujuan atau aspek formal demokrasi ketimbang proses atau aspek substansialnya. Karena itu, perlu ditekankan kembali pentingnya deliberasi, yang diartikan sebagai “sebuah percakapan dengannya individu-individu saling berbicara dan mendengarkan sebelum membuat sebuah keputusan kolektif.”²⁰⁴ Model inilah yang dinamakan oleh filsuf kontemporer dengan demokrasi deliberatif, di mana sebuah keputusan bersama harus merupakan hasil dari sebuah proses demokratis yang melibatkan semua orang yang akan menikmati keputusan lewat sarana argumentasi yang ditawarkan oleh dan kepada peserta yang komit terhadap nilai rasionalitas dan ketidakberpihakan.

²⁰³ Riswandha Imawan, “Faktor-Faktor Penghambat Upaya Meningkatkan Kualitas Demokrasi dalam Pemilu di Indonesia,” dalam *Mendemokratiskan Pemilu*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 1996, hlm. 67

²⁰⁴ John Elster, (ed.), *Deliberative Democracy*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1998)

Demokrasi, dalam konteks deliberasi berarti bahwa masyarakat di segala tingkatan dilibatkan dalam proses pembicaraan, perumusan dan pengambilan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kehidupan mereka sendiri. Atau seperti dikatakan oleh Arendt, komunitas politik secara radikal demokratis. Karena politik adalah aktivitas publik, maka seseorang tidak dapat menjadi bagian (terlibat) darinya tanpa dalam arti tertentu hadir di runtu publik. Terlibat dalam politik berarti secara aktif berpartisipasi dalam berbagai forum publik, di mana keputusan-keputusan yang berakibat pada komunitas diambil. Partisipasi seperti ini penting demi pembentukan relasi manusiawi dan solidaritas antara warga negara. Bertolak dari pertimbangan di atas maka dapat dikatakan bahwa Arendt sesungguhnya membangun sebuah konsep pemerintahan demokrasi partisipatif deliberatif, yang bertentangan langsung dengan bentuk pemerintahan birokratis dan elitis yang menjadi karakter zaman modern. Itu berarti, politik didasarkan pada deliberasi kolektif tentang semua hal yang mempengaruhi komunitas politik dan politik menemukan ekspresi otentiknya kapan saja warga negara berkumpul bersama dalam ruang publik untuk membuat deliberasi dan memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan konsen bersama.

Konsep pemerintahan demokrasi partisipatif deliberatif mengandaikan bahwa membuat keputusan merupakan kemampuan khas para pelaku politik, yang adalah semua warga negara dan bukannya hanya elite politik. Arendt menekankan kemampuan warga negara untuk berbicara, berdiskusi, memutuskan, dan akhirnya bertindak bersama, demi mempertahankan komunitas yang merupakan hasil ciptaan bersama karena adanya tindakan dan pembicaraan. Justru kemampuan inilah yang sering kali diabaikan oleh pemerintah dengan anggapan keliru bahwa masyarakat apolitis, tidak tahu banyak tentang persoalan-persoalan publik.

Seiring dengan era globalisasi, penekanan hendaknya pada substansi demokrasi, di mana kekuasaan atau kewenangan masyarakat untuk merumuskan dan melaksanakan kehendak mereka hendaknya diseimbangkan dengan kekuasaan negara. Ide seperti inilah yang sedang dihidupkan kembali dengan adanya *civil society* (masyarakat warga). Masyarakat warga muncul karena adanya dorongan untuk menciptakan hubungan simetris antara masyarakat dengan institusi politik demi terciptanya demokrasi.²⁰⁵ Demokratisasi berlangsung secara baik kalau negara dan masyarakat memiliki kekuasaan yang seimbang. Kalau wacana politik pada zaman klasik, khususnya ide Aristoteles dianalisis secara cermat, kita dapat melihat pentingnya komunitas yang baik dalam menjamin kedamaian dan keteraturan antara warga. Bentuk sipil dari komunitas dan civilitas mewakili tuntutan untuk menjadi warga negara yang baik. Nilai penting yang melekat dalam masyarakat warga adalah partisipasi politik, di mana masyarakat berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan publik dan negara bisa mempertanggungjawabkan kepada

²⁰⁵ Sunyoto Usman, "Peran Civil Society (masyarakat Madani) dalam Tata Pemerintahan," dalam <http://www.google.co.id/search?hl=id&q=sunyoto+usman+tentang+peran+civil+society&meta=hm.1>

masyarakat bahwa kebijakan publik yang diambil sesuai dengan ketentuan yang berlaku, efisien, dan efektif.²⁰⁶

Di satu pihak, partisipasi warga dalam aktivitas politik tidak bisa dipaksakan, tetapi akan muncul secara otomatis kalau negara dapat mempertahankan eksistensinya sebagai sebuah asosiasi moral dengan mengintegrasikan kedua fungsi utamanya, yaitu mengorganisir pembagian barang-barang serta mengartikulasikan dan mempertahankan tujuan negara. Negara yang dapat mengintegrasikan kedua tugas tersebut di atas akan mempertahankan keteraturan politiknya. Atau dengan kata lain, sebuah negara yang tidak dapat lagi menjustifikasi keberadaan atau eksistensinya akan kehilangan arti dan otoritas di hadapan warganya sehingga warga bersikap apatis. Dan di lain pihak, warga negara pun tidak bisa memaksakan diri untuk memegang jabatan-jabatan tertentu dalam negara karena jabatan-jabatan itu disediakan untuk orang yang memang pantas dan layak. Itu berarti bahwa jabatan-jabatan publik hendaknya disyerinkan bersama dengan berpedoman pada prinsip keadilan. Inilah yang harus menjadi pedoman dalam pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan umum demi pendewasaan rakyat dalam berdemokrasi sekaligus meningkatkan partisipasi rakyat.

Rakyat yang dewasa dalam berdemokrasi bukanlah rakyat yang diam dan menyerahkan begitu saja wewenangnya kepada pihak luar untuk mengambil keputusan atas nama mereka sendiri, tetapi rakyat yang mampu membuat prioritas dalam hidupnya, yang mempunyai kekuatan tawar menawar, yang dengan ikhlas dan berjiwa besar menerima segala konsekuensi atas keputusan apapun yang diambil dengan bebas dan sadar—termasuk kehilangan jabatan publik—, dan yang dengan bebas, sadar, dan aktif berpartisipasi dalam seluruh proses pengambilan keputusan terutama yang berkaitan langsung dengan nasib hidup mereka. Atau seperti dikatakan oleh Arief Budiman, partisipasi rakyat akan mungkin kalau kelembagaan negara ini kuat, dalam arti kekuasaan hukum efektif, sistem pengadilan yang adil, lembaga kepolisian yang tegas tanpa menindas, dan adanya kebiasaan berdemokrasi, di mana orang dengan ikhlas menerima kekalahan dalam sebuah pemilihan yang demokratis.²⁰⁷ Inilah nilai-nilai yang diharapkan Aristoteles muncul dalam diri warga negara yang berpartisipasi secara aktif dalam *polis*.***

²⁰⁶ *Ibid.*, 4

²⁰⁷ Arief Budiman, "Negara dan Masyarakat Madani," dalam St. Sularto (ed.), *Masyarakat Warga dan Pergulatan Demokrasi*, Jakarta: Penerbit Kompas, 2001, hlm. 40

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ackrill, J. L. *Essays on Plato and Aristotle*. (Oxford: Oxford University Press, 1997)
- Aristoteles. *Politics*. Penerj. Benjamin Jowett. Dalam *The Basic Works of Aristotle*. Richard KcKeon, (ed.). (New York: Random House, Inc., 1941).
- . *Nicomachean Ethics*. Penerj. W.D. Ross. Dalam Richard McKeon (ed.). *The Basic Works of Aristotle*. (New York: Random House, 1941)
- . *Physics*. Penerj. R. P. Hardie. Dalam *The Basic Works of Aristotle*. Richard McKeon (ed.). (New York: Random House, Inc., 1941)
- . *The History of Animals*. Penerj. D'Acry W. Thompson. Dalam W.D. Ross (ed.). *The Works of Aristotle*. (Oxford: The Clarendon Press, 1910)
- . *Eudemian Ethics*. Penerj. Michael Woods. (Oxford: Clarendon Press, 1982)
- Arendt, Hannah. *The Human Condition*. (Chicago: The University of Chicago Press, 1958)
- Audi, Robert (ed.). *The Cambridge Dictionary of Philosophy*. (Cambridge: Cambridge University Press, 1999)
- Barker, Ernest. *The Politics of Aristotle*. (Oxford: Oxford University Press, 1958)
- . *The Political Thought of Plato and Aristotle*, (New York: Dover Publications, Inc., 1959)
- Balme, D. M. "Teleology and Necessity." Dalam *Philosophical Issues in Aristotle's Biology*. (Cambridge: University Paperbacks Press, 1987)
- Bertens, K. *Sejarah Filsafat Yunani*. (Yogyakarta: Kanisius, 1975)
- Budiman, Arief. "Negara dan Masyarakat Madani." Dalam St. Sularto (ed.). *Masyarakat Warga dan Pergulatan Demokrasi*. Jakarta: Penerbit Kompas, 2001
- Collins, Susan. "Justice and Moral Virtue in Aristotle's Nicomachean Ethics." Dalam Aristide Tessitore (ed.). *Aristotle and Modern Politics: The Persistence of Political Philosophy*. (Indiana: University of Notre Dame Press. 2002)

Cooper, John M. "Hypothetical Necessity and Natural Teleology." Dalam *Philosophical Issues in Aristotle's Biology*. (Cambridge: University Paperbacks Press, 1987)

------. "Contemplation and Happiness: A Reconsideration." Dalam *Synthese* 72, 1987

Copleston, Frederick. *A History of Philosophy*. (New York: A Division of Doubleday, Inc., 1962)

Crisp, Roger dan Slote, Michael (eds.). *Virtue Ethics*. (Oxford: Oxford University Press, 1997)

Duval, Tim dan Dotson, Paul. "Political Participation and Eudaimonia in Aristotle's Politics." Dalam *History of Political Thought*, Vol. xix, no. 1 1998

Elster, John (ed.). *Deliberative Democracy*. (Cambridge: Cambridge University Press, 1998)

Guthrie, W.K.C. *A History of Greek Philosophy, Vol. 6, Aristotle: An Encounter*. (Cambridge: Cambridge University Press, 1981)

Hallowel, John H. dan Porter, Jene M. *Political Philosophy: The Search for Humanity and Order*. (Ontario: Prentice Hall Canada Inc., 1997)

Hartoko, Dick. *Kamus Filsafat*. (Jakarta: Rajawali Press, 1980)

Imawan, Riswandha. "Faktor-Faktor Penghambat Upaya Meningkatkan Kualitas Demokrasi dalam Pemilu di Indonesia." Dalam *Mendemokratiskan Pemilu*. (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 1996)

Kant, Immanuel. *Critique of Practical Reason*. Penerj. Mary Gregor. (Cambridge: Cambridge University Press, 1997)

Kraut, Richard. *Aristotle: Political Philosophy*. (Oxford: Univeristy Press, 2002)

------. *Aristotle on the Human Good*, (Princeton: Princeton University Press, 1989)

Losin, Peter. "Aristotle Doctrine of the Mean." Dalam *History of Philosophy Quarterly*, Vol. 4, July 1987.

McIntyre, Alasdair. *After Virtue*. (London: Duckworth, 1985)

Mulgan, Richard. "Aristotle and the Value of Political Participation." Dalam *Political Theory*, Vol. 18, Mei 1990

----- . *Aristotle's Political Theory*. (Oxford: Oxford University Press, 1977)

Nussbaum, Martha C. *The Fragility of Goodness: Luck and Ethics in Greek Tragedy and Philosophy*. (Cambridge: Cambridge University Press, 1986)

Ober, Josiah. *Political Dissent in Democratic Athens*. Princeton: Princeton University Press, 1998.

Pears, David. "Courage as a Mean." Dalam Amelie Oksenberg Rorty (ed.). *Essays on Aristotle's Ethics*. (Berkeley: University of California Press, 1980)

Plato. *Republic*. Penerj. G.M.A. Grube. (Indianapolis: Hackett Publishing Company, Inc., 1992)

----- . *Gorgias*. Penerj.. James H. Nichols Jr. (Ithaca and London: Corner University Press, 1998)

Rapar, J. H. *Filsafat Politik Arisoteles*. (Jakarta: Rajawali Press, 1988)

Ross, Sir David. *Aristotle*. (London: University Paperbacks, Mathuen & Co. Ltd., 1964)

----- . "Aristotle on Eudaimonia." Dalam *Essays on Aristotle's Ethics*. Amelie Oksenberg Rorty (ed.). (Berkeley: University of California Press, 1980)

Schwarzenbach, Sybil. "A Political Reading of the Reproductive Soul in Aristotle," dalam *History of Philosophy Quarterly*, Vol. 9, July, 1992

Sinclair, R. K. *Democracy and Participation in Athens*. (Cambridge: Cambridge University Press)

Sokolowski, Robert. "Guide for Reading Aristotle's Nicomachean Ethics" (ms.). The Catholic University of America, Fall 2004

Strauss, Leo. *The City and Man*. (Chicago: Rand McNally Company, 1964)

Taylor, A. E. *Aristotle*. (New York: Dover Publications, Inc., 1955)

Usman, Sunyoto. "Peran Civil Society (masyarakat Madani) dalam Tata Pemerintahan," dalam <http://www.google.co.id/search?hl=id&q=sunyoto+usman+tentang+peran+civil+society&meta>

Vander Waerdt, P. A. "Kingship and Philosophy in Aristotle's Best Regime." Dalam *Phronesis*, Vol. XXX/3, (1985)

Von Fritz, K. dan Kapp, E. "Development of Aristotle's Political Philosophy," dalam Jonathan Barnes, cs.. (eds.). *Articles on Aristotles Ethics and Politics*. (London: Gerard Duck Worth & Company Lmt., 1977)

Wallace, William A. *The Elements of Philosophy*. (New York: Alba House, 1977)

Wilkes, Kathleen. "The Good Man and the Good for Man." Dalam Amelie Oksenberg Rorty (ed.). *Essays on Aristotle's Ethics*, (Berkeley: University of California Press, 1980)

Yack, Bernard. *The Problem of a Political Animal*. Berkeley: University of California Press, 1993)